



Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila

untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII



Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

2022

Penafian: Buku ini merupakan buku referensi (rujukan) yang disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Penyusunan buku ini mengacu pada Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Standar Materi yang ditetapkan oleh BPIP. Oleh karena itu, buku ini dapat digunakan sebagai pengayaan pengetahuan tentang ideologi Pancasila di program pendidikan dan satuan pendidikan. Buku ini juga merupakan dokumen dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan.

**PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII**

Penulis

Yon Machmudi, Asep Dahliyana

Penelaah

Muhammad Sabri, Adji Samekto, Dadang Sundawa, Dwi Purwoko

Penyelia/Penyelaras

Supriyatno

Irene Camelyn Sinaga

Kontributor

Irna Anita, Dede Rosidah

Ilustrator

Misran, Muhammad Raafiu Firmansyah, Felia Febriany

Editor

Hendrikus Genggor

Desainer

Muhammad Nurjihad, Wilda Frandeska, Ingrid Pangestu

Penerbit

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Jalan Veteran III No.2, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Dikeluarkan oleh:

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bekerja sama dengan Pusat Perbukuan
Kemendikbudristek

Cetakan Pertama, 2022

ISBN 978-623-8113-09-5 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-623-8113-12-5 (jil.3)

Isi buku ini menggunakan huruf Opens Sans 11/16 pt., Steve Matteson
xii, 148 hlm.: 17,6 × 25 cm.



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

SAMBUTAN

Salam Pancasila!

Buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila ini merupakan buku referensi utama dalam rangka memperkaya pemahaman ideologi Pancasila pada seluruh satuan pendidikan formal jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MAK. Buku referensi ini mengacu pada buku bahan ajar Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila (PPIP). Hadirnya buku bahan ajar berawal dari perintah Presiden RI Joko Widodo yang saat itu didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara RI dalam pertemuan terbatas di Istana Negara pada Februari 2021 dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo berpesan tentang pentingnya menanamkan nilai Pancasila dengan metode yang menyenangkan bagi peserta didik. Dalam upaya memenuhi harapan Presiden, proses penyusunan buku bahan ajar PPIP melibatkan sejumlah pakar dan praktisi bidang pendidikan dan ideologi Pancasila. Pada bulan Agustus 2021, buku bahan ajar PPIP selesai disusun oleh BPIP. Bertepatan dengan Perayaan Hari Lahir Pancasila di Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 1 Juni 2022, buku bahan ajar Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila diluncurkan sekaligus menandai dicanangkannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan formal sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.

Dalam perkembangannya, buku bahan ajar tersebut belum dapat langsung dipergunakan dalam satuan pendidikan karena harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu dengan kurikulum Merdeka Belajar yang menjadi arus utama dalam pendidikan Indonesia saat ini. Untuk itu, dilakukan pendalaman kembali oleh BPIP bersama Kemendikbudristek dengan melibatkan unsur pakar dan praktisi bidang pendidikan dan ideologi Pancasila serta Anggota Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pakar BPIP. Sebagai hasilnya, buku bahan ajar yang telah diselaraskan ini ditetapkan menjadi buku referensi utama Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Penulisan buku referensi ini didasarkan pada fakta dan sejarah yang autentik sehingga mengembalikan pemahaman yang benar tentang Pancasila. Pemberian metode pembelajaran Pancasila yang berorientasi pada siswa (*student centered learning*) dapat membuat peserta didik lebih aktif terlibat dalam praktik dan pengalaman ber-Pancasila secara nyata yang selaras dengan kurikulum Merdeka Belajar. Cara penyampaian materi yang ada pada buku mendorong agar para peserta didik bisa mengeksplorasi rasa ingin tahu, kreativitas, serta sikap gotong-royong dalam meneladani Pancasila. Buku ini diharapkan dapat menjadi penuntun dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual.

Buku referensi PPIP ini menggunakan konsep “Tri Pusat Pendidikan” yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menyentuh seluruh warga sekolah, anggota keluarga di rumah, dan berbagai *stakeholder* terkait di lingkungan masyarakat agar terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Buku ini mengandung pesan bahwa sejatinya pembinaan Ideologi Pancasila, khususnya bagi generasi penerus, merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama secara bergotong royong demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diyakini mampu mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik dengan pengamalan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Kepada semua pihak yang telah bergotong royong dengan tekun sedari awal menyusun buku bahan ajar dan buku referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila pada seluruh satuan pendidikan formal jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MAK ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dalam upaya untuk membumikan Pancasila kembali melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rida dan karunia-Nya kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, 12 Desember 2022

Kepala,



Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Kemerdekaan Indonesia tidak hanya ditandai dengan keberhasilan bangsa kita untuk melepaskan diri dari penjajahan, tetapi juga dengan dirumuskannya suatu falsafah yang sarat makna, yakni Pancasila. Sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bertanah air, Pancasila mewakili nilai-nilai luhur yang senantiasa kita junjung sebagai masyarakat Indonesia, sekaligus menggambarkan mimpi dan harapan kita dalam membangun negara yang maju dan bermartabat.

Mengingat pentingnya makna dan peran Pancasila, kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui gerakan Merdeka Belajar telah berkomitmen untuk terus mengedepankan Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari penguatan karakter pelajar Indonesia.

Melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai bagian dari Kurikulum Merdeka, kami mendorong Pendidikan Pancasila yang jauh lebih relevan dan kontekstual sehingga anak-anak Indonesia dapat memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Hadirnya buku *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila* yang lahir berkat kerja sama Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek dengan Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila ini merupakan langkah lanjutan dalam upaya kita bersama mewujudkan Pelajar Pancasila. Buku referensi ini memuat materi untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang Pancasila.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan berkolaborasi dengan baik sehingga buku ini dapat terbit dan menjadi referensi bagi kita semua dalam melahirkan Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Besar harapan saya bahwa buku *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila* ini dapat memperkokoh ketahanan budaya bangsa serta membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter.

Mari kita terus bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar, membawa Indonesia melompat ke masa depan dalam semangat Pancasila.

Jakarta, Januari 2023

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,**



Nadiem Anwar Makarim

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Buku ini pada dasarnya merupakan dorongan atau stimulus pembelajaran bagi para peserta didik. Dengan itu, guru dapat mengembangkan pembelajaran dengan contoh-contoh yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi setempat agar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Agar mudah dimengerti, buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII ini disusun secara sistematis ke dalam lima (5) bab. Dalam setiap babnya, buku ini memiliki bagian-bagian, yaitu:



Capaian Kompetensi

Pada setiap bagian awal bab buku ini disajikan keterangan mengenai capaian kompetensi peserta didik setelah mempelajari dan melakukan aktivitas-aktivitas di dalamnya.



Pengantar

Bagian kedua adalah bagian pengantar. Pada bagian ini, peserta didik akan diantar memasuki pelajaran pada bab melalui narasi singkat yang mengurai latar belakang dan tujuan berbagai materi pembelajaran serta aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan di dalamnya.



Praktik Pengamalan Pancasila

Bagian ketiga adalah praktik pengamalan Pancasila. Di bagian ini, peserta didik akan dikenalkan pada berbagai praktik pengamalan Pancasila yang terjadi di tengah kehidupan. Hal ini penting untuk memberikan contoh teladan kepada peserta didik bagaimana mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari.



Materi Pokok

Bagian keempat adalah materi. Bagian ini berisi pemaparan tentang konsep-konsep terkait Pancasila yang tengah dipelajari pada bab. Penyampaian narasi tulisan dan ilustrasi gambar pada bagian ini akan disampaikan secara menarik guna memudahkan peserta didik dalam mempelajarinya.



Refleksi

Bagian kelima adalah refleksi. Refleksi dalam buku ini disampaikan dalam bentuk beragam. Ada yang berupa soal pengingat, diskusi, hingga aktivitas yang mengajak peserta didik melakukan hal-hal yang membuat mereka mampu merefleksikan berbagai pengamalan belajar yang telah diterima.

DAFTAR ISI

Sambutan	iii
Kata Pengantar	vi
Petunjuk Penggunaan Buku	viii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xi
BAB I Pancasila dan Tantangan Globalisasi	1
BAB II Menjaga Keutuhan NKRI	29
BAB III Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa	53
BAB IV Wawasan Kebinekaan	73
BAB V Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa	95
Glosarium	123
Daftar Pustaka	129
Profil Pelaku Perbukuan	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bela Negara dalam Bentuk Menyaring Informasi	6
Gambar 1.2	Foto Kerusakan dalam Demonstrasi di Indonesia	9
Gambar 1.3	Suasana di perpustakaan di mana setiap orang menjaga dan menahan diri untuk tidak bersuara agar tidak..... mengganggu pengunjung yang lain	11
Gambar 1.4	Religius, psikologis, politik, sosial, ekonomi merupakan faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya..... radikalisme.....	20
Gambar 1.5	Aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang tertanam kuat dalam diri warga negara mampu menangkal radikalisme dan intoleransi.....	23
Gambar 2.1	Perwujudan keutuhan NKRI dengan menjaga keharmonisan dalam perbedaan	31
Gambar 2.2	Pelajar berupaya mencopot poster yang didalamnya berisi tentang provokasi yang dapat membahayakan keutuhan NKRI	33
Gambar 2.3	Infografik "Milik Kita di Laut Natuna"	36
Gambar 2.4	Aktualisasi menjaga keutuhan NKRI melalui pengabdian untuk mendidik warga negara yang berada di pulau-pulau perbatasan Indonesia.	37
Gambar 2.5	Infografik Pilar Pembangunan Indonesia 2045	43
Gambar 2.6	Infografik persentase proyeksi peningkatan peran ekonomi Luar Jawa dan Kawasan Indonesia Timur 30 tahun mendatang	44
Gambar 2.7	Menjaga keutuhan NKRI melalui perilaku sadar hukum dalam berlalu lintas.....	45
Gambar 2.8	Tampilan situs Lapor.go.id	50
Gambar 2.9	Menjaga keutuhan NKRI dengan gerakan mencintai .. produk dalam negeri.....	51

Gambar 3.1	Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui upaya mewujudkan kehidupan yang tentram, damai, harmonis, dan bersahaja dalam bingkai “Bhinneka Tunggal Ika”	55
Gambar 3.2	Barisan Paskibraka Nasional.....	59
Gambar 3.3	Belajar persatuan dan kesatuan dari tubuh yang terdiri dari beragam bagian yang berbeda, tetapi apabila salah satu bagian mengalami sakit, maka bagian tubuh yang lain akan berupaya untuk meminimalisir rasa sakit tersebut	61
Gambar 3.4	Menumbuhkembangkan semangat nasionalisme melalui menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga kelestarian alam sebagai ciptaan Tuhan.....	65
Gambar 4.1	Suasana multikulturalisme di ibu kota Majapahit.....	75
Gambar 4.2	Belajar perbedaan dari jari manusia yang setiap bagian memiliki nama dan fungsi berbeda tetapi menjadi keindahan saat berada dalam satu kesatuan.....	80
Gambar 4.3	Infografik perkataan Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi “Si Timou Tumou Tou”	88
Gambar 4.4	Belajar mengaktualisasikan musyawarah dengan proses yang baik dan mencapai mufakat sebagai keputusan bersama.....	89
Gambar 5.1	Infografik survei keberagaman di sekolah dan universitas.....	105
Gambar 5.2	Infografik lahirnya Sumpah Pemuda	108
Gambar 5.3	Kegiatan Rapat OSIS.....	110
Gambar 5.4	Menguatkan bahasa persatuan.....	112
Gambar 5.5	Infografik jumlah pengguna media sosial di Indonesia	115
Gambar 5.6	Ajakan penggunaan internet dengan bijak.....	119

BAB I

Pancasila dan Tantangan Globalisasi



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami serta melakukan aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam bab ini, kalian diharapkan dapat:

1. menjelaskan dengan benar makna globalisasi beserta pengaruhnya terhadap kemunculan tantangan-tantangan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia pada era saat ini;
2. mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang muncul di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada era globalisasi beserta dampak-dampak buruk yang dihasilkannya;
3. memberikan penjelasan secara utuh dan cara menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan penuntun untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada era globalisasi;
4. mempraktikkan sikap hidup berdasarkan Pancasila dalam rangka mengatasi berbagai tantangan era globalisasi yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari melalui contoh keteladanan yang diberikan.



Pengantar

Pancasila bukan saja berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sumber dari segala sumber hukum, ideologi negara, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa. Kedudukan yang demikian itu menunjukkan bahwa Pancasila memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang sesuai dengan budaya bangsa serta keluwesan dan daya adaptasi yang tinggi terhadap berbagai perubahan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, Pancasila bukanlah sesuatu yang kaku sehingga tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

“Menyesuaikan diri” di sini tidak berarti bahwa sila-sila Pancasila yang dirumuskan para pendiri bangsa itu bisa berubah, sama sekali bukan! Menyesuaikan diri dalam hal ini berarti bahwa pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus selalu dikembangkan agar mampu menjawab tuntutan zaman. Dengan itu, Pancasila akan tetap mampu membuat bangsa Indonesia terus menerus mempertajam wawasan dan kemampuannya untuk memecahkan berbagai masalah dan tantangan yang tengah dihadapi.

Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kalian dan kita semua harus senantiasa memahami isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga dapat dimaknai secara lebih dalam dan mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjawab berbagai persoalan pada seluruh aspek kehidupan kita. Inilah satu cara yang tepat bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia dalam menjamin keberlangsungan Pancasila saat ini dan di masa mendatang.

Pada bab ini, akan dibicarakan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam upaya menguatkan, menumbuhkan, dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tantangan-tantangan tersebut tidak diidentifikasi secara cepat dan tepat, maka upaya antisipasinya pun terlambat sehingga berpotensi mengancam keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.

Namun sebelum membahas lebih dalam tentang tantangan-tantangan yang dimaksud, kalian akan diajak terlebih dahulu mempelajari bagian praktik pengamalan Pancasila. Di situ akan disajikan salah satu contoh sikap yang dapat kalian tiru, tanam, dan kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tersebut bernama sikap bela negara. Seperti yang nanti akan kalian baca pada bagian itu, sikap bela negara merupakan hal wajib yang patut kita amalkan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mengapa? karena sikap bela negara adalah pembuktian semangat nasionalisme atau kecintaan kita terhadap Pancasila, negara dan tanah air Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan di era globalisasi.



Praktik Pengamalan Pancasila

Sikap bela negara sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan ancaman terhadap Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini sejalan dengan apa yang pernah ditulis Kementerian Pertahanan Indonesia, bahwa: *"Bela negara adalah semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta ataupun nyawa demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*.

Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita diwajibkan untuk mencintai NKRI serta menjaga kesatuan dan persatuan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan bahwa *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”*. Pasal 30 ayat (1) dalam UUD juga mengatakan bahwa: *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”*. Kini pertanyaannya, hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk ikut serta dalam bela negara tersebut? Bagaimana kita dapat membela dan membentengi bangsa Indonesia dari pengaruh-pengaruh negatif dari luar akibat globalisasi? Mari kita baca artikel media berikut ini.

Bentuk dan Contoh Bela Negara

Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam bela negara adalah: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara.

Dalam pelaksanaan bela negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan negara secara fisik di antaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara, pembelaan negara non fisik adalah semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Selain itu,

pembelaan negara bisa juga dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dan peran serta untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bela negara dapat dilakukan dengan contoh-contoh sebagai berikut:

1. Meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi,
2. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga,
3. Ikut serta menanggulangi akibat bencana alam,
4. Meningkatkan kesadaran untuk selalu menaati tata tertib sekolah,
5. Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat,
6. Menjaga keamanan lingkungan masyarakat secara bersama-sama
7. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Dari artikel di atas, kita dapat mengetahui bahwa perilaku bela negara tidak mesti dilakukan dengan mengangkat senjata dan berperang melawan musuh-musuh negara. Perilaku bela negara dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga, belajar dengan rajin di sekolah, meningkatkan kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, dan lain sebagainya.

Nilai-nilai budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dapat menciptakan ketidakharmonisan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kalian dapat menunjukkan sikap bela negara dengan menjadikan Pancasila sebagai penyaring setiap pengaruh atau nilai-nilai luar yang masuk ke Indonesia. Pengaruh dan nilai-nilai budaya luar perlu disesuaikan dengan budaya Indonesia sehingga hanya pengaruh positif saja yang kita ambil sementara yang membawa dampak negatif kita tinggalkan. Itulah beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan

dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk bela negara yang tentu saja sejalan dengan Pancasila. Ayo kita membiasakan diri dengan selalu menyaring terlebih dahulu setiap pengaruh yang datangnya dari luar! Ingat, globalisasi memiliki dampak positif dan juga negatif!



Gambar 1.1 Bela Negara dalam Bentuk Menyaring Informasi.





Materi Pokok

Globalisasi yang disertai kemajuan peradaban teknologi dan informasi memungkinkan setiap orang dengan mudah mengetahui apa yang terjadi dan dilakukan oleh orang lain di berbagai belahan dunia. Globalisasi membuat seorang individu atau kelompok di satu negara dapat dengan mudah menjalin hubungan dengan individu atau kelompok lain di luar batas wilayah negaranya. Dengan kondisi seperti itu, tatanan kehidupan masyarakat pun mulai bergerak dari semula hanya menjadi warga suatu negara, sekarang menjadi warga dunia (*global community*). Akibatnya, nilai-nilai moral, agama, sosial dan budaya yang pada awalnya telah mengakar dalam kehidupan satu bangsa, bisa menjadi bergeser seiring dengan interaksi global yang terjadi.

Ada banyak pengertian tentang globalisasi yang dapat kalian temui dalam berbagai sumber. Salah satunya diberikan oleh Selo Soemardjan. Dalam buku berjudul Pengantar Sosiologi, ia mengatakan bahwa: *“globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama”*.

Dari pengertian tersebut, kita bisa lebih paham bahwa globalisasi pada intinya merupakan sebuah proses integrasi (penyatuan) secara global (internasional) yang terjadi karena pertukaran pengetahuan, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya akibat kemajuan transportasi dan telekomunikasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) antarindividu atau kelompok di berbagai belahan dunia.

Dengan adanya saling ketergantungan antarindividu atau kelompok tersebut, dunia seakan-akan berubah menjadi satu masyarakat global di mana setiap anggotanya saling berinteraksi satu sama lain tanpa memandang dari mana asal negaranya, maju atau berkembang, desa atau kota. Semuanya seakan-akan dipaksa untuk berinteraksi. Kondisi ini secara tidak langsung mengakibatkan negara tidak lagi dirasakan masyarakat menjadi satu-satunya aktor yang dianggap penting. Berkat hubungan internasional yang semakin mudah, aktor-aktor non-negara seperti perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas atau bahkan individu pun dapat tampil seperti halnya negara yang berperan memenuhi berbagai kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Seiring dengan penguatan peran aktor-aktor non-negara tersebut, globalisasi juga telah memberi dampak pada munculnya kesadaran-kesadaran baru masyarakat dunia tentang pentingnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Tanpa disadari, HAM telah menjadi isu di berbagai negara yang sangat mendesak untuk direalisasikan. Sekalipun secara kelembagaan maupun budaya hukum belum siap, setiap negara di dunia – apapun kondisinya – harus menjalankan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jika dicermati, penguatan aktor non-negara dan dorongan pelaksanaan HAM yang dibawa globalisasi sebenarnya bermuara pada semakin kompleksnya peran negara. Oleh karena itu, jika tidak diantisipasi dengan benar, kondisi ini akan menyebabkan kontrol negara atas masyarakatnya menjadi semakin lemah dan berdampak pada munculnya situasi-situasi yang justru dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Jika dilihat dari apa yang terjadi di Indonesia sejak awal periode reformasi sampai sekarang, kita bisa membuktikan bahwa situasi-situasi yang mengancam itu muncul melalui aktivitas-aktivitas seperti pemogokan buruh (tenaga kerja), demonstrasi atau unjuk rasa yang mengakibatkan rusaknya fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya.



Gambar 1.2 Foto Kerusuhan dalam Demonstrasi di Indonesia.

Sumber: kompas.com/Kristianto Purnomo

Melihat kenyataan tersebut, globalisasi memang menghadirkan situasi dilematis, terutama bagi negara-negara yang masih tergolong sebagai negara berkembang seperti Indonesia. Di satu sisi globalisasi memang memberikan peluang yang besar bagi bangsa Indonesia agar dapat berkedudukan sama seperti negara-negara maju antara lain melalui kehadiran investasi asing, pengiriman pelajar/mahasiswa untuk studi di negara-negara maju, hingga semakin terjaminnya HAM para warga negara. Namun demikian di sisi lain, globalisasi juga memberikan dampak yang sangat membahayakan jika tidak diantisipasi secara benar seperti nilai-nilai budaya yang dapat mengganggu atau melemahkan nilai-nilai Pancasila.

Demikianlah situasi dilematis yang sering kita lihat muncul belakangan ini. Betapa memang globalisasi nyata menghadirkan berbagai macam tantangan yang harus kita jawab dengan menggunakan Pancasila sebagai pedoman dan penuntunnya. Berikut ialah beberapa tantangan utama yang dapat muncul.

A. Menguatnya Individualisme

Semangat HAM yang bergulir melalui proses globalisasi dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat telah menimbulkan situasi dilematis bagi Indonesia. Di satu sisi, semangat tersebut membawa dampak positif berupa meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka yang harus dipenuhi oleh negara. Namun demikian di sisi lain, pelaksanaan HAM tersebut seringkali menimbulkan masalah. Jika dicermati, salah satu penyebab utamanya adalah karena semangat HAM yang datang bersama globalisasi lebih berorientasi pada kepentingan individu (individualisme).

Dari sejarahnya, nilai-nilai HAM yang datang dari negara-negara Eropa Barat tersebut berasal dari pemikiran yang menjunjung tinggi keberadaan manusia sebagai individu yang bebas. Namun demikian, pemikiran-pemikiran berpaham individualisme seperti ini belum tentu cocok jika diterapkan di Indonesia. Seperti yang mungkin telah kalian ketahui, sistem atau kebudayaan masyarakat Indonesia pada dasarnya lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau kolektif yang sering dimunculkan melalui praktik gotong royong. Ini tentu berbeda dengan semangat perorangan (individu) yang diajarkan oleh individualisme.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, individualisme diartikan dengan empat makna, yaitu: Paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan, Paham yang menghendaki kebebasan berbuat dan menganut kepercayaan bagi setiap

orang, Paham yang mementingkan hak perseorangan dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat atau negara, dan Paham yang menganggap diri sendiri (kepribadian) lebih penting daripada orang lain.



Gambar 1.3 Suasana di perpustakaan di mana setiap orang menjaga dan menahan diri untuk tidak bersuara agar tidak mengganggu pengunjung yang lain.

Dengan semakin menguatnya individualisme dalam diri masyarakat, hal-hal yang menjadi kepentingan bersama pun seringkali menjadi terganggu. Orang-orang yang hidup pada era ini dengan mudahnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat dengan mengatasnamakan HAM. Di sisi lain, negara pun menjadi seperti terlihat melemah. Ia tidak bisa menindak perbuatan-perbuatan tidak terpuji tersebut karena khawatir akan mendapat protes

dan sorotan, baik dari masyarakat dalam negeri maupun luar. Lebih tragis lagi, sorotan dan kritik tersebut kemudian dapat dimanfaatkan juga oleh sekelompok orang untuk membangun citra negatif bagi pemerintah atau negara. Untuk menghadapi hal tersebut, Pancasila sebenarnya memiliki jawaban, tinggal bagaimana kita mau atau tidak untuk memahami dan mengamalkannya.

Sebagai sebuah pedoman hidup, Pancasila mengandung keyakinan bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dalam hal ini, Pancasila tidak meniadakan kepentingan individu setiap warga melainkan menyeimbangkannya dengan kepentingan bersama. Melalui nilai-nilai yang terdapat dalam sila kedua (kemanusiaan) dan ketiga (kebangsaan), Pancasila selalu menghendaki negara dan seluruh bangsa Indonesia untuk mengakui keberadaan hak-hak individu secara seimbang dengan kepentingan nasional. Pancasila juga mengajarkan tentang kewajiban atau tanggung jawab yang melekat di dalam setiap manusia.

Dengan demikian, semangat HAM yang semakin menguat pada era globalisasi harus bisa dilaksanakan dengan berpedoman pada Pancasila dengan tetap mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, persatuan dan kesatuan bangsa, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan HAM harus pula sejalan dengan upaya bersama menciptakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Melalui cara pandang tersebut, Pancasila pun sebenarnya menghendaki agar keberadaan hak individu yang meningkat akibat globalisasi tidak boleh mengurangi hak negara untuk melakukan pengawasan dan pengaturan berdasarkan hukum yang berlaku. Negara melalui pemerintah harus tetap diberi ruang untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan HAM dengan penegakan hukum yang tegas. Itu dilakukan bukan semata-mata karena kewenangan yang dimiliki, melainkan untuk menegakkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam era globalisasi cenderung mementingkan hak dibanding kewajiban atau tanggung jawab.

B. Kosmopolitanisme

Secara harfiah, kosmopolitan berasal dari kata Yunani *kosmopolites* yang berarti 'warga dunia' (*citizen of the world*). Menurut Pauline dan Brown, kosmopolitanisme pada dasarnya merupakan satu paham yang menganggap seluruh manusia adalah anggota dari satu komunitas (warga dunia/global). Dengan pengertian seperti itu, kosmopolitanisme mendorong agar tatanan kehidupan manusia di seluruh dunia didasari oleh nilai-nilai universal yang sama dengan mengecilkan keberadaan nilai-nilai nasionalisme; cinta tanah air, negara dan bangsanya.

Perkembangan kosmopolitanisme di Indonesia memiliki dampak yang tidak jauh berbeda dengan Individualisme. Hanya saja, penekanan yang diberikan oleh kosmopolitanisme cenderung mengarah pada persoalan pelemahan identitas dan solidaritas kebangsaan. Kosmopolitanisme yang dalam praktiknya mementingkan kehadiran manusia sebagai individu ketimbang kelompok itu, menghendaki agar identitas diri seseorang sebagai manusia (global) lebih tinggi atau diutamakan. Bahkan kosmopolitanisme menghendaki agar identitas warga negara atau bangsa sama sekali dihilangkan. Jika paham ini terus menerus berkembang, sikap solidaritas dan rasa kebersamaan pasti akan semakin terkikis dari pola kehidupan masyarakat.

Terlebih, kecenderungan hidup para penganut kosmopolitanisme juga menghendaki agar negara bukan lagi bertindak untuk melayani kepentingan bersama secara adil, melainkan turun melayani hingga ke tingkatan individu secara sama. Padahal, adil belum tentu sama. Perlakuan negara pun tidak bisa sama untuk setiap individu. Demi menegakan keadilan, negara perlu bertindak afirmatif (memihak) kepada yang lebih lemah agar tidak terjadi ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat.

Pancasila jelas tidak menghendaki hal-hal yang demikian. Seperti yang dijelaskan oleh Sukarno dalam pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945, *"Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme."*, Pancasila menghendaki terjadinya keseimbangan status dalam diri setiap manusia Indonesia antara menjadi bagian dari umat manusia (global) dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dengan itu, identitas kebangsaan yang dibangun oleh Pancasila pada dasarnya merupakan bagian dari identitas kemanusiaan universal. Ia mengakui seluruh umat manusia merupakan makhluk Tuhan yang sama dan harus bekerja sama. Namun demikian di sisi lain, Pancasila juga menghendaki agar di dalam setiap identitas yang bersifat universal itu, ada pengakuan kebinekaan. Pancasila mengakui bahwa setiap manusia pasti memiliki latar belakang agama, suku, dan bangsa yang berbeda-beda.

Dari paparan di atas terlihat bahwa kosmopolitanisme harus bisa disikapi dengan tegas. Paham ini menyalahi kodrat bangunan identitas kebangsaan Indonesia berdasarkan Pancasila yang menghendaki keseimbangan antara status manusia sebagai bagian dari warga global dan warga negara, bukan malah meninggikan salah satunya.

C. Fundamentalisme Pasar

Fundamentalisme pasar terdiri dari dua kata yang dapat diartikan masing-masing, yaitu: fundamentalisme dan pasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fundamentalisme adalah suatu paham yang cenderung memperjuangkan sesuatu secara mendasar tanpa kompromi. Sedangkan "Pasar" dalam hal ini bukan dimaknai menjadi tempat/lokasi. "Pasar" dalam pengertian fundamentalisme pasar lebih cocok diarahkan pada satu gagasan atau pemahaman tentang mekanisme tukar menukar (jual/beli).

Menurut Harry B. Priyono dalam Majalah Prisma, Fundamentalisme pasar adalah: *“satu gagasan/paham yang menganggap mekanisme pasar (transaksi jual/beli) bukan hanya sebagai prinsip pengatur alokasi pemenuhan barang/jasa kebutuhan, tetapi sebagai satu-satunya prinsip/dasar pengatur seluruh bidang kehidupan dalam tatanan bermasyarakat”*.

Dari definisi tersebut, fundamentalisme pasar dapat digolongkan sebagai bagian dari paham yang bersifat individualisme. Selain menekankan kepentingan ekonomi individu di atas kepentingan ekonomi kelompok, fundamentalisme pasar dalam praktiknya juga menghendaki agar peran negara dalam pengaturan ekonomi dilakukan seminimal mungkin. Atau, walaupun ada aturan-aturan yang dikeluarkan negara, seluruhnya harus ditujukan untuk memfasilitasi dan mendorong terciptanya kebebasan setiap individu untuk dapat bertransaksi secara leluasa dalam pasar.

Bagi para penganut fundamentalisme pasar, setiap orang dianggap semata-mata sebagai makhluk ekonomi yang selalu memiliki motivasi mengejar keuntungan. Para penganut paham ini cenderung mengagungkan kepentingan individu tanpa mau diatur oleh berbagai regulasi atau aturan yang dikeluarkan negara.

Globalisasi memang membuat paham-paham seperti fundamentalisme pasar yang bersumber dari negara-negara Barat ini hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Akibat perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi, paham fundamentalisme pasar dapat dengan mudah berkembang melalui interaksi yang dilakukan secara individu maupun kelompok.

Jika tidak diantisipasi, dampak negatif yang bisa terjadi dari berkembangnya paham fundamentalisme pasar ini adalah terjadinya ketimpangan ekonomi di masyarakat. Hal tersebut terjadi karena setiap

orang yang melakukan aktivitas ekonomi, akan menganggap dirinya semata-mata sebagai pengejar keuntungan. Ia tidak peduli lagi pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial.

Guna mengatasi terjadinya penguatan paham fundamentalisme pasar di Indonesia, Pancasila menghendaki agar negara dapat diperkuat sehingga berkemampuan menjadi pengelola sistem perekonomian di Indonesia. Sistem itu dikenal dengan nama Sistem Ekonomi Pancasila.

Seperti yang dapat dilihat dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, Sistem Ekonomi Pancasila merupakan satu sistem ekonomi yang ditandai oleh ciri-ciri: (1) Disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, (4) Memiliki prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dengan demikian, Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara yang dilandasi pertanggungjawaban moral pada Tuhan Yang Maha Esa serta cita-cita bersama. Cita-cita bersama di sini tentu berbunyi “kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila”. Sementara itu, upaya atau proses yang harus dilakukan demi mencapai cita-cita tersebut adalah melalui usaha bersama atau gotong royong.

Namun demikian, satu hal yang perlu dicatat dalam hal ini bahwa Sistem Ekonomi Pancasila bukanlah sistem yang anti terhadap pasar. Sistem Ekonomi Pancasila tetap mengakui kepentingan ekonomi individu dengan berbagai aktivitas dinamisnya dalam pasar, namun itu semua perlu dibatasi. Negara harus mengeluarkan aturan-aturan

yang dapat mengatur pasar agar selalu tercipta lingkungan ekonomi yang adil di dalamnya. Proses jual beli suatu produk yang terjadi tidak boleh berdampak pada munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Dengan semangat seperti ini, Sistem Ekonomi Pancasila menginginkan agar negara dan seluruh masyarakat menjadikan pasar sebagai wahana untuk mencapai kemajuan, keterbukaan, serta siap menghadapi segala tantangan yang muncul di dalamnya.

D. Dominasi Sistem Hukum Modern

Sistem hukum modern adalah sistem hukum yang didasarkan pada asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Eropa Barat yang tumbuh pada abad 19. Dalam kelahiran dan perkembangannya, sistem hukum modern tidak bisa dilepaskan dari pola-pola hubungan masyarakat Eropa Barat yang menempatkan kemerdekaan individu sebagai landasan utama dalam pengorganisasian masyarakat. Dengan demikian dalam sejarahnya, sistem hukum modern sesungguhnya tidak dimaksud untuk menjadi sarana pencapaian tujuan masyarakat atau instrumen memecahkan masalah-masalah seperti kemiskinan. Ia lebih dimaksud untuk menciptakan tatanan yang stabil bagi individu maupun perusahaan, dalam melaksanakan aktivitas ekonominya.

Dengan kehadiran globalisasi seperti sekarang, gejala penguatan sistem hukum modern itu terjadi seiring dengan fenomena penguatan paham fundamentalisme pasar. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka hukum di Indonesia hanya akan didominasi oleh peraturan-peraturan yang mengabdikan pada kepentingan ekonomi pasar dan meminimalkan peran negara. Akibatnya, akan terjadi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Oleh karena itu, yang diperlukan di Indonesia kini adalah membangun sistem hukum yang masih memberi ruang pada ekonomi pasar, tetapi dikombinasikan dengan pemberlakuan hukum dan kebijakan yang memihak pada perwujudan keadilan sosial.

Sistem hukum di Indonesia tentu harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hukum harus menjadi panglima tertinggi untuk mewujudkan cita-cita negara yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, sistem hukum yang dibangun di Indonesia harus menjadikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai sumber.

Dengan adanya nilai kemanusiaan dalam sistem hukum di Indonesia berarti bangsa Indonesia menolak segala bentuk eksploitasi, perbudakan antara manusia dengan manusia dengan dalih penegakan hukum. Selain itu, adanya nilai kemanusiaan dalam sistem hukum Indonesia juga membuat hukum harus dapat mendorong perwujudan sikap saling menghormati, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sementara adanya nilai keadilan sosial dalam dalam sistem hukum bangsa Indonesia mengandung maksud bahwa aturan-aturan yang dimunculkan dalam sistem hukum di Indonesia mesti dapat menjamin agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi di masyarakat tidak memunculkan ketimpangan ekonomi dan pemiskinan.

E. Radikalisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme dimaknai sebagai paham atau aliran yang radikal. Berasal dari kata bahasa latin "*radix*" yang berarti akar, radikalisme dalam pengertiannya secara harfiah adalah satu paham atau aliran (-isme) yang hendak merubah tatanan kehidupan masyarakat secara mendasar atau mengakar dengan cara kekerasan. Jika diperhatikan, makna yang diberikan KBBI tersebut bisa saja mengandung makna yang positif, seperti revolusi kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1945. Peristiwa tersebut bisa dikatakan sebagai satu peristiwa yang radikal dalam arti yang positif, karena revolusi kemerdekaan Indonesia tersebut merubah tatanan kehidupan masyarakat secara 'radikal' (mendasar), dari penjajahan menuju kemerdekaan.

Dengan melihat makna seperti itu memang tidak mudah mendefinisikan radikalisme, apalagi dalam hal keagamaan. Seperti halnya contoh revolusi kemerdekaan Indonesia di atas, radikalisme agama bisa saja dipahami secara positif. Contoh, bukankah setiap agama menuntut para penganutnya untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran di dalamnya secara 'radikal', dalam artian sampai ke akar-akarnya atau mendasar?

Dengan memperhatikan kedua contoh di atas, kita dapat pahami bahwa kata "radikalisme" memiliki makna harfiah yang sesungguhnya tidak mengandung makna negatif. Namun demikian secara etimologi (sejarah/asal usul kata), kata radikalisme telah mengalami penyempitan makna dalam penggunaannya. Seperti yang mungkin sering didengar saat ini, radikalisme lebih banyak digunakan untuk menyebut satu paham/aliran (-isme) penafsiran dalam agama yang dianggap negatif bagi kehidupan masyarakat luas.

Sebelum lebih lanjut menguraikannya, ada beberapa pendapat para ahli yang bisa membantu kita dalam memahami radikalisme, yaitu:

1) Ajaran yang sangat mengutamakan ketaatan mutlak pada agamanya dan menganggap salah keyakinan yang lain sehingga harus dimusnahkan; 2) Bahwa ajaran-ajaran agama diterima dirinya secara paksa, eksklusif dan bukan sebagai bentuk pilihan yang bebas; 3) Ada sifat militansi (ketangguhan membela) yang berlebihan sehingga menutup ruang dialog dengan penganut agama lain dalam menjalani kehidupan sosial; 4) Sangat menyangkal keberadaan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas di luar agama yang dianut. Dalam konsep ini, semua tindakan bisa dibenarkan (termasuk mengorbankan manusia) demi tegaknya penafsiran sepihak atas nilai-nilai dalam agama.

Sumber: Pancasila Dialektika dan Masa Depan Bangsa, 2019

Dari beberapa pendapat di atas, kita dapat mendefinisikan radikalisme sebagai: *“Satu paham atau aliran yang melakukan penafsiran secara deduktif, ketat, dan eksklusif terhadap ajaran-ajaran agama yang menyangkal keberadaan kelompok penganut agama dan kepercayaan lain dengan cara yang melanggar etika sosial, bahkan hak asasi manusia.”* Dari definisi itu, dapat dipahami kemudian bahwa radikalisme bukanlah agama. Ia merupakan satu paham penafsiran yang sempit atas ajaran-ajaran agama. Selain penafsiran sempit, pengaruh-pengaruh lain seperti faktor politik, sosial, psikologis dan ekonomi juga dapat mendukung lahir dan berkembangnya radikalisme. Infografik di bawah menjelaskan lebih lanjut contoh-contohnya.



Gambar 1.4 Religius, psikologis, politik, sosial, ekonomi merupakan faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya radikalisme.

Ditambah dengan era globalisasi seperti sekarang, arus informasi melalui jaringan teknologi internet semakin membuat paham-paham radikal dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Isu-isu politik keagamaan di Amerika Serikat serta peperangan yang tengah terjadi dan negara-negara Timur Tengah misalnya, dapat dengan mudah direspon menjadi gerakan-gerakan radikalisme berkat kemudahan akses informasi dan komunikasi yang tersedia.

Kita semua sebagai bangsa Indonesia sudah pasti harus mewaspadaikan radikalisme. Selain karena bertentangan dengan Pancasila dan ajaran agama itu sendiri, kehadiran radikalisme sudah barang tentu dapat menyebabkan kerusakan yang fatal bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin radikalisme dapat terbentuk menjadi tindakan-tindakan terorisme seperti aksi peledakan bom, penyerangan bersenjata, pengrusakan tempat-tempat umum, dan lain sebagainya.

F. Intoleransi

Toleransi berasal dari kata toleran yang berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Adapun penambahan imbuhan awal (in-) yang bermakna tidak, menjadikan kata intoleransi dapat dimaknai sebagai tidak toleran.

Berdasarkan makna harfiah tersebut, intoleransi dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang atau sekelompok masyarakat selalu memaksakan keyakinannya untuk dituruti pihak lain, padahal sesungguhnya pihak lain pun mempunyai hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap intoleran disebabkan karena

kesalahan dalam memaknai arti toleransi oleh warga tertentu. Dalam hubungannya dengan toleransi, bukan agama yang ditoleransikan, tetapi sikap sosial warga antarumat beragama yang harus dibangun berbasis toleransi seperti sikap menghargai, menghormati, dan sebagainya.

Intoleransi dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang atau sekelompok masyarakat, selalu memaksakan keyakinannya untuk dituruti pihak lain, padahal sesungguhnya pihak lain pun mempunyai hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Intoleransi tentu sangat terkait erat dengan radikalisme dan aksi terorisme. Agar Indonesia dapat terbebas dari aksi terorisme, maka diperlukan upaya untuk meredam radikalisme. Lalu, radikalisme pun hanya bisa dicegah dengan cara menghilangkan sikap-sikap intoleran di dalam kehidupan bermasyarakat.

Hanya saja faktanya, tren intoleransi dan radikalisme di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Dalam hasil survei yang dilakukan Wahid Institute pada tahun 2019 misalnya, sikap intoleransi di Indonesia dikatakan cenderung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya; dari 46%, menjadi 54% pada saat penelitian tersebut dilakukan. Selain itu, survey ini juga memotret keberadaan kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh gerakan radikal atau menganggap diri mereka mau dan bisa melakukan gerakan radikal jika diajak atau ada kesempatan. Jumlah mereka dalam hasil survey ini sebesar 7,1% atau sekitar 11,4 juta jiwa.

Dalam era globalisasi seperti sekarang, kecenderungan penyebarluasan intoleransi di masyarakat sangat beralasan. Perkembangan media sosial dan internet yang sangat masif pada era globalisasi saat ini memungkinkan setiap orang dapat mengirimkan serta mengakses informasi yang berisikan pesan-pesan intoleran secara lebih cepat.

Namun demikian, selain karena perkembangan TIK, beberapa penyebab tindakan intoleransi masih berkembang sampai sekarang di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. sikap memungkirkan kemajemukan (keberagaman) sebagai keniscayaan,
2. adanya kepentingan politik pihak tertentu yang menggunakan agama untuk membangkitkan solidaritas berlebihan yang saling berlawanan,
3. kemiskinan yang berpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan dan wawasan serta kemasabodohan,
4. kurang adanya komunikasi (dialog) cerdas yang mendukung keberagaman dan kebangsaan sehingga memunculkan prasangka-prasangka yang berpotensi memicu kebencian.



Gambar 1.5 Aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang tertanam kuat dalam diri warga negara mampu menangkal radikalisme dan intoleransi.

Radikalisme dan intoleransi jelas harus dilawan dengan Pancasila. Sebagaimana telah kita pahami, Pancasila khususnya sila pertama mengajarkan kita untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena cerminan dari nilai-nilai agama, Pancasila mengajarkan kita semua untuk mengamalkan cinta kasih kepada sesama manusia dan alam semesta ciptaanNya.

Selain itu, sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan sila-sila lainnya, termasuk sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila Persatuan Indonesia. Dengan mengamalkan sila pertama kita sudah pasti akan dapat menolak sikap-sikap intoleransi dan radikalisme ke dalam diri. Karena di dalamnya, ada pula kesadaran akan penghormatan kepada sesama sebagai pengamalan nilai-nilai kemanusiaan (sila kedua) dan semangat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (sila ketiga).

G. Pancasila Diabaikan sebagai Objek Ilmu Pengetahuan

Dalam kenyataannya, Pancasila sebagai pandangan hidup dan pemersatu bangsa, dasar, ideologi, serta sumber dari segala sumber hukum negara masih belum diangkat menjadi paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia. Akibatnya, ungkapan tentang kebenaran-kebenaran Pancasila, terkesan hanya menjadi slogan kosong yang diajarkan kepada para peserta didik. Ia tidak menjadi sesuatu yang tidak dipelajari secara serius dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, bahkan terkesan menjadi pelajaran yang sifatnya dipaksakan kepada para peserta didik. Kesan-kesan seperti ini jelas sangat mengancam keberlanjutan bangsa yang dibangun berdasarkan Pancasila.

Permasalahannya upaya menjadikan Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan belum menjadi arus utama dalam dunia pendidikan Indonesia. Padahal bagi kepentingan bangsa, hal tersebut diperlukan sebagai langkah awal menuju langkah berikutnya yaitu membumikan

nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Peluang untuk meningkatkan upaya tersebut sangat besar di tengah kemajuan teknologi dan komunikasi yang terjadi sekarang ini.

Jika upaya menjadikan Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan dilakukan secara serius, Pancasila tentu tidak hanya dapat diteliti rumusan, nilai-nilai maupun maknanya saja. Lebih jauh lagi, penerapan- penerapan praktis dari rumusan, nilai atau makna tersebut dapat dikembangkan menjadi satu objek atau bahkan disiplin ilmu pengetahuan tersendiri yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai objek studi ilmiah tentu dapat dikaji oleh banyak bidang ilmu pengetahuan, misalnya bidang ekonomi yang dapat memunculkan ekonomi Pancasila, bidang saintek yang dapat melahirkan saintek Pancasila, bidang hukum yang dapat melahirkan hukum Pancasila, dan sebagainya.



Pancasila merangkum nilai-nilai luhur budaya bangsa serta memiliki keluwesan dan daya adaptasi yang tinggi terhadap berbagai perubahan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan itu, Pancasila bukanlah sesuatu yang kaku sehingga tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ia adalah pandangan hidup yang selalu dapat digunakan bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul pada era globalisasi.

Pancasila memiliki jawaban untuk berbagai macam tantangan-tantangan tersebut, tinggal persoalannya pada diri kita semua. Mau atau tidak untuk memahami dan mengamalkannya sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Coba kalian identifikasikan tantangan-tantangan di era globalisasi lainnya yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai pemandu dalam menghadapi tantangan-tantangan itu.

1. Menghadapi Individualisme

Individualisme jelas bertentangan dengan Pancasila yang meyakini bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dalam hal ini, Pancasila tidak meniadakan kepentingan individu setiap warga melainkan menyeimbangkannya dengan kepentingan bersama. Melalui kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam sila kedua (kemanusiaan) dan ketiga (kebangsaan), kita semua harus mengakui bahwa keberadaan hak-hak individu harus selalu diseimbangkan dengan kepentingan nasional. Manusia Indonesia adalah manusia yang tidak pernah melupakan kewajiban atau tanggung jawab yang dimilikinya kepada bangsa dan negara.

2. Menghadapi Kosmopolitanisme

Identitas kebangsaan yang dibangun oleh Pancasila pada dasarnya merupakan bagian dari identitas kemanusiaan universal yang mengakui seluruh umat manusia sebagai makhluk Tuhan dengan hak dan martabat yang sama. Namun demikian di sisi lain, ia juga menghendaki agar di dalam setiap identitas yang bersifat universal itu, ada pengakuan terhadap kebinekaan manusia berdasarkan latar belakang agama, suku, dan bangsanya. Dengan itu semua, kosmopolitanisme yang mengesampingkan identitas individu sebagai warga negara dan bangsa jelas tidak sesuai dengan Pancasila. Ia merupakan bagian dari tantangan yang muncul dalam era globalisasi yang harus dihadapi.

3. Menghadapi Fundamentalisme Pasar

Paham fundamentalisme pasar menganggap manusia semata-mata sebagai makhluk ekonomi yang memiliki motivasi mengejar keuntungan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pancasila. Jika tidak dikendalikan, paham fundamentalisme pasar tentu bisa menciptakan kesenjangan

dan ketidakadilan di masyarakat. Untuk itu, paham ini harus dilawan dengan menegakkan sistem ekonomi Pancasila. Namun demikian, sistem ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi yang anti terhadap pasar. Pasar dikelola dan diatur sedemikian rupa oleh negara sehingga selalu tercipta lingkungan ekonomi yang adil di dalamnya.

4. Menghadapi Dominasi Sistem Hukum Modern

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan itu, hukum yang ditegakkan di Indonesia mestilah hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, hukum yang dibangun di Indonesia tidak boleh didominasi oleh sistem hukum modern yang secara prinsip bersifat individualis. Hukum di Indonesia harus menjadikan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai sumber dari segala sumber nilainya.

5. Menghadapi Radikalisme dan Intoleransi

Radikalisme dan intoleransi jelas dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika dibiarkan, kedua paham ini dapat memunculkan aksi terorisme yang sangat membahayakan. Untuk itu, kedua paham tersebut mesti dilawan dengan Pancasila, khususnya sila pertama. Karena merupakan cerminan dari nilai-nilai agama, Pancasila –khususnya sila pertama– mengajarkan kita semua untuk mengamalkan cinta kasih terhadap sesama manusia dan alam semesta sebagai makhlukNya.

Namun demikian, sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan sila-sila lainnya, termasuk sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Persatuan Indonesia. Untuk itu, pengamalan terhadap sila pertama sudah pasti akan dapat menolak masuk sikap-sikap intoleransi

dan radikalisme ke dalam diri. Karena di dalamnya, ada pula pengamalan nilai-nilai kemanusiaan (sila kedua) dan semangat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (sila ketiga).

6. Menjadikan Pancasila sebagai Objek Ilmu Pengetahuan

Sampai saat ini, Pancasila tampak belum dipelajari secara serius sebagai ilmu pengetahuan. Pelajaran tentang Pancasila terkesan selalu menjadi pelajaran yang sifatnya dipaksakan kepada para peserta didik. Seharusnya Pancasila sudah bisa dijadikan sebagai objek ilmu pengetahuan yang dikaji secara serius. Selain rumusan, nilai-nilai maupun maknanya, penerapan-penerapan praktis dari Pancasila juga dapat dikembangkan menjadi satu objek atau bahkan disiplin ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya ekonomi, sains, dan lain sebagainya. Lantas apa yang dapat kalian lakukan agar Pancasila dapat terjaga, lestari, dan diakui oleh dunia internasional?

BAB II

Menjaga Keutuhan NKRI



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami serta melakukan aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam bab ini, kalian diharapkan dapat:

1. menjelaskan makna dan arti penting perilaku menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tepat;
2. menganalisis sumber-sumber tantangan keutuhan NKRI yang berasal dari dalam (internal) dan luar negeri (eksternal);
3. mengargumentasikan cara-cara untuk mengatasi perilaku yang dapat menggoyahkan keutuhan NKRI;
4. bersedia menolak dengan tegas ajakan untuk mengganti Pancasila dan memisahkan diri dari NKRI;
5. mengembangkan bentuk-bentuk perilaku dalam keseharian yang mencerminkan sikap menjaga keutuhan NKRI.



Pengantar

Setiap masyarakat dan bangsa seperti Indonesia selalu memerlukan keutuhan wilayah, keutuhan masyarakat, dan cita-cita bersamanya. Tidak ada negara yang tidak memerlukan sebuah keutuhan. Bahkan di tingkat yang terkecil seperti keluarga, sekolah, dan organisasi di tingkat RT (Rukun Tetangga), keutuhan selalu diperlukan. Dengan keutuhan itu, suatu masyarakat akan mudah melaksanakan apa yang dicita-citakannya. Dengan alasan itu, maka setiap warga negara Indonesia, termasuk peserta didik di sekolah menengah, berkewajiban menjaga keutuhan NKRI yang menjadi tempat lahir, tinggal, dan dibesarkan. Arti kata menjaga di sini adalah memelihara, mempertahankan, menegakkan, mengurus, dan berpartisipasi.

Keutuhan NKRI bagi bangsa Indonesia diperlukan agar tujuan pendirian negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dapat tercapai, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Menjaga keutuhan NKRI, juga dimaksudkan untuk memelihara keinginan menjadi satu bangsa agar tetap bergelora dan tumbuh dengan baik. Keinginan bersama itu terwujud dalam kemauan untuk menjadi satu bangsa Indonesia yang dikumandangkan melalui Sumpah Pemuda, pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Menjadi satu bangsa adalah komitmen seluruh perwakilan pemuda dan seluruh golongan masyarakat saat itu, setelah melihat kegagalan mengusir penjajah karena perlawanannya bersifat kedaerahan, terpecah-pecah, dan dalam lingkup yang kecil. Pengamalan kegagalan perjuangan itu, mendorong tumbuhnya kehendak untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia yang memiliki wilayah, masyarakat, bahasa, dan cita-cita yang sama.

Untuk menjaga keutuhan NKRI, diperlukan keterlibatan peserta didik, masyarakat umum, pejabat pemerintah, guru, dan semua lapisan masyarakat. Masing-masing dapat terlibat menurut kewenangan dan

kapasitasnya masing-masing. Tujuannya tentu sama yakni untuk menanamkan rasa cinta kepada bangsa, negara, dan tanah air. Kita semua dapat melakukannya dengan hal-hal kecil namun bermanfaat demi melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa dan tercapainya cita-cita bersama. Contohnya dengan menyatakan menolak terorisme baik secara perorangan maupun bersama teman-teman.



Gambar 2.1 Perwujudan keutuhan NKRI dengan menjaga keharmonisan dalam perbedaan.

Pada bab ini kalian akan mempelajari lebih dalam tentang makna “perilaku” dan “keutuhan NKRI”. Kedua hal tersebut penting untuk dipahami dahulu sebelum melanjutkan pembelajaran dengan pembahasan mengenai tantangan-tantangan eksternal dan internal keutuhan NKRI, serta bentuk-bentuk perilaku menjaga keutuhan NKRI. Namun sebelumnya, kalian perlu tahu contoh-contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI.

Pada bagian refleksi, kalian akan diajak untuk menyadari betapa pentingnya perilaku menjaga keutuhan NKRI untuk diterapkan. Selain merupakan tanggung jawab sebagai generasi penerus, kalian juga pasti tidak menginginkan jika negara kita mengalami nasib yang sama dengan negara-negara seperti Libya dan Suriah yang hancur karena perpecahan.



Praktik Pengamalan Pancasila

Mengingat tantangan terhadap keutuhan NKRI dapat datang kapan dan dari mana saja, kita harus selalu memiliki sikap berani dan mawas diri untuk menghadapinya. Untuk memiliki perilaku menjaga keutuhan NKRI seperti itu, kita tentu membutuhkan contoh praktik-praktik baik yang didasari atas kesadaran untuk menjaga keutuhan bangsa, negara, dan tanah air Indonesia. Praktik-praktik tersebut tentu dilakukan oleh setiap orang atau kelompok masyarakat yang menjadi bagian dari NKRI. Agar kalian dapat lebih mudah memahami maksud pernyataan itu, berikut adalah dua cerita yang menggambarkan praktik menjaga keutuhan NKRI dengan judul Menjaga Pancasila di Sekolah dan Menjaga Wilayah NKRI di Perbatasan.

A. Menjaga Pancasila di Sekolah

Di setiap sekolah, biasanya terdapat papan pengumuman sekolah. Papan pengumuman itu digunakan untuk memberikan informasi-informasi tertentu. Informasi yang sering muncul biasanya berkaitan dengan kegiatan sekolah, lomba-lomba yang bisa diikuti para peserta didik. Kadang, informasi yang disajikan juga berhubungan dengan kursus-kursus yang bisa diikuti peserta didik.

Suatu ketika dalam papan pengumuman sekolah, terdapat informasi yang berisi ajakan dari sebuah poster. Poster itu mengajak agar generasi Indonesia mulai berpikir untuk mengganti sila-sila Pancasila. Poster itu juga menyampaikan tulisan bunyi sila-sila Pancasila yang berbeda. Namun, tidak jelas siapa yang menempelkannya.



Gambar 2.2 Pelajar berupaya mencopot poster yang didalamnya berisi tentang provokasi yang dapat membahayakan keutuhan NKRI.

Melihat adanya poster itu, seorang peserta didik kemudian membacanya. Ia lantas menyimpulkan bahwa poster itu adalah poster yang membahayakan. Selain karena bertentangan dengan Pancasila, isi pesan dalam poster tersebut dapat menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Namun, ia kemudian berpikir kalau dilaporkan kepada guru, bisa-bisa dikira dirinya yang menempelkan, tetapi kalau ia mencopot poster, tidak akan ada yang bisa membaca poster. Peserta didik akhirnya memutuskan untuk mengajak dua orang teman yang sedang berdiri di dekatnya untuk segera mencopot poster dan membuangnya ke tempat sampah. Contoh ini, jelas mencerminkan sikap dan kesadaran dalam menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah.

B. Menjaga Wilayah NKRI di Daerah Perbatasan

Wilayah NKRI memiliki batas-batas wilayah yang harus dijaga. Batas-batas wilayah itu tidak jarang merupakan daerah-daerah yang kerap dimasuki tanpa izin oleh orang-orang asing untuk melakukan hal-hal yang merugikan bangsa dan negara Indonesia. Di daerah-daerah batas wilayah yang merupakan lautan misalnya, kapal-kapal penangkap ikan asing seringkali melakukan pencurian ikan dan berbagai sumber daya laut lainnya. Selain merupakan satu bentuk pelanggaran atas kedaulatan wilayah Indonesia, tindakan pencurian seperti itu tentu saja merugikan para nelayan Indonesia dan berpotensi merusak ekosistem laut Indonesia.

Di daerah laut Natuna misalnya, seringkali nelayan asing memasuki perairan NKRI untuk melakukan pencurian ikan dan sumber daya laut lainnya. Jika kebetulan ada nelayan Natuna yang memergoki peristiwa tersebut, mereka biasanya melaporkannya secara langsung kepada aparat pemerintah atau petugas keamanan laut Indonesia yang tengah berpatroli di sekitar wilayah itu. Dengan menggunakan telepon seluler, laporan yang disampaikan itu biasanya dilengkapi pula dengan gambar atau video serta koordinat titik lokasi pencurian.

Jika diperhatikan, contoh sikap nelayan Natuna di atas jelas merupakan sikap menjaga keutuhan NKRI. Tanpa harus melakukan kekerasan, tindakan yang dilakukannya mencerminkan juga kepatuhan terhadap hukum. Ia tidak melakukan tindakan main hakim sendiri atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan dirinya. Ia memilih untuk melaporkan kegiatan pencurian tersebut secara detil kepada aparat pemerintah atau petugas keamanan di sekitar yang memang memiliki kewenangan untuk menindak. Tentu masih banyak contoh-contoh lain tentang pentingnya sikap menjaga NKRI. Kalian dapat menambahkan contoh-contoh itu berdasarkan pengamatan kalian.




MILIK KITA DI LAUT NATUNA!

Laut Natuna Berlokasi di Provinsi
Kepulauan Riau (Kepri)



Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Natuna (152.223.97 Ha) & **Taman Wisata** Perairan Kepulauan Anambas (1.2 juta Ha)



Kepri sebagai jalur strategis pelayaran di masa lalu, meninggalkan potensi **Barang Muatan Kapal Tenggelam**. Laut Natuna Memiliki 24 Titik Lokasi BMKT, 9 Titik Sudah



Gambar 2.3 Infografik “Milik Kita di Laut Natuna”.

Sumber: <https://kkp.go.id>



Materi

A. Perilaku yang Menunjukkan Sikap Menjaga Keutuhan NKRI



Gambar 2.4 Aktualisasi menjaga keutuhan NKRI melalui pengabdian untuk mendidik warga negara yang berada di pulau-pulau perbatasan Indonesia.

Kata “perilaku” berarti serangkaian tindakan yang dibuat oleh seseorang, orang yang mewakili organisasi, pemangku kebijakan, atau komunitas masyarakat. Perilaku itu berhubungan dengan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat luas, sekolah, organisasi, dan organisasi pemerintah. Perilaku dilakukan seseorang karena berhubungan dengan perlunya reaksi atau

tanggapan atas suatu hal; misalnya karena sedang memperjuangkan sesuatu, menanggapi tindakan dari orang lain atau memang karena kewajibannya.

Sementara arti “keutuhan” adalah keadaan yang menunjukkan tidak saling pecah dan tidak melepaskan diri. Dihubungkan dengan NKRI, maka keutuhan dalam hal ini dapat diartikan menjadi tiga hal: *pertama*, keutuhan wilayah NKRI, *kedua*, keutuhan masyarakat di dalam NKRI; dan *ketiga* keutuhan cita-cita bersama dalam kebangsaan Indonesia. Keutuhan wilayah mencakup seluruh wilayah yang menjadi bagian dari tanah air Indonesia. Keutuhan masyarakat mencakup di antaranya keutuhan budaya, bahasa, dan agama seluruh bangsa Indonesia. Sementara itu, keutuhan cita-cita mencakup tujuan bersama yang hendak dicapai dalam mendirikan bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Menjaga keutuhan masyarakat bukan bermakna menjadikannya sebagai satu pendapat, satu suku, dan satu keinginan, melainkan menerima kenyataan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keberagaman. Karena itu, kita harus saling menghormati dan bekerjasama dalam perbedaan itu. Menjaga keutuhan cita-cita NKRI, bukan berarti menafikan adanya perbedaan pendapat dari masing-masing kelompok masyarakat, melainkan mengarahkannya agar memiliki kesadaran akan tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar Pancasila.



B. Tantangan Keutuhan NKRI dari Sisi Eksternal dan Internal

Keutuhan NKRI dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik yang berasal dari sisi eksternal (luar) maupun internal (dalam) bangsa Indonesia sendiri.

1. Tantangan Eksternal

Dari sisi eksternal, tantangan keutuhan NKRI di antaranya adanya serangan negara luar terhadap wilayah NKRI dengan menggunakan senjata dan penguasaan wilayah, adanya pelanggaran-pelanggaran batas-batas wilayah yang dilakukan negara luar terhadap wilayah NKRI, adanya serangan teroris internasional terhadap keamanan dan kedamaian hidup masyarakat, serta kehadiran budaya- budaya asing melalui berbagai media yang merusak mental generasi muda. Saat ini, serangan dari luar tidak hanya terbatas pada invasi militer tetapi juga dapat berupa serangan siber yang bertujuan untuk merusak sistem informasi suatu negara. Serangan-serangan siber itu bisa terjadi pada sistem pertahanan, pencurian data-data digital, sistem perbankan, dan lain sebagainya.

2. Tantangan Internal

Dari sisi internal, tantangan yang muncul terhadap keutuhan NKRI adalah sebagai berikut: *Pertama*, terjadinya perpecahan, percekocokan, saling membenci, dan saling bermusuhan di antara kelompok masyarakat. Hal itu tentu merupakan tanda dari hadirnya keretakan dalam kehidupan berbangsa yang harus diwaspadai agar tidak membesar dan melemahkan keutuhan NKRI. *Kedua*, tidak amanahnya aparat penyelenggara negara dalam menjalankan praktik bernegara. Selain

dapat melemahkan upaya penanaman nilai-nilai keteladanan di tengah masyarakat, sikap ini juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap negara. Jika hal-hal seperti ini terus menerus dibiarkan, akan muncul sikap-sikap perlawanan dari masyarakat terhadap negara yang tentu saja dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, memudarnya sikap nasionalisme pada generasi muda. Jika hal-hal seperti ini terus dibiarkan, maka dengan sendirinya eksistensi bangsa Indonesia akan hilang di masa depan karena para generasi penerusnya sudah tidak memiliki kepedulian lagi untuk menjaga keutuhan NKRI.

C. Bentuk-Bentuk Perilaku Menjaga Keutuhan NKRI

Perilaku-perilaku yang selaras dengan semangat menjaga keutuhan NKRI mutlak sangat diperlukan. Namun kemauan semua komponen masyarakat menjaga keutuhan NKRI itu haruslah terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini adalah beberapa contoh sikap yang perlu dikembangkan dalam menjaga keutuhan NKRI.

1. Menolak Ajakan Mengganti Dasar Negara Pancasila

Sikap menjaga keutuhan NKRI antara lain ditunjukkan dengan menolak ajakan untuk mengganti dasar negara yang telah disepakati bersama yaitu Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila sudah menjadi landasan bagi negara dalam penyusunan berbagai peraturan hukum maupun kebijakan negara. Jika ada yang merasa tidak puas dengan keberlangsungan negara akibat peraturan atau kebijakan tertentu yang dikeluarkan, solusinya bukanlah dengan mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan kemudian mengajak orang lain untuk melakukannya.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan tonggak utama berdirinya NKRI. Jika seseorang mengajak untuk mengganti Pancasila, hal tersebut sama saja dengan upaya meruntuhkan NKRI. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kesepakatan bersama seluruh elemen bangsa Indonesia. Berbagai upaya untuk menggantikannya berarti sama dengan melanggar kesepakatan itu. Jika upaya-upaya seperti itu dibiarkan dan membesar, tentu akan menyebabkan masyarakat menjadi terbelah dan pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur akan terganggu.

Kalian sebagai generasi penerus bangsa harus terus mawas diri terhadap berbagai ajakan mengganti Pancasila yang mungkin ada di sekitar kalian. Bukan saja harus ditolak, kehadiran ajakan-ajakan tersebut harus kalian lawan dengan tindakan-tindakan yang dapat mempromosikan Pancasila dengan mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari.

2. Menolak Ajakan Memisahkan Diri dari Wilayah NKRI

Sikap menjaga keutuhan NKRI, salah satu bentuknya adalah menolak ajakan untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI. Ajakan itu biasanya dimulai dengan ungkapan ketidakpuasan atas pembangunan atau ketidakpuasan atas kinerja penyelenggara pembangunan. Ketidakpuasan itu wajar terjadi di setiap masyarakat mana saja, tetapi solusinya bukan dengan memisahkan diri dari NKRI. Selain akan menyebabkan keutuhan wilayah NKRI menjadi terkoyak, hal tersebut juga dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya peperangan yang menyengsarakan masyarakat.

Ajakan-ajakan untuk memisahkan diri dari NKRI seperti itu bisa dilakukan dalam bentuk penyebaran gagasan-gagasan memecah belah masyarakat yang disampaikan lewat media sosial, buku, majalah, dan semua saluran yang memungkinkan. Jika kalian mendapatinya, tentu ajakan-ajakan tersebut harus ditolak secara tegas. Seiring dengan penolakan tersebut, kalian juga harus memahami bahwa negara saat ini tengah mengupayakan pemerataan pembangunan untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Oleh karena itu, kalian juga harus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memisahkan diri dari NKRI bukanlah solusi yang tepat dalam menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin terjadi di Indonesia.

Sejak tahun 2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) memunculkan satu program pembangunan bernama “Visi Indonesia Emas 2045”. Di dalam program tersebut, kita dapat melihat bahwa tekad negara/pemerintah mengikis kesenjangan pembangunan yang masih terjadi di Indonesia sangatlah besar. Seperti yang dapat dilihat dalam infografik di bawah ini, Visi Indonesia Emas menjadikan pemerataan pembangunan sebagai salah satu pilar penting yang harus ditegakkan bersama Pembangunan Manusia dan Penguasaan Iptek, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Selain mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia melalui beberapa kebijakan seperti peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, perluasan pemberian jaminan sosial, dan kesempatan usaha serta peningkatan partisipasi masyarakat; negara – melalui pilar “Pemerataan Pembangunan”– juga mendorong peningkatan pembangunan daerah di luar Jawa serta Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dengan adanya percepatan tersebut, dalam 30 tahun ke depan negara memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dua kawasan itu akan terus mengalami peningkatan sehingga mampu menjadi kawasan

penyumbang ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Seperti yang dapat kalian lihat dalam infografik di bawah, pada 2045 nanti, peranan ekonomi dari Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia diperkirakan meningkat menjadi masing-masing 48,2 persen dan 25,1 persen dari total keseluruhan perekonomian nasional.

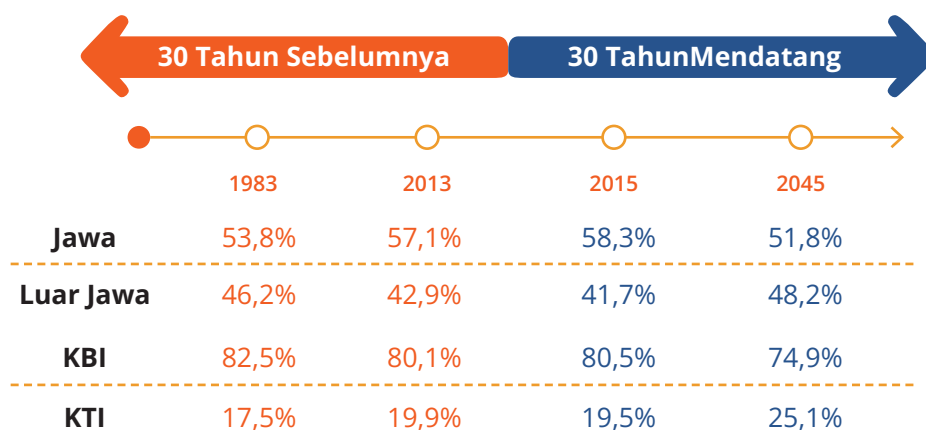


Gambar 2.5 Infografik Pilar Pembangunan Indonesia 2045.

Sumber: Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045, Bappenas

Selain menargetkan angka pencapaiannya, negara juga memutuskan bahwa arah pembangunan yang dilakukan terhadap seluruh daerah di Indonesia harus berdasarkan potensi wilayah yang dimiliki. Untuk mewujudkan hal ini, "Visi Indonesia Emas 2045" pun menetapkan bahwa

Papua akan dikembangkan menjadi basis pangan nasional dan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam. Wilayah Nusa-Bali dan Maluku akan dikembangkan menjadi lokasi wisata internasional dan perikanan nasional. Sulawesi dikembangkan menjadi basis industri pangan dan Gerbang Kawasan Indonesia Timur. Kalimantan diarahkan menjadi basis industri pengolahan dan lumbung energi nasional. Sementara di wilayah barat, Pulau Jawa tetap menjadi basis perdagangan dan jasa. Sedangkan Sumatera dikembangkan menjadi basis industri baru dan Gerbang Kawasan Asia.



Gambar 2.6 Infografik persentase proyeksi peningkatan peran ekonomi Luar Jawa dan Kawasan Indonesia Timur 30 tahun mendatang.

Sumber: Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045, Bappenas

3. Taat kepada Aturan Bersama

Taat kepada aturan bersama merupakan bentuk dari sikap menjaga keutuhan NKRI. Aturan bersama itu wujudnya ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai aturan hukum di bawahnya yang mengatur kehidupan bersama di wilayah NKRI. Setiap negara, termasuk NKRI selalu memiliki aturan-aturan bersama untuk mengatur masyarakat. Aturan bersama itu dihasilkan oleh kesepakatan yang tercermin melalui keputusan lembaga yang mewakili berbagai kepentingan masyarakat seperti DPR, MPR, maupun lembaga kepresidenan. Taat kepada aturan bersama ini, akan membuat kehidupan masyarakat menjadi tertib.



Gambar 2.7 Menjaga keutuhan NKRI melalui perilaku sadar hukum dalam berlalu lintas.

Sikap taat kepada aturan bersama, juga berarti menolak ajakan-ajakan untuk mengganti pemerintahan sah yang dihasilkan oleh Pemilu. Termasuk juga menolak ajakan-ajakan untuk mengganti pengurus organisasi yang secara sah melalui cara-cara yang tidak sesuai aturan. Penggantian pimpinan pemerintahan atau organisasi masyarakat yang sah haruslah melalui aturan, misalnya melalui pemilu (pemerintah) maupun rapat anggota (organisasi). Merebut kekuasaan di tengah jalan dengan kekerasan pasti akan menimbulkan keresahan dan memunculkan sikap saling memusuhi di antara masyarakat.

Sama halnya dengan kalian sebagai pelajar yang baik, kalian juga harus menaati aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Kalau aturan di sekolah ditaati oleh semua komponen, baik guru maupun peserta didik, maka akan tercipta kehidupan sekolah yang tertib dan harmonis. Masing-masing orang akan melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Sebaliknya, jika aturan bersama di sekolah tidak ditaati, maka akan muncul kekisruhan. Di antara guru dan murid muncul sikap saling curiga dan membenci satu sama lain. Jika hal tersebut terjadi, bisa dipastikan tujuan pendidikan, yakni menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tidak akan terwujud.

4. Bersikap Lapang Dada

Masyarakat di wilayah NKRI terdiri dari banyak suku, agama, bahasa, dan kebudayaan. Karena itu, sikap berlapang dada dalam menerima berbagai perbedaan jelas dibutuhkan. Makna sikap berlapang dada dalam hal ini adalah keinginan untuk saling belajar, bekerja sama, saling memberi, saling memaafkan bila terjadi kesalahan, dan tidak memaksakan kehendaknya. Tidak memaksakan kehendak di dalam masyarakat sangat penting, sebab masing-masing orang pasti memiliki kehendak yang berbeda-beda. Sikap berlapang dada ini juga memiliki kesamaan arti dengan sikap toleransi.

Persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan bersama tentu harus dicari jalan keluarnya, dicari titik temunya dengan tidak memaksakan kehendak. Bersikap lapang dada, salah satunya adalah dengan mengedepankan musyawarah untuk mencari jalan keluarnya, terutama saat menghadapi masalah-masalah yang sukar dicari jalan keluarnya. Satu sama lain harus saling mencari titik temu, mencari persamaan keinginan, dan saling bantu membantu untuk mencapai mufakat yang akan dilaksanakan bersama-sama.

Pada level sekolah, tidak memaksakan kehendak sendiri dan mengusahakan musyawarah mufakat adalah bagian penting dari sikap menjaga keutuhan NKRI di wilayah sekolah. Di kepengurusan OSIS dan perkumpulan ekstrakurikuler sekolah misalnya, bersikap lapang dada akan menjadi modal yang baik untuk mencapai keutuhan dan mencapai cita-cita organisasi tersebut. Sikap lapang dada yang ditanamkan sejak dini di sekolah akan dapat membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang tangguh dalam memimpin masyarakat dan bangsa di kemudian hari.

5. Saling Menghormati dan Menolak Penyebaran Kebencian

Di tengah lingkungan masyarakat yang beragam, termasuk di tingkat sekolah, setiap orang wajib untuk menunjukkan perilaku saling hormat-menghormati dengan tidak melakukan penghinaan terhadap orang lain. Sikap saling menghormati dapat dilakukan melalui bertutur kata yang baik, menjaga adab-adab kesopanan di antara masing-masing golongan, tidak melakukan penghinaan atas bahasa dan agama lain, memandangi orang lain di sekitar sebagai saudara sebangsa, dan lain sebagainya. Sikap saling menghormati seperti itu tentu akan membuahkan budi yang baik, menghasilkan banyak persaudaraan dan menjadi syarat penting untuk bisa bekerja sama, saling bantu-membantu.

Jika dikembangkan lebih lanjut, sikap saling menghormati antarorang, antarkelompok, antarwilayah, antarsuku-bangsa, dan antarumat beragama seperti itu dengan sendirinya akan menghilangkan berbagai upaya penyebaran kebencian yang mungkin masih muncul dalam ceramah- ceramah, tulisan-tulisan di buku maupun media digital. Perilaku penyebaran kebencian ini jelas harus ditolak karena akan menimbulkan sikap saling permusuhan, saling pertengkaran, dan saling menghina. Ini jelas dapat mengakibatkan keutuhan masyarakat di wilayah NKRI menjadi terancam.

6. Menyampaikan Aspirasi Melalui Saluran yang Tersedia

Di setiap negara, termasuk NKRI, pasti akan ada orang atau sekelompok masyarakat yang tidak merasa puas terhadap kebijakan atau aturan yang dihasilkan negara. Berbagai kritik kepada negara karena aspirasi atau keinginannya belum terpenuhi pasti akan selalu muncul. Selain harus dilihat sebagai kewajaran, berbagai perilaku tersebut juga mesti diakui keberadaannya sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara berdasarkan UUD NRI 1945.

Penyampaian kritik kepada pemerintah jelas diperlukan sebagai bagian dari wujud kehidupan demokrasi dan kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan. Namun demikian, hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa penyampaian kritik tersebut, seperti yang dilakukan melalui aksi demonstrasi, haruslah dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengganggu kepentingan umum serta tidak melanggar aturan. Penyampaian kritik atau aspirasi tersebut sebisa mungkin dilakukan melalui saluran-saluran yang sudah disediakan.

Di tingkatan kehidupan bernegara misalnya, penyampaian kritik dan aspirasi tersebut tidak mesti dilakukan dengan jalan melakukan demonstrasi di jalan. Masyarakat dapat memanfaatkan lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan DPRD. Masyarakat juga dapat memanfaatkan maupun sarana-sarana pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh setiap lembaga pemerintah, seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang dapat diakses melalui situs lapor.go.id. Melalui situs yang dikelola bersama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Ombudsman Republik Indonesia ini, setiap anggota masyarakat dapat menyampaikan berbagai keluhan atas kebijakan-kebijakan publik yang dirasa merugikan serta melaporkan berbagai tindakan aparat negara yang dianggap menyeleweng dari aturan yang berlaku.

The screenshot displays the LAPORI website interface. At the top left is the LAPORI logo, followed by navigation links for 'TENTANG LAPORI' and 'STATISTIK'. On the top right, there are 'MASUK' and 'DAFTAR' buttons. The main heading reads 'Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat', with a sub-heading 'Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang'. The central focus is a form titled 'Sampaikan Laporan Anda'. Under the heading 'Pilih Klasifikasi Laporan', there are three radio button options: 'PENGADUAN', 'ASPIRASI', and 'PERMINTAAN INFORMASI'. Below these is a note: 'Perhatikan Cara Menyampaikan Pengaduan Yang Baik dan Benar' with a help icon. The form contains three input fields: 'Ketik judul Laporan Anda *', 'Ketik isi Laporan Anda *', and 'Pilih Tanggal kejadian *' with a calendar icon.



Gambar 2.8 Tampilan situs Lapor.go.id

Sumber: lapor.go.id

Selain harus dilakukan melalui saluran-saluran yang tersedia, kritik atau aspirasi yang disampaikan tersebut tentu juga harus bersifat konstruktif. Artinya, berorientasi pada mencari jalan keluar atau solusi dari masalah yang dihadapi dengan tetap menjunjung tinggi sikap menjaga keutuhan NKRI. Dengan demikian, berbagai kritik itu tidak boleh diisi dengan ujaran kebencian, bukan juga berisi hal-hal yang sifatnya memfitnah atau membunuh karakter orang yang dikritik. Kritik atau penyampaian aspirasi secara konstruktif akan semakin membuat masyarakat menjadi maju karena mau membenahi apa

yang masih dianggap kurang. Sebaliknya, jika di dalamnya terdapat penyebaran kebencian, penghinaan dan pembunuhan karakter, maka penyampaian kritik itu malah justru akan memecah-belah masyarakat dan menggoyahkan keutuhan NKRI.

7. Mencintai Produk Indonesia



Gambar 2.9 Menjaga keutuhan NKRI dengan gerakan mencintai produk dalam negeri.

Mencintai produk Indonesia, baik makanan, kerajinan, maupun berbagai hasil karya lainnya juga merupakan sikap menjaga keutuhan NKRI. Sikap mencintai produk Indonesia berarti menghendaki sikap selektif terhadap produk negara luar dan mempromosikan produk-produk buatan Indonesia untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Di tengah membanjirnya produk-produk asing di pasaran, sikap ini tentu saja dapat meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Semakin banyak produk yang

digunakan, semakin banyak pula produk yang akan dihasilkan nantinya. Hal tersebut juga pasti akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan pendapatan negara.



Menjaga keutuhan NKRI merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa Indonesia. Selain menjadi bentuk rasa syukur kita atas karunia Tuhan Yang Maha Esa serta jerih payah para pahlawan bangsa, perilaku menjaga keutuhan NKRI juga menjadi sebuah keharusan agar negara Indonesia yang sama-sama kita cintai ini tidak mengalami nasib yang sama seperti negara-negara lain yang hancur porak-poranda karena perpecahan.

Untuk itu, kalian harus mempelajari sejarah perjuangan bangsa sendiri maupun bangsa-bangsa lain untuk meningkatkan wawasan serta kesadaran diri sehingga mampu mengembangkan perilaku menjaga keutuhan NKRI. Kalian dapat membaca sejarah perjuangan para pendahulu dan pendiri bangsa ini dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, pertanyaannya apa tugas yang dapat kalian perankan dalam meneruskan perjuangan para pendiri bangsa itu? Pernakah kalian mendengar cerita tentang negara-negara yang gagal (*failed state*) dan hancur? Tentu kalian tidak ingin kejadian itu terjadi di Indonesia, bukan?

BAB III

Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami serta melakukan aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam bab ini, kalian diharapkan dapat:

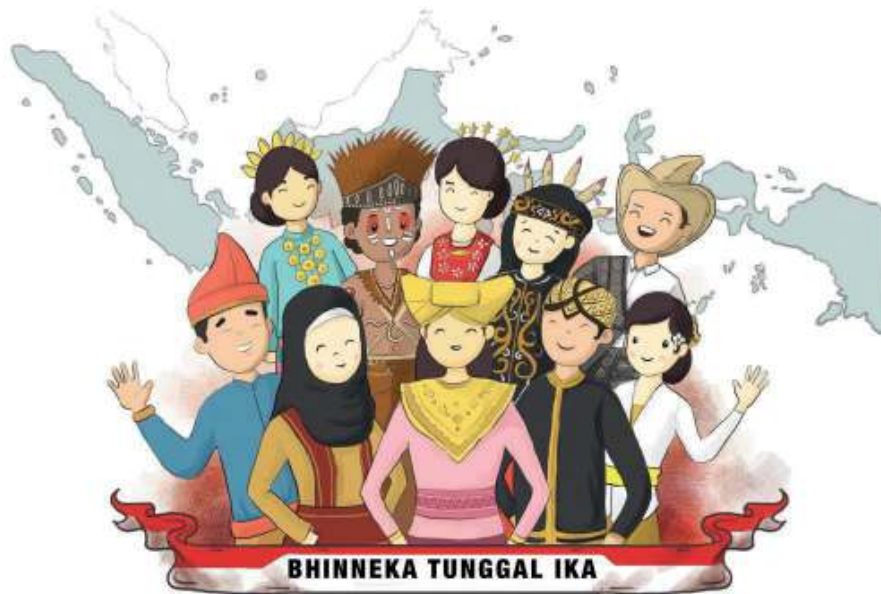
1. menganalisis makna persatuan dan kesatuan bangsa melalui fenomena-fenomena yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari;
2. mendemonstrasikan prinsip-prinsip penting persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari;
3. mengembangkan sikap keteladanan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui contoh-contoh yang diberikan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.



Pengantar

Dalam aktivitas keseharian, apakah kalian pernah melihat lidi yang tercecer? Apa yang kalian dapat lakukan dengan lidi yang tercecer, apakah dapat berguna untuk kegiatan keseharian manusia? Ya, kalian pasti tahu jawabannya bahwa lidi-lidi tersebut dapat digunakan apabila telah dikat oleh tali atau sebagainya. Begitu juga dengan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam agama, suku, ras, bahasa, adat isitiadat, dan budaya. Untuk menyatukan semua perbedaan tersebut memerlukan kesepakatan mengenai “nilai inti” sebagai pegangan bersama. Nilai inti yang menjadi pegangan bersama inilah yang dikenal sebagai Pancasila. Pancasila adalah ikatan yang menjadikan bersatu dan berfungsi menyatukan perbedaan.

Memahami, mengamalkan, dan menampilkan makna dan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan merupakan kewajiban seluruh warga negara termasuk kalian sebagai pelajar. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu memahami makna persatuan dan kesatuan untuk kemudian dilakukan dan ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena rasa kebangsaan yang tercermin dalam perilaku persatuan dan kesatuan merupakan ekspresi rasa syukur kita kepada Sang Pencipta yang menciptakan perbedaan. Ekspresi syukur tersebut kita wujudkan dengan menjunjung tinggi kesetaraan dan kemuliaan manusia, dengan mengembangkan sikap positif terhadap kemajemukan bangsa demi terwujudnya negara yang kokoh baik sekarang maupun di masa mendatang di mana hal itu selaras dengan semboyannya “Bhinneka Tunggal Ika”.



Gambar 3.1 Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui upaya mewujudkan kehidupan yang tentram, damai, harmonis, dan bersahaja dalam bingkai “Bhinneka Tunggal Ika”

Nah, sekarang perhatikan gambar di atas. Apa yang kalian pikirkan mengenai gambar di atas? Tentu ketenteraman, kedamaian, keharmonisan, dan kebersahajaan dalam kerukunan yang terbentuk dari upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Apa arti persatuan dan kesatuan itu bagi kalian? Mengapa kita harus bersatu? Sebelum pertanyaan ini dijawab, bacalah terlebih dahulu uraian berikut tentang beberapa contoh praktik pengamalan Pancasila yang terkait dengan persatuan dan kesatuan. Dari cerita tersebut, kalian diharapkan dapat menemukan keteladanan untuk kemudian diamalkan dan ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari.



Praktik Pengamalan Pancasila

1. Praktik Bersatu Menanggulangi Bencana

Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki Forum Anak Nasional yang terdiri dari berbagai kelompok anak dari seluruh provinsi di Indonesia? Anggota forum anak ini adalah anak-anak usia sekolah dasar, menengah pertama dan atas/ sederajat dengan berbagai latar belakang agama, suku- suku bangsa di Indonesia. Forum anak ini berada di bawah binaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan forum ini banyak yang bersifat sosial dan melibatkan banyak pihak. Seperti perlombaan, kongres, sosialisasi, peringatan Hari Anak, hingga penggalangan donasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama menyimak salah satu kegiatan forum anak dari daerah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan bernama Forum Anak Colliq Pujie dalam kutipan berita berikut.

Penguatan Kapasitas Forum Anak Colliq Pujie

Halo anak Indonesia! Halo anak Baru! Kembali lagi berjumpa dengan Forum Anak Colliq Pujie Kabupaten Barru. Kali ini, Forum Anak Colliq Pujie melakukan kegiatan penggalangan donasi untuk para korban gempa di Sulawesi Barat. Kegiatan ini wujud kerja sama antara Forum GenRe Lanakka Kabupaten Barru serta Forum Anak se-Kabupaten Barru mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan. Penggalangan dana ini kami lakukan selama 5 hari, mulai hari Senin, 18 Januari 2021 dan terus berlangsung hingga hari Jumat, 22 Januari 2021. Kegiatan ini secara serentak dilakukan di seluruh desa maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Barru. Seluruh hasil donasi yang terkumpul akan dibawa pada hari Sabtu, 23 Januari

2021 dan diserahkan kepada para korban bencana gempa bumi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Penyerahan donasi langsung diserahkan kepada Plt. (Pelaksana Tugas) Bupati Kabupaten Majene untuk diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Majene. Dari situ, seluruh donasi yang terkumpul kemudian didistribusikan kepada para korban gempa. Respon dari Plt. Bupati Majene terhadap kegiatan ini sangat baik. Beliau selaku penerima bantuan, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Barru yang telah berdonasi. Beliau tidak menyangka bahwa anak-anak bisa bergerak hingga mampu mengumpulkan Rp 66.100.000.

Kami dari Forum Anak Colliq Pujie mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam penggalangan donasi ini.

Sumber: <https://forumanak.id>

Kegiatan di atas telah menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Bencana alam yang tidak terduga mengakibatkan banyak orang menjadi korban. Peristiwa ini menggerakkan anak-anak muda dalam forum anak tersebut untuk mengumpulkan donasi dari masyarakat untuk kemudian diserahkan kepada para korban. Adanya rasa empati dan simpati, tingginya rasa peduli dan eratnya kebersamaan membuat proses penggalangan donasi berjalan dengan sangat baik. Selain itu, adanya kerja sama antara seluruh forum dari tingkat desa hingga kecamatan, berhasil membuktikan bahwa persatuan dan kesatuan yang dijaga dan dirawat dengan baik akan mampu mewujudkan tujuan bersama.

2. Praktik Bersatu dalam Perayaan HUT RI

Setiap tanggal 17 Agustus, kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Detik-detik Proklamasi yang dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih menjadi acara yang dinantikan masyarakat Indonesia. Setelah melaksanakan upacara di sekolah maupun di kantor, rasanya ingin segera mengikuti prosesi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara melalui tayangan di televisi. Kerapian dan kekompakan para peserta upacara selalu menarik perhatian, khususnya pada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau yang kita kenal dengan sebutan Paskibraka. Mari kita cermati bersama bacaan di bawah ini sebagai contoh praktik pengamalan Pancasila yang terkait dengan makna persatuan dan kesatuan bangsa.

Paskibraka: Keberagaman dalam Merah Putih

Sebanyak 68 pelajar yang mewakili 34 provinsi di Indonesia telah dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Kamis, 15 Agustus 2019. Seluruh anggota tersebut selanjutnya akan dibagi ke dalam dua tim yang bertugas pada upacara pada hari ini, 17 Agustus 2019, di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

Keterwakilan seluruh provinsi dalam keanggotaan Paskibraka Nasional tersebut mencerminkan persatuan bangsa di tengah keberagaman yang memperkaya Indonesia. Meski datang dari latar belakang dan budaya yang mungkin berbeda, mereka tetap mengusung tujuan yang sama di bawah kibaran Merah Putih.

Seluruh anggota Paskibraka tersebut telah melalui proses seleksi yang ketat mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi, untuk selanjutnya terpilih ke dalam anggota Paskibraka Nasional. Mereka

telah menjalani serangkaian pelatihan dan dibekali kemampuan khusus sebelum menjalankan tugas. Pelatihan yang dijalani tersebut menjadikan seluruh anggota Paskibraka siap untuk ditempatkan dalam posisi manapun. Dengan itu, dapat dipastikan bahwa tim dan anggota manapun yang nantinya ditunjuk untuk bertugas memiliki mental yang tangguh dan kemahiran untuk dapat melaksanakan tugasnya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.



Gambar 3.2 Barisan Paskibraka Nasional

Sumber: Kabardamai.id/Antara

Sumber: <https://www.presidenri.go.id>

Praktik di atas memperjelas makna dari persatuan dan kesatuan. Seluruh anak muda memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya melalui semangat persatuan dan kesatuan. Perwakilan putra dan putri daerah yang diambil dari 34 provinsi di Indonesia, kemudian disatukan dalam suatu kelompok bernama Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Di sini tidak lagi ada yang memperlmasalahkan dari mana asal mereka, apa agama atau keyakinannya, bagaimana budayanya, apa warna kulitnya. Mereka semua bersatu untuk tujuan yang sama yakni memberikan persembahan terbaik bagi bangsa Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahap demi tahap pemilihan dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional dilakukan dengan persaingan yang sehat dan jujur.



Materi Pokok

A. Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia

Pernahkah kalian memikirkan kenapa Indonesia dapat dijajah dalam waktu yang begitu lama oleh bangsa asing? Tepat sekali, salah satu alasannya karena perjuangan yang dilakukan untuk mengusir penjajah dilakukan secara terpisah, tidak terkoordinasi, dan bersifat kedaerahan. Gambaran tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa perjuangan yang dilakukan dengan sendiri-sendiri, tidak terencana, dan bersifat lokal akan sulit mencapai tujuan. Oleh sebab itu, kita harus bersatu. Perbedaan yang ada tidak boleh membuat kita menjauh tetapi seharusnya membuat kita semakin dekat dan bekerja sama untuk tercapainya cita-cita. Hal ini terbukti dalam sejarah ketika para pemuda yang berpendidikan sudah memahami arti penting persatuan dan kesatuan, mereka menyusun rencana dan merangkul berbagai kalangan untuk bersama-sama berjuang dan pada akhirnya Indonesia mampu menjadi negara merdeka. Lalu, apa sebenarnya arti persatuan dan kesatuan itu sendiri? Apa makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa? Berikut penjelasannya.

Persatuan dan kesatuan memiliki arti yang berbeda, namun kedua kata tersebut sama-sama berasal dari sebuah kata dasar yaitu "satu". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persatuan berarti gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) beberapa bagian yang sudah bersatu, sedangkan kesatuan berarti sifat tunggal atau keutuhan. Maka persatuan dimaksud sebagai proses bersatunya berbagai perbedaan, sementara kesatuan adalah wujud dari sebuah persatuan.

Terdapat tiga cara yang dapat ditempuh untuk mengupayakan persatuan bangsa pada negara yang majemuk. *Pertama*, jalan moral, yakni adanya etika atau moral sosial untuk saling menghormati identitas, harga diri, dan perasaan masing-masing. Setiap individu maupun



Gambar 3.3 Belajar persatuan dan kesatuan dari tubuh yang terdiri dari beragam bagian yang berbeda, tetapi apabila salah satu bagian mengalami sakit, maka bagian tubuh yang lain akan berupaya untuk meminimalisir rasa sakit tersebut.

kelompok harus saling memperlakukan satu sama lain sebagai orang yang memiliki harga diri sebagaimana dirinya sendiri yang mau dihargai orang lain. Melecehkan, menyepelekan, menomorduakan golongan lain karena perbedaan suku, ras, agama maupun kepercayaan tertentu adalah perlakuan yang tidak terpuji dan tidak patut dilakukan.

Kedua, jalan kesadaran sosial, yaitu upaya untuk menyadari bahwa persatuan merupakan kebutuhan. Persatuan adalah kebutuhan bagi bangsa Indonesia yang memang terdiri dari beragam macam anggota dengan suku bangsa, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Maka dari itu, kebutuhan untuk bersatu menjadi penentu persatuan. Selain itu, persatuan juga dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Apa cita-cita itu? jika dilihat dari Pembukaan UUD NRI 1945, jawabannya yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila.

Ketiga, jalan konstitusi atau hukum. Perlu kalian pahami bahwa bangsa dalam konteks ke-Indonesia-an sejak awal adalah bangsa yang hadir karena memiliki keinginan yang sama untuk mendirikan sebuah negara dan pemerintahan. Karena itu, negara dan pemerintahan yang didirikan perlu diatur oleh hukum dan konstitusi. Artinya, setiap orang atau kelompok yang menjadi warga negara dikendalikan oleh aturan yang sama, yakni hukum negara. Di sinilah persatuan dapat diusahakan melalui penegakan hukum dan konstitusi.

Persatuan Indonesia bukanlah sesuatu yang ada dan diberikan begitu saja; bukan pula sesuatu yang mudah disatukan dalam satu kategori kesamaan. Persatuan Indonesia akan teguh apabila setiap golongan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing yang dijamin keberadaannya dalam konstitusi dan undang-undang. Tidak ada yang merasa lebih istimewa, saling memahami kebutuhan khususnya, menghargai kelebihan yang lain, memiliki empati pada kekurangan yang lain, saling menghormati identitas serta berbagai perbedaan yang ada. Dengan demikian, kita akan mendapat hasil berupa kesetiakawanan, persaudaraan, dan jalinan rasa senasib sepenanggungan. Mengapa persatuan sangat penting bagi Indonesia? Hal ini dikarenakan beberapa alasan penting sebagai berikut:

1. Menjalin rasa kebersamaan

Kita kuat karena bersatu seperti halnya satu helai lidi yang hanya dapat digunakan untuk menusuk daun dan melukai yang lain. Jika antara lidi yang satu dengan lidi lainnya disatukan akan membentuk sapu yang dapat digunakan untuk membersihkan kotoran. Ini membuktikan bahwa persatuan dan kesatuan akan memberikan manfaat lebih banyak dibanding sendiri tanpa melibatkan yang lain. Sama halnya dengan memikul beban. Beban yang dipikul bersama tentu lebih ringan rasanya dibanding dengan beban yang dipikul sendiri. Maksudnya bahwa kehidupan ini harus menitikberatkan rasa kebersamaan bukan rasa perbedaan, sehingga yang akan muncul adalah perasaan untuk saling melengkapi dan memperkokoh satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pepatah, “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”.

2. Mempermudah Segala Urusan

Kemampuan kita untuk menyatukan perbedaan menjadi kekuatan akan mampu menjadikan bangsa ini sebagai negara yang dapat menciptakan keharmonisan. Keharmonisan tersebut dapat tercipta karena manusia-manusia yang ada di dalamnya mampu mewujudkan rasa kemanusiaan yang sejak lahir memang diciptakan berbeda. Mampu menekan rasa perbedaan itu dan menjunjung tinggi rasa persamaan untuk mencapai asa negaranya. Dalam lingkungan yang harmonis seperti itu, manusianya hidup penuh dengan rasa toleransi yang tinggi. Mereka tidak membiarkan sesuatu yang berbeda dengan ketidakpedulian namun mampu menghargai perbedaan sebagai suatu keniscayaan selayaknya jari yang ada pada tubuhnya, berbeda tetapi indah dan tidak pernah saling menyalahkan namun saling merasakan satu sama lain. Apabila terdapat jari yang luka, maka jari yang lain akan merasakan kesakitan tersebut dan berupaya untuk mengurangi rasa sakitnya. Hal ini sama seperti pepatah “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”.

3. Mewujudkan Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”

Indonesia memiliki beragam bahasa, budaya, adat istiadat serta keyakinan agama yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah menjadi penghalang untuk bersatu, tetapi menjadi alasan mendasar untuk bersatu. Terbentuknya NKRI pun tidak terlepas dari perjuangan panjang bersatunya masyarakat Indonesia kala itu. Mereka berasal dari berbagai daerah dan latar belakang budaya berbeda berjuang untuk mencapai tujuan bersama yakni merdeka.

Tugas kita saat ini adalah menjunjung tinggi Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika dengan menjaga persatuan dan kesatuan yang telah terwujud dengan baik. Kita tidak memandang perbedaan sebagai suatu penghalang tetapi sebagai keistimewaan sebagai bangsa yang besar yang hidup dengan kesadaran untuk saling menghargai dan saling menghormati.

4. Menumbuhkembangkan Nasionalisme

Nasionalisme Indonesia berdiri di atas kemajemukan yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Nasionalisme Indonesia juga bukan nasionalisme yang mengandung paham *chauvinisme*. Dengan demikian, selain menghargai keberadaan bangsa-bangsa lain di dunia, nasionalisme Indonesia juga dibangun untuk selalu menggelorakan semangat kebangsaan agar suku-suku bangsa saling menghargai antarsesama dan siap berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Heywood, *Chauvinisme* adalah satu paham yang menganggap bahwa kelompok seseorang lebih tinggi, lebih kuat dibanding dengan kelompok lain. Salah satu bentuknya adalah sikap nasionalisme atau kebangsaan yang ekstrem dengan menganggap derajat bangsa sendiri lebih tinggi dibanding bangsa lain.

Berbicara tentang persatuan dan kesatuan, biasanya didasari oleh persamaan nasib, budaya, pandangan hidup, kebutuhan bersama, dan tujuan yang ingin diraih. Dasar tersebut menjadi landasan dan pemersatu interaksi manusia dengan manusia seperti dalam forum, komunitas bangsa-bangsa, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sadarkah kalian bahwa ada pula wujud persatuan dan kesatuan antara orang dengan tempat? Bagaimana bisa demikian?



Gambar 3.4 Menumbuhkembangkan semangat nasionalisme melalui menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga kelestarian alam sebagai ciptaan Tuhan.

Kita hidup berdampingan dengan alam. Seperti yang kita ketahui, alam Indonesia begitu luar biasa. Alam Indonesia seperti lukisan Tuhan yang sangat indah. Kita sebagai penghuni di dalamnya diminta untuk menjaga dan melestarikannya, melalui perbuatan-perbuatan yang mencerminkan perasaan cinta kepada tanah air. Ini tentu diperlukan mengingat alam merupakan ciptaan Tuhan yang patut dijaga kelestariannya. Kerusakan alam, sudah pasti akan menciptakan kerusakan hidup bagi manusia.

Tidak semua orang mampu mewujudkan perasaan cinta terhadap tanah air. Selalu saja ada individu, kelompok, bahkan bangsa lain yang berupaya untuk mengganggu, merusak, bahkan merebut kekayaan yang ada didalamnya. Oleh sebab itu, kita memerlukan kekuatan untuk menjaganya, dengan cara membangun persatuan dan kesatuan agar tanah air tetap terjaga dan lestari.

Berikut beberapa hal mendasar atau prinsip yang perlu kalian pahami dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

B. Prinsip Persatuan dan Kesatuan

Keberagaman yang hidup di Indonesia harus dijaga sebagai khasanah kekayaan bangsa. Generasi muda merupakan harapan bangsa dan pemegang estafet kepemimpinan. Generasi muda memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga khasanah kekayaan tersebut. Oleh sebab itu, mereka harus mampu menghormati perbedaan, melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika, dan memiliki wawasan yang luas agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga dan bertambah kuat. Dalam hal ini, terdapat tiga prinsip utama yang dapat kita tanamkan pada diri sendiri dan seluruh bangsa tentang persatuan dan kesatuan, yaitu:

1. Memahami Perbedaan dalam Masyarakat sebagai Wujud Bhinneka Tunggal Ika

Indonesia terbentuk atas semangat kebangsaan dari suku-suku yang ada. Setiap suku sebagai unsur pembentuk Indonesia pasti memiliki perbedaan berdasarkan ras, etnik, agama, sejarah, dan budaya. Perbedaan juga pasti kita temukan pada lingkup terkecil dan terdekat yakni keluarga. Mulai dari perbedaan selera makanan, warna kesukaan, hingga pendapat pun mungkin ada. Kenyataan tersebut menuntut kita untuk, dengan penuh kesadaran, bersedia memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Misalnya di dalam keluarga, ayah merupakan sosok yang lebih pendiam sedangkan ibu banyak memberikan masukan terhadap suatu topik pembicaraan. Maka sikap kita dalam memahami watak ayah bisa dengan mengajaknya berbicara santai, sedangkan pada ibu kita bisa lebih banyak mendengarkan. Inilah salah satu wujud kemampuan untuk

melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika dalam keluarga. Meskipun memiliki perbedaan karakter dalam keluarga tetapi tujuannya satu yaitu keluarga yang harmonis.

2. Kebebasan yang Bertanggung Jawab

Menghargai diri sendiri itu harus sebagai makhluk individu, tetapi memiliki keyakinan bahwa diri sendiri dan budaya sendiri adalah yang terbaik tidak perlu dikembangkan. Hal itu dikarenakan, sebagai makhluk sosial, kita akan terus hidup berdampingan dan akan selalu ada dalam lingkungan yang memiliki perbedaan. Oleh sebab itu, meskipun manusia memiliki kebebasan dalam lingkup individu dan sosial tetapi dirinya harus mampu menerima, menyesuaikan, menghargai, dan mengapresiasi perbedaan sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial. Sekalipun harus dihadapkan pada suasana kompetisi dan muncul sebagai pemenang, kita harus tetap bisa mengapresiasi lawan yang kalah. Sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh bersikap jemawa dengan merasa diri kita adalah yang terbaik. Apresiasi, sekecil apapun, harus bisa diberikan kepada orang lain sebagai bentuk penghargaan kita terhadap diri mereka.

3. Cinta Tanah Air yang Dilandasi Rasa Nasionalisme dan Wawasan Nusantara

Sebagai wujud keberlanjutan dari persatuan dan kesatuan antara orang dan tempat, kita diharapkan tidak hanya bisa menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan dengan sesama manusia, tetapi juga terhadap alam. Kita harus menyadari bahwa tanah dan air adalah tempat yang telah disiapkan Tuhan untuk memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena itu, rasa cinta tanah air dapat diwujudkan salah satunya dengan menjaga kelestarian alam dengan melakukan pengelolaan kenampakan alam daratan atau air dengan bijak.

C. Sikap-Sikap Mendukung Persatuan dan Kesatuan

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat terwujud apabila warganya memiliki prinsip-prinsip sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya. Prinsip-prinsip tersebut harus terus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh yang dapat kita lakukan demi mewujudkan persatuan dan kesatuan tersebut.

1. Meyakini Pentingnya Perbedaan

Kita bersatu bukan berarti saling mematikan yang berbeda. Akan tetapi, kita bersatu atas kesadaran bahwa perbedaan itu penting, karena dengan adanya perbedaan akan lahir saling pengertian. Contohnya Sumpah Pemuda. Isi naskah Sumpah Pemuda menggambarkan semangat para pemuda dari berbagai daerah untuk bersatu, *“Pertama: Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga: Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”* Ikrar ini tentu bukan hanya ditujukan kepada para pemuda, melainkan seluruh bangsa Indonesia, sejak itu sampai dengan selama-lamanya.

2. Menyadari Tujuan Bersama

Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan keberagaman di Indonesia yang harus dijaga dengan persatuan dan kesatuan. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, persatuan dan kesatuan terbentuk karena adanya kesamaan tujuan. Contoh, adanya komunitas pelajar berbagi. Komunitas tersebut berisi pelajar-pelajar dari berbagai sekolah dan daerah yang memiliki tujuan bersama yakni berbagi kepada masyarakat yang kurang sejahtera. Upaya ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak terlepas dari rasa persatuan dan kesatuan.

3. Memahami Kodrat sebagai Makhluk Sosial

Hidup bermasyarakat berarti ada interaksi atau hubungan antar- individu dan adanya sikap saling tolong menolong dalam berbagai hal. Kondisi ini menggambarkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan menjadi dasar yang kuat dalam menjalin hubungan baik antar-sesama sebagai makhluk sosial. Ketika kita memiliki makanan yang berlebih, tidak ada salahnya berbagi dengan tetangga. Hal kecil ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan sebab memupuk tali persaudaraan. Contoh lain adalah jika ada salah satu anggota warga yang sedang melakukan selamatan seperti pernikahan, maka warga perempuan biasanya membantu urusan dapur dan warga laki- laki membantu urusan tempat. Bukankah yang demikian terasa indah?

D. Sikap-Sikap Anti Persatuan dan Kesatuan

Upaya persatuan dan kesatuan bisa saja tidak terlaksana dengan baik jika masih ada yang memunculkan sikap penolakan atau anti terhadapnya. Oleh karena itu, kalian tentu harus selalu menghindarinya. Berikut ini disampaikan beberapa sikap yang dapat digolongkan sebagai sikap yang anti terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia.

1. Menganggap Rendah Orang atau Kelompok Lain

Memiliki rasa “paling” dalam diri harus dihindari sebab akan menimbulkan anggapan bahwa orang atau kelompok lain lebih rendah dan tidak sebanding dengan dirinya. Seseorang yang memiliki sikap dan pemikiran demikian akan merasa dirinya “paling bisa” sehingga tidak membutuhkan orang lain. Hal ini bertolak belakang dengan kodrat kita sebagai makhluk sosial. Contoh, seseorang yang tidak pernah mau terlibat dalam kegiatan di kampungnya dan tidak pernah bertegur sapa karena menganggap diri

punya segalanya dan bisa melakukan semua sendiri. Jika terus menerus dibiarkan, ia pasti akan mendapatkan sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat. Jika suatu saat memerlukan bantuan, mungkin saja tidak akan ada orang yang mau membantu.

2. Hilangnya Kepedulian Terhadap Sesama

Sikap individualis yang terlalu dominan dapat mengancam rasa kepedulian seseorang terhadap sesama. Hal ini juga bertolak belakang dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Apabila seseorang telah kehilangan rasa peduli terhadap sesama, maka hilang pula prinsip nasionalisme yang seharusnya terbangun di dalam diri. Faktor ini tentu dapat mengancam keberadaan persatuan dan kesatuan. Contoh, jika ada salah satu teman di kelas sudah beberapa hari tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tidak berpengaruh terhadap aktivitas belajar, apakah kita akan mengabaikannya? Kita bisa saja merasa tidak peduli untuk mencari tahu keadaan yang membuatnya tidak hadir. Bukankah kehadiran atau ketidakhadirannya tidak mengganggu? Untuk apa kita mencari tahu sebab ketidakhadirannya? Sikap yang sedemikian itu sebaiknya perlu dihilangkan karena pertemanan dan persaudaraan tumbuh dengan perhatian dan kepedulian.

3. Melemahnya Budaya Kebersamaan

Ketika seseorang sudah merasa dirinya bisa melakukan segalanya dan tidak peduli lagi dengan sesama, maka kebersamaan yang identik dengan persatuan dan kesatuan pada dirinya akan melemah. Sikap cuek, acuh, dan tidak peduli akan merajalela dalam diri orang ini. Tidak ada lagi rasa kesamaan nasib yang mendasari kebersamaan. Pengaruh kemajuan zaman dapat menjadi salah satu pemicu melemahnya

budaya kebersamaan. Banyak orang pada saat ini yang meski hidup di lingkungan masyarakat, tetapi seperti hidup sendiri. Biasanya mereka merasa harus memiliki standar tertentu untuk berteman dengan orang lain. Pertemanan hanya dilakukan di dalam kelompoknya saja, tetapi tidak dengan kelompok lain yang majemuk.



Refleksi

Berdasar praktik serta uraian materi yang sudah tertulis di atas, terdapat beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama dalam memaknai persatuan dan kesatuan bagi bangsa. Terkait dengan hal tersebut, tentu banyak dampak baik yang muncul apabila kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan

1. Hidup menjadi tenteram dan damai

Apakah kalian akan merasa tenteram dan damai jika hidup dalam kebersamaan? Tinggal dalam lingkungan masyarakat menyadarkan kita bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Rasa saling membutuhkan itulah yang membentuk rasa kebersamaan. Jika segala sesuatu dilaksanakan secara bersama tanpa membedakan, maka hidup akan terasa tenteram dan damai.

2. Perbedaan bukan suatu penghalang untuk hidup penuh dengan kerukunan

Perbedaan tidak menjadi pembatas untuk melakukan suatu kebaikan. Jika seluruh bangsa Indonesia menyadari rasa kepedulian dan kesamaan nasibnya, tidak akan ada lagi yang melihat latar belakang perbedaan. Semuanya bersama-sama saling membantu sesuai dengan kemampuan.

3. Menjadi lebih bahagia, dewasa, dan bijaksana

Tidak menjadikan perbedaan sebagai suatu alasan untuk berbuat baik akan menumbuhkan rasa bahagia. Apabila kita telah mampu memaknai hal ini, itu tanda dari adanya kedewasaan dalam diri kita. Dengan demikian, segala sikap yang kita munculkan akan menjadi bijaksana.

Setelah membaca dan memahami materi serta praktiknya, menurutmu apa yang kalian rasakan setelah dapat memaknai itu semua? Sampaikan pendapat kalian kepada bapak atau ibu guru serta teman-teman di kelasmu.

BAB IV

Wawasan Kebinekaan



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami serta melakukan aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam bab ini, kalian diharapkan dapat:

1. menjelaskan asal-usul Bhinneka Tunggal Ika melalui bait kakawin Sutasoma dan praktik kebinekaan yang dimunculkan dalam kehidupan masyarakat nusantara masa lalu;
2. menganalisis makna wawasan kebinekaan melalui konsep pluralisme dan multikulturalisme yang harus dikelola dengan komitmen dan aturan main yang adil dan tegas;
3. mengembangkan perilaku kebinekaan berdasarkan Pancasila dalam hidup bermasyarakat sehari-hari melalui contoh-contoh keteladanan yang diberikan.



Pengantar

Pluralitas atau kemajemukan Indonesia merupakan kenyataan sosial yang tidak terbantahkan lagi. Indonesia sejak awal merupakan gabungan dari berbagai macam perbedaan, mulai dari perbedaan suku, adat, etnis, budaya, bahasa, agama, dan karakteristik penduduknya. Hal ini terjadi kondisi negara Indonesia yang berupa kepulauan (*archipelago*). Sebelum resmi menyandang nama “Indonesia”, kepulauan terbesar di dunia ini dikenal dengan nama “Nusantara”, yang terdiri atas dua kata yang diadopsi dari bahasa Jawa kuno “Nusa” berarti “pulau” dan “antara” yang berarti “di luar” atau “di antara”. Kondisi yang terpisah-pisah antar pulau ini menjadikan perbedaan-perbedaan dalam segala bidang. Namun, bangsa kita memiliki pengamalan sejarah yang membuktikan bahwa kemajemukan dan keberagaman ini tidak menjadi penghalang bagi adanya kehidupan yang harmonis dan toleran.

Nusantara sejak zaman purba merupakan persilangan dua benua dan dua samudera. Kondisi ini menjadikan Nusantara sebagai tempat bertemunya banyak bangsa, budaya, pola pikir, kebiasaan dan agama melalui migrasi, perdagangan, dan pendidikan. Nenek moyang kita sudah terbiasa untuk menerima perbedaan secara toleran tanpa kehilangan jati diri. Bahkan, mereka mampu mengambil nilai-nilai dan praktik-praktik yang baik untuk memperkuat jati diri tersebut.

Masa Hindu-Buddha menjadi era kejayaan Nusantara. Peninggalan-peninggalan, baik yang berupa artefak fisik maupun nilai-nilai luhur, masih bertahan hingga sekarang dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari identitas bangsa. Salah satu peninggalan masa ini berupa nilai luhur yakni kesadaran akan perbedaan, kemajemukan (pluralitas), dan keberagaman (multikulturalitas).

Dari Kerajaan Majapahit, kita memperoleh catatan bahwa bangsa ini sejak dahulu dikelola dengan kesadaran dan wawasan kemajemukan atau wawasan kebinekaan. Cendekiawan terkenal dari masa Majapahit (abad-14), Mpu Tantular, pernah menuliskan sejumlah bait kakawin (metode pembelajaran moral dan religi dalam bentuk syair) yang mengajarkan wawasan tersebut. Kakawin yang terkenal dari Mpu Tantular adalah Sutasoma yang menjadi inspirasi kehidupan yang toleran dari umat Hindu-Siwa dan Buddha pada waktu itu. Bait terkenal dari Sutasoma inilah yang menjadi motto bangsa yang kemudian lahir melalui Proklamasi 17 Agustus 1945.



Gambar 4.1 Suasana multikulturalisme di ibu kota Majapahit.

Sumber: <https://nationalgeographic.grid.id>

Nenek moyang kita sudah sangat memahami bahwa perbedaan adalah hal yang tidak dapat disangkal. Sekalipun kita berbeda-beda, namun tujuan kita adalah sama, yaitu pada kebenaran. Hanya cara atau metodenya saja yang berbeda. Itulah kita, bangsa yang bineka namun ingin manunggal menjadi satu karena menyadari bahwa kemajemukan adalah kenyataan hidup yang harus diterima.

Sutasoma merupakan satu kakawin ternama karangan Mpu Tantular yang menjadi inspirasi kehidupan toleran umat Hindu dan Buddha pada waktu itu. Bait lengkap dari Sutasoma tersebut berbunyi "*Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*". Apabila diterjemahkan, bait itu menjadi "Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran." Melalui pemaknaan bahasa yang lebih modern, bait itu dipahami sebagai "berbeda-beda, namun tetap satu".

Hal-hal semacam itu tentu tidak boleh hanya menjadi sekedar makna dibalik Semboyan Negara "*Bhinneka Tunggal Ika*". Ia mesti disadari dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain dijadikan inspirasi dalam pembentukan sebuah negara bangsa bernama Indonesia, semangat yang ada di balik semboyan tersebut harus selalu difungsikan menjadi tuntunan hidup seluruh elemen bangsa, termasuk kalian sebagai generasi penerus.



Praktik Pengamalan Pancasila

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mendambakan keharmonisan dan mampu hidup toleran dengan siapa pun. Namun di masa sekarang ini, perlahan kondisi ini tergerus oleh karena beragam sebab. Konflik berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, Antar-

Golongan) pernah menjadi catatan buruk pada era Reformasi. Contohnya, kekerasan yang dialami oleh saudara-saudara etnik Tionghoa di tahun 1998, konflik Ambon 1999 (Islam dan Kristen), tragedi Sampit (Dayak dan Madura), dan lain-lain. Kenyataan pahit ini menjadi suatu pelajaran amat mahal yang menguji kerukunan dan keharmonisan bangsa kita. Akan tetapi, upaya-upaya untuk menjaga keharmonisan tersebut tidak pernah berhenti dan tidak boleh berhenti dilakukan.

Salah satu contoh mengenai kerukunan beragama yang dilandasi wawasan kebinekaan dapat disimak dalam kisah mengenai Kampung Sawah, Jati Murni, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah menjadikan Kampung Sawah sebagai salah satu kawasan percontohan kerukunan umat beragama. Karena di wilayah itu, puluhan ribu umat Islam dan Kristiani serta agama lain hidup berdampingan, rukun dan saling menghargai satu sama lain. Warga yang berada di Kampung Sawah selalu menganggap satu dengan lainnya adalah saudara sehingga tidak perlu memandang perbedaan agamanya. Agama menurut mereka merupakan urusan pribadi masing-masing.

Toleransi di Kampung Sawah

Kumandang azan Dzuhur di Masjid Agung Al Jauhar Yasfi mengiringi suara lonceng dari Gereja Santos Servatius Kampung Sawah, Jati Murni, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Di kampung ini, puluhan ribu umat Islam dan Kristiani serta agama lain hidup berdampingan, rukun dan saling menghargai satu sama lainnya.

Di kampung Sawah, Gereja Katolik Servatius, Gereja Kristen Pasundan dan Masjid Agung Al Jauhar Yasfi berdiri berdampingan membentuk segitiga emas. Letak tempat ibadah yang saling berdekatan itu tidak hanya menjadi bukti keberagaman tetapi juga bentuk toleransi yang tinggi. Tidak pernah ada gesekan antarumat beragama di tempat ini. Mereka sangat menghargai, menghormati satu sama lain termasuk ketika menjalankan ibadah.

Salah satu contohnya ketika hari Minggu (24/12) di mana umat Kristiani beribadah, kegiatan seperti pengajian yang ada di Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi dilakukan tanpa menggunakan pengeras suara. Hal itu menurut Wakil Ketua Dewan Paroki Mathius Nalih Ungin dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada umat Kristiani untuk beribadah.

Tidak ada pembahasan mengenai agama di kampung ini ketika bersilaturahmi maupun berdialog. Pertemuan antartokoh lintas agama di Kampung Sawah secara rutin dilakukan tetapi hal ini pun juga tidak membahas mengenai persoalan agama. Mereka hanya membahas mengenai soal kehidupan masyarakat di wilayah itu dan juga budaya setempat.

Saat toleransi menjadi bahan perdebatan antarkelompok di Indonesia, warga Kampung Sawah, Jati Murni, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat justru menunjukkan wajah toleransi dan keberagaman. Tak heran, jika Pemerintah menjadikan Kampung Sawah sebagai salah satu kawasan percontohan kerukunan umat beragama.

Sumber: <https://www.voaindonesia.com>

Warga Kampung Sawah menjadi contoh nyata kemajemukan warga yang mampu hidup berdampingan secara harmonis dan toleran. Dari contoh tersebut, dapat kita amati beberapa nilai penting terkait wawasan kebinekaan yang dapat kita praktikkan untuk menjaga keharmonisan dan persatuan kesatuan di dalam masyarakat yang majemuk.

Namun agar lebih dapat memahami wawasan kebinekaan tersebut, pada subbab berikutnya kalian akan mempelajari sejumlah konsep penting dalam kebinekaan. Sebelum memasukinya, kalian harus menyadari dulu bahwa kebinekaan bukan sekadar sesuatu yang harus dipahami melainkan juga harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh sebab itu, wawasan kebinekaan bukan hanya sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui informasi, tetapi harus menjadi cara berpikir dan berperilaku bangsa kita dalam kehidupan sehari-hari.



Materi Pokok

A. Pengertian Wawasan Kebinekaan

Cita-cita para Pendiri Bangsa dapat diwujudkan melalui berbagai macam cara. Namun, cara yang paling utama dan mendasar adalah memiliki wawasan tentang kemajemukan dan keberagaman (wawasan kebinekaan). Pengertian Wawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (1) “hasil mewawas; tinjauan; pandangan”, dan (2) “konsepsi; cara pandang”. Wawasan berarti memiliki kesadaran yang menjadi cara pandang atau cara kita melihat dunia sekitar kita. Wawasan kebinekaan berarti menyadari bahwa kita harus mampu melihat perbedaan sebagai sesuatu yang biasa dalam lingkungan yang majemuk/plural/multikultural. Perbedaan sebagai bagian dari penghormatan terhadap kekuasaan Pencipta dan kebanggaan sebagai negara. Wawasan kebinekaan juga berarti menyadari bahwa perbedaan-perbedaan ini mengarahkan kita pada satu tujuan yang sama, yakni persatuan dan kesatuan.

Wawasan berarti memiliki kesadaran yang menjadi cara pandang atau cara kita melihat dunia sekitar kita. Wawasan kebinekaan berarti menyadari bahwa kita harus mampu melihat perbedaan sebagai sesuatu yang biasa, sekaligus menyadari bahwa perbedaan-perbedaan ini mengarah pada satu tujuan yang sama, yakni persatuan dan kesatuan.



Gambar 4.2 Belajar perbedaan dari jari manusia yang setiap bagian memiliki nama dan fungsi berbeda tetapi menjadi keindahan saat berada dalam satu kesatuan.

Sejarah perjuangan bangsa membuktikan bahwa berbagai macam kerja sama antar berbagai macam golongan merupakan awal dari sebuah cita-cita untuk merdeka dan bersatu. Nilai-nilai persatuan yang dicantumkan para Pendiri Bangsa dalam sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia", merupakan nilai-nilai yang memiliki kaitan dengan sila-sila yang lain. Persatuan yang dimaksud tersebut tentu saja merupakan persatuan yang didasari oleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama), kemanusiaan (sila kedua), kedaulatan rakyat serta musyawarah-mufakat (sila keempat) dan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima).

Sebelum membahas lebih jauh, kalian perlu menyadari terlebih dahulu bahwa sebelum mengenal agama-agama seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, nenek moyang kita sudah meyakini adanya suatu zat yang melampaui manusia, bahkan

mampu memengaruhi kehidupan manusia. Keyakinan ini terwujud dalam praktik-praktik animisme dan dinamisme yang menjadi dasar penghormatan dan pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelum datangnya agama Hindu dan Buddha, yang disusul oleh Islam, Katolik, Kristen, dan Khonghucu. Konsepsi mengenai ketuhanan dalam Pancasila memiliki semangat kesederajatan, yakni tanpa menyebut “Tuhan” dari agama tertentu secara khusus, melainkan mengambil konsepsi dasar kepercayaan atau kebutuhan berupa sifat-sifat Ketuhanan yang dapat ditemui di seluruh agama di Indonesia.

Melalui semangat kesederajatan semacam ini, semua agama tersebut datang dengan damai dan mampu diserap, diasimilasi, diakulturasi, dan diadaptasi oleh penduduk Nusantara untuk memperkuat sifat religius yang sudah melekat. Sifat welas asih dan damai dari manusia-manusia Nusantara inilah yang menjadikan semua agama dapat diterima dan hidup berdampingan secara harmonis. Ini adalah karakter bangsa kita.

Melaluinya, kita dapat bersatu dalam perbedaan secara harmonis. Kepercayaan tanpa sifat welas asih seperti yang dicontohkan oleh nenek moyang kita justru akan berbahaya bagi keutuhan dan persatuan. Oleh karena itu, umat beragama di Indonesia perlu menyadari bahwa tidak ada agama yang mengajarkan perpecahan dan kerusakan, melainkan selalu menuntun manusia untuk semakin manusiawi, baik dengan sesama manusia (horizontal) maupun dalam hubungannya dengan Sang Pencipta (vertikal). Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Sukarno dengan “Ketuhanan yang berkebudayaan”, yakni bahwa setiap pemeluk agama tidak boleh beragama secara egois, melainkan toleran dengan perbedaan, bantu-membantu dengan umat beragama lain dengan rukun.

“Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? ialah hormat–menghormati satu sama lain.”

Pidato Sukarno: Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945

Kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki bahasa, suku, adat-istiadat, budaya, serta agama yang sangat beraneka ragam merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Mengelola keberagaman dan kemajemukan ini bukan perkara mudah karena masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Bahkan tidak jarang, kepentingan-kepentingan itu saling bertentangan sehingga menimbulkan ketegangan atau bahkan konflik.

Di satu sisi, kemajemukan dan keberagaman dapat menjadi sesuatu yang memperkaya kebudayaan dan kebangsaan. Di sisi lain, kemajemukan dan keberagaman dapat menjadi potensi perpecahan apabila tidak dikelola dengan tepat. H.A.R. Tilaar pernah mengatakan bahwa *“masyarakat multikultural menyimpan banyak kekuatan dari masing-masing kelompok tetapi juga menyimpan benih-benih perpecahan yang berasal dari benturan antar-budaya, suku, ras, etnik, dan nilai-nilai yang berlaku yang pada nantinya menjadi benih dan menciptakan disintegrasi bangsa Indonesia.”* Dengan demikian, diperlukan suatu mekanisme yang tepat untuk menjaga kemajemukan dan keberagaman sebagai sesuatu yang mesti diterima sekaligus menghindarkannya dari bibit-bibit perpecahan.

Memahami, menyadari, dan menerima kemajemukan dan keberagaman merupakan langkah awal dalam menciptakan kondisi tersebut. Pemahaman, kesadaran, dan penerimaan terhadap kemajemukan dan keberagaman dapat menjadi suatu paradigma atau suatu cara untuk melihat segala sesuatu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma merupakan suatu “kerangka berpikir”. Dalam makna lain, paradigma serupa dengan makna “wawasan”. Kemajemukan dan keberagaman (kebinekaan) sebagai paradigma berarti kita memiliki cara berpikir yang menghormati adanya perbedaan. Sebagai paradigma kebangsaan, kemajemukan dan keberagaman itu lantas dipahami sebagai cara berpikir kita yang menghormati perbedaan untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Jika ditelaah lebih dalam, kebinekaan memiliki pengertian yang hampir sama dengan pluralisme (kemajemukan) dan multikulturalisme (keberagaman budaya). Pluralisme dapat dimaknai sebagai suatu pedoman interaksi antarkelompok yang menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain. Sementara multikulturalisme bisa diartikan sebagai pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik secara sederajat. Sebagai suatu “-isme” atau paham, pluralisme dan multikulturalisme tidak hanya berkaitan dengan kesadaran bahwa setiap manusia memiliki perbedaan, melainkan juga menjadi sesuatu yang sifatnya harus diamankan dalam interaksi kehidupan bermasyarakat.

Satu catatan penting yang perlu digarisbawahi yaitu kebinekaan sebagai multikulturalisme dan pluralisme tidak dapat hadir begitu saja. Ia tetap membutuhkan komitmen dan aturan main yang adil dan tegas, baik yang dihadirkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah maupun nilai-nilai yang diamankan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jika komitmen serta aturan yang tegas itu tidak muncul, maka dua macam skenario yang dapat terjadi, yaitu:

1. Dominasi Mayoritas

Dominasi mayoritas adalah satu kondisi yang memperlihatkan pihak mayoritas mendominasi sehingga pihak minoritas terkalahkan kepentingannya. Hal ini berkaitan dengan karakteristik negara demokrasi yang proses pengambilan keputusan dan pembentukan undang- undangnya dilakukan oleh sekelompok orang yang dipilih melalui suara terbanyak. Jika tidak dilandasi oleh komitmen untuk selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, praktik berdasarkan suara terbanyak tersebut tentu akan berpotensi menghadirkan dominasi mayoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tentu bertentangan dengan dua nilai Pancasila tersebut.

2. Tirani Minoritas

Tirani minoritas merupakan kebalikan kondisi dari dominasi mayoritas. Tirani minoritas biasa digunakan untuk menjelaskan kondisi kekuasaan di suatu negara atau wilayah yang dikelola secara tidak demokratis. Dalam negara atau wilayah tersebut, para pemimpinnya (dalam jumlah sedikit) melaksanakan kekuasaan secara sewenang-wenang atau tidak adil terhadap rakyat yang dipimpinnya (dalam jumlah banyak). Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan, hanya untuk menguntungkan segelintir pihak penguasa dan merugikan banyak pihak lainnya.

Agar terhindar dari kedua macam kondisi tersebut, diperlukan konstitusi yang adil yang dilaksanakan secara benar tanpa pandang bulu. Selain itu, kebinekaan sebagai paradigma kebangsaan harus dijadikan pedoman dan pegangan utama dalam pembuatan keputusan dan kebijakan yang menyangkut rakyat banyak. Para pembuat kebijakan tidak boleh sampai terjebak pada dominasi mayoritas maupun tirani minoritas dalam membuat keputusan dan kebijakan.

Tidak hanya dalam konteks pemerintahan atau negara, kalian sebagai pelajar juga harus menerapkan kebinekaan sebagai paradigma atau wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam pemilihan ketua dan pengurus OSIS, wakil pelajar untuk suatu lomba, pembentukan panitia kegiatan sekolah dan di lingkungan tempat tinggal kita, dan lain- lain. Sebagai calon-calon pemimpin masa depan, wawasan kebinekaan harus menjadi paradigma berpikir kalian sejak sekarang.

B. Sikap-Sikap Wawasan Kebinekaan

Wawasan kebinekaan sebagai paradigma kebangsaan dapat diwujudkan ke dalam sikap-sikap dalam keseharian, di antaranya:

1. Bersikap Toleran terhadap Perbedaan

Toleransi merupakan sikap menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain pada suatu situasi kemajemukan atau perbedaan, meskipun kita mampu melakukannya. Toleransi berarti tidak semena-mena menggunakan kelebihan kita (kekuasaan, perasaan menjadi mayoritas, kemampuan ekonomi, dan sebagainya) terhadap orang-orang yang kita pandang berbeda. Dengan bahasa sederhana, toleransi adalah menjaga perasaan kita terhadap perbuatan orang lain. Hal ini mirip dengan tenggang rasa, yakni cara kita menjaga perasaan orang lain dari perbuatan kita. Di samping itu, kita perlu memiliki rasa *tepa selira* atau kemampuan merasakan perasaan orang lain atau empati.

Dalam kaitannya dengan kemajemukan suku, budaya, bahasa, keyakinan, dan agama, toleransi berarti kita menghormati mereka yang berbeda dengan kita untuk dapat hidup sesuai dengan kepercayaan

mereka. Kita tidak boleh mengganggu mereka dengan alasan kepercayaan mereka berbeda dengan kepercayaan kita melainkan kita harus menghargai pilihan mereka dalam berkeyakinan.

2. Saling Menghargai Perbedaan

Perbedaan dan kemajemukan sudah menjadi sesuatu yang biasa. Kita perlu menyadari bahwa tidak ada gunanya membuat yang berbeda harus menjadi sama seperti kita. Perbedaan dapat menimbulkan banyak masalah, namun perbedaan juga yang membuat sesuatu semakin berwarna dan indah. Dalam hal ini, perbedaan justru harus dilihat sebagai faktor pendorong untuk menyatukan diri sehingga pada akhirnya Indonesia akan dapat mewujudkan cita-citanya yakni kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Di era kemerdekaan seperti sekarang ini, kita perlu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk semakin mengangkat nama Indonesia di kancah dunia. Banyak upaya yang dapat dilakukan, seperti berprestasi di bidang masing-masing, melakukan yang terbaik sesuai kemampuan, menjaga nama baik negara di mana pun termasuk di media sosial, dan sebagainya. Semua harus dilakukan dalam satu kesatuan cita-cita, bersatu untuk mewujudkan kedaulatan, dan kemakmuran Indonesia.

3. Menghindari Pembicaraan Isu-isu Sensitif

Dalam pergaulan sehari-hari, sering kali kita ikut terlibat dalam membicarakan isu-isu sensitif. Isu-isu sensitif di sini misalnya mengenai suku, agama, adat, kepercayaan, tingkat ekonomi, mayoritas-minoritas dan seterusnya. Kita seharusnya membangun relasi secara wajar tanpa

mempersoalkan hal-hal semacam ini. Isu-isu ini, sering kali tidak relevan dengan pokok persoalan, dan pihak- pihak yang menggunakan isu-isu semacam ini justru akan membuat konflik. Terlebih di era kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dewasa ini, apa pun dapat menjadi viral.

Pada era kemajuan TIK dewasa ini, sulit memang bagi kita untuk mendapatkan informasi yang betul-betul *valid* atau sah. Banyak informasi yang beredar melalui berita, *meme*, dan *posting-posting* di media sosial yang tidak selalu benar dan baik. Banyak informasi beredar yang memang sengaja dibuat untuk memancing konflik di tengah kemajemukan. Hal ini dilakukan demi kepentingan oknum-oknum atau golongan-golongan tertentu yang tidak memedulikan masa depan Indonesia. Banyak isu-isu tersebut yang menyinggung masalah agama, adat, etnis dan suku. Oleh karena itu, kita perlu menyaring atau memfilter informasi.

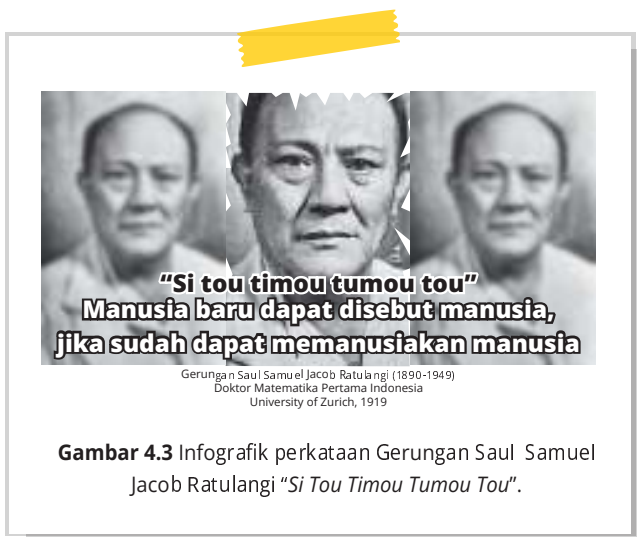
Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari pembicaraan mengenai isu-isu sensitif tersebut adalah dengan meningkatkan literasi digital. Semakin kita menanggapi dengan menyukai (*like*), komentar (*comment*), dan berbagi (*share*), maka isu tersebut akan semakin terangkat dan meluas. Akibatnya mereka yang semula tidak berkepentingan dengan isu tersebut dapat menanggapi secara keliru dan menimbulkan konflik yang semakin mendalam.

Ingatlah dalam kemajuan teknologi informasi sekarang ini, ada pernyataan yang dapat kita cermati bersama, yaitu “jemarimu adalah harimaumu”. Dengan menahan diri untuk tidak langsung menanggapi isu, maka kita telah membantu menjaga keharmonisan. Dengan menahan diri agar tidak terpancing isu-isu sensitif, kita juga telah membantu Indonesia menjaga persatuan dan kesatuannya.

4. Memegang Nilai-Nilai Kemanusiaan

Nilai-nilai kemanusiaan seperti menghargai harkat dan martabat orang lain, menghormati kemajemukan, dan menoleransi perbedaan merupakan kunci pergaulan dan hubungan antarmanusia yang sehat. Apa pun suku, adat, budaya, etnis, bahasa, agama, kepercayaan, dan tingkat ekonomi kita pada hakikatnya kita adalah manusia.

Nilai-nilai kemanusiaan merupakan hal yang universal. Hal ini dapat kita lihat dalam dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diumumkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Indonesia dapat dikatakan lebih maju dari deklarasi ini karena sudah memuat nilai-nilai kemanusiaan universal di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.



Nilai-nilai humanisme atau kemanusiaan ini merupakan tolok ukur utama dalam hubungan kita dengan sesama manusia serta dengan alam semesta. Kita dianggap menjadi seorang yang manusiawi apabila kita mampu "memanusiaikan manusia". Bukan memperlakukan manusia lain sebagai sesuatu yang bukan manusia, misalnya semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan kita.

5. Menyelesaikan Persoalan dengan Musyawarah untuk Mufakat



Gambar 4.4 Belajar mengaktualisasikan musyawarah dengan proses yang baik dan mencapai mufakat sebagai keputusan bersama

Hidup kita tentu tidak terbebas dari adanya konflik, perseteruan, sengketa, dan pertengkaran. Terlebih dalam kondisi masyarakat majemuk seperti Indonesia. Perbedaan cara pandang dan kepentingan berpotensi menimbulkan konflik, perseteruan dan pertengkaran. Namun menggunakan cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah bukanlah sesuatu yang terpuji dan manusiawi. Manusia adalah makhluk beradab yang memiliki kemampuan berpikir, menalar, berbahasa, dan berbicara. Adapun kekerasan adalah tanda ketidakberadaban. Dengan demikian, manusia yang manusiawi akan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan dalam menyelesaikan masalah.

Kemampuan menggunakan bahasa, bernegosiasi, dan berdiplomasi merupakan penanda keadaban. Nilai-nilai kemanusiaan dalam menyelesaikan masalah dicapai dengan menggunakan upaya-upaya damai melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Musyawarah berarti masing-masing pihak berbicara secara setara untuk menyampaikan suatu maksud. Masing-masing pihak akan saling menanggapi dan berkompromi atau bernegosiasi untuk mencapai titik temu yang disetujui semua pihak. Inilah yang dinamakan mufakat.

Musyawarah berarti masing-masing pihak berbicara secara setara untuk menyampaikan suatu maksud. Masing-masing pihak akan saling menanggapi dan berkompromi untuk mencapai titik temu yang disetujui semua pihak. Inilah yang dinamakan mufakat.

Musyawarah merupakan ciri negara demokrasi, yang tidak membiarkan adanya perilaku semena-mena terhadap pihak lain. Semua pihak dianggap setara dan berhak menyampaikan maksudnya tanpa ancaman, intimidasi, atau paksaan. Hasil dari musyawarah yang sehat adalah mufakat, yakni suara bersama yang disetujui semua pihak. Lagi-lagi di sini nilai-nilai persatuan menjadi landasan utama dalam penyelesaian konflik.

6. Bersikap Objektif dan Adil

Sebagai manusia, kita sering kali memiliki bias dalam menilai suatu persoalan maupun dalam bergaul dengan orang lain. Bias adalah kecenderungan kepada suatu hal yang sifatnya subjektif. Misalnya, orang yang percaya bahwa jenis kelaminnya paling unggul akan cenderung merendahkan jenis kelamin yang lain (bias gender). Hal ini manusiawi, namun hal ini dapat memicu konflik.

Salah satu sikap yang harus dimiliki agar mampu bersikap toleran dan menghargai perbedaan adalah sikap objektif dan adil. Sikap objektif dan adil merupakan sikap yang menilai sesuatu dengan standar yang tunggal, bukan standar ganda. Artinya, kita menerapkan standar yang sama terhadap suatu hal, tanpa membeda-bedakan. Bersikap objektif dan adil berarti juga memberikan ruang bagi pihak lain untuk membela diri sebagaimana kita pun berhak membela diri. Apabila sesuatu memang benar menurut prinsip-prinsip umum yang berlaku, maka jangan disalahkan hanya karena kita didukung mayoritas. Sedapat mungkin sikap-sikap subjektif apapun harus dihindari dalam rangka mempertahankan keharmonisan dan kemanusiaan.

7. Menyadari Pentingnya Persatuan dan Kesatuan

Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang kuat apabila tercerai-berai sebagaimana kata pepatah, “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Kita dapat belajar dari hal sederhana seperti sebuah sapu lidi. Apabila lidi-lidi tersebut berada dalam satu ikatan, maka akan mudah bagi kita untuk membersihkan kotoran. Namun apabila tidak diikat dengan baik, maka lidi-lidi tersebut akan terlepas dan kita akan lebih banyak menghabiskan energi untuk memperbaikinya daripada membersihkan kotoran.

Di titik inilah wawasan kebinekaan diwujudkan dalam nasionalisme atau semangat kebangsaan. Kebinekaan sebagai identitas bangsa perlu dibangun dalam suatu wadah untuk kita berkarya, mencipta, dan berkreasi. Apabila kita berprestasi, terutama di kancah dunia, maka seluruh bangsa akan bangga dengan pencapaian kita. Sebaliknya, prestasi siapa pun yang sebangsa dengan kita akan membuat kita bangga sebagai suatu keseluruhan.

“Dalam kaca mata yang lebih luas, nasionalisme” yang sehat tidak dapat disamakan dengan *chauvinisme* atau nasionalisme sempit. *Chauvinisme* melihat bahwa bangsa kita adalah bangsa paling superior atau unggul serta merendahkan bangsa-bangsa lain. Sebagai anak Indonesia, kita percaya bahwa bangsa-bangsa di seluruh dunia ini setara. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, kita tidak dapat menerima ada bangsa lain yang superior yang berpotensi menindas atau menjajah bangsa lain. Melalui prinsip objektivitas dan keadilan, maka juga sangat tidak dapat diterima apabila kita enggan menjaga persatuan dan kesatuan dengan sesama bangsa Indonesia sendiri.



Kebebasan untuk memeluk agama telah dijamin dalam UUD 1945 dalam Pasal 29 Ayat (2), yakni “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama*”. Di sisi lain, setiap warga negara Indonesia juga memiliki hak untuk bebas berekspresi, berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”. Hal ini bermakna bahwa sejak awal, pengakuan atas kebinekaan memiliki sejarah yang sama panjangnya dengan proses lahirnya negara ini.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang terjabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun dengan mempertimbangkan banyak aspek, terutama yang berkaitan dengan kemajemukan. Kita dapat mengingat bahwa dalam penyusunan Pancasila, banyak upaya musyawarah untuk mufakat yang dilakukan oleh para Pendiri Bangsa untuk menampung dan merangkul

kemajemukan Indonesia. Kebijakan dan kedewasaan para pendiri bangsa Indonesia seharusnya membuat kita yang hidup di masa kini, yang dinilai lebih berpendidikan dan hidup lebih nyaman, seharusnya merasa malu dengan kesempitan pola pikir kita yang mengutamakan kepentingan golongan atau bahkan memanfaatkannya demi keuntungan kelompok.

Perbedaan, kemajemukan, dan keberagaman adalah hal yang dapat memperkaya, namun juga dapat menjadi potensi perpecahan. Dengan demikian, untuk menyingkapi perbedaan dan menghindari perpecahan, kita harus menghindari sikap-sikap sebagai berikut.

1. Mudah menyebarkan rumor atau gosip yang kita tidak yakin kebenarannya. Sebelum menceritakan suatu hal kepada orang lain, maka pastikan dulu bahwa informasi yang kita terima itu benar. Terutama yang berkaitan dengan keburukan seseorang atau kelompok.
2. Mudah berprasangka. Salah satu godaan terbesar ketika menemui perbedaan adalah adanya prasangka maupun stereotip. Menurut KBBI, stereotip adalah konsep mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat terhadap suatu golongan tertentu. Misalnya etnis tertentu distereotipkan sebagai pelit, etnis lain sebagai keras, dan seterusnya. Kita perlu memahami bahwa hampir seluruh stereotip ini tidak benar. Jangan mudah menghakimi suatu suku, etnis, maupun agama hanya karena orang-orang mengatakan demikian. Tetaplah bersikap objektif dan adil.
3. Mudah menghakimi. Seperti poin sebelumnya, sifat ini harus dihindari. Bersikaplah skeptis (meragukan sesuatu sebelum terbukti benar/salahnya) kepada informasi, prasangka, maupun stereotip.
4. Membeda-bedakan perlakuan (diskriminatif). Kita tentu tidak mau dibanding-bandingkan dan diperlakukan berbeda oleh orang lain. Selain tidak adil, hal ini justru akan membuat sifat kita menjadi buruk. Jagalah empati dan *tepa selira* terhadap mereka yang berbeda.

5. Meremehkan sesama. Manusia memang memiliki perbedaan kemampuan dan keterampilan. Namun setiap manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang belum tentu muncul di lingkungan kita. Fokuslah pada kelebihan-kelebihan orang lain dan teladanilah, daripada fokus pada kekurangan-kekurangan orang. Kita sendiri juga memiliki kekurangan-kekurangan.
6. Terlalu terbuka. Kebalikan dari sikap curiga, sikap terlalu terbuka adalah tidak adanya batas-batas bagi kita dalam bergaul dengan orang lain. Sekalipun tidak boleh mudah curiga maupun berprasangka, namun kita juga perlu melindungi diri, keluarga, dan sahabat-sahabat kita dari hal-hal yang bisa jadi negatif atau bahkan merusak. Misalnya *video game* terbaru yang ternyata menggiring pada perjudian, permen yang ternyata narkoba, *platform* media sosial yang ternyata modus penculikan dan perdagangan manusia, dan sebagainya.
7. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Jangan pernah menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun, baik verbal (kata-kata) maupun fisik, untuk menyelesaikan masalah. Selain dapat diperkarakan ke pihak yang berwajib, kekerasan tidak sesuai dengan nilai-nilai dan sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Selesaikan dengan musyawarah. Mencapai mufakat akan lebih baik. Apabila mufakat tidak tercapai, maka kita dapat menyerahkannya kepada pihak berwenang.

Kemerdekaan yang diperoleh dengan susah payah dan penuh pengorbanan seharusnya diisi dengan pembangunan, baik pembangunan fisik dan infrastruktur, dan tidak kalah penting adalah pembangunan mental, sikap, dan perilaku atau disingkat sebagai budi pekerti. Kita dapat memulainya dengan menyadari bahwa yang berbeda tidak perlu disamakan. Kita perlu menerima perbedaan sebagai sesuatu yang memperkaya, bukan memisahkan. Lalu bagaimanakah perasaan dan pengamalan kalian dalam memahami wawasan kebinekaan selama ini? Apa yang dapat dilakukan agar wawasan kebinekaan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat?

BAB V

Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami serta melakukan aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam bab ini, kalian diharapkan dapat:

1. membuktikan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai satu hal yang dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. mengargumentasikan kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa secara utuh berdasarkan pemikiran para tokoh pendiri bangsa;
3. memerinci makna Pancasila sebagai pemersatu bangsa melalui keberadaan sila-sila, keterhubungan, dan penjabarannya masing-masing secara utuh;
4. menganalisis berbagai sikap hidup yang dapat menguatkan atau melemahkan kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa;
5. mengembangkan sikap keteladanan yang diberikan sebagai contoh guna menguatkan kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa di dalam kehidupan sehari-hari.



Pengantar

Persatuan dan kesatuan bukanlah sesuatu yang tetap, ia dinamis dan cenderung berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Persatuan dan kesatuan bangsa harus terus dirawat, ditumbuhkan, dan dijaga dari berbagai ancaman. Melihat pentingnya persatuan dan kesatuan, para pendiri bangsa menyematkan istilah atau julukan “meja statis” dan “*leitstar* dinamis” kepada Pancasila sebagai pemersatu dan penuntun bangsa. “Meja statis” yang dimaksud adalah suatu pijakan yang menyatukan seluruh elemen bangsa, sedangkan “*leitstar* dinamis” adalah bintang penuntun yang memandu negara bangsa Indonesia agar bersatu demi mewujudkan cita-citanya yakni, tercapainya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Karena itulah, selain menjadi dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara, Pancasila juga berkedudukan sebagai pemersatu bangsa.

Terkait dengan hal tersebut, kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dihadapkan oleh dua bentuk tantangan yang secara umum dihadapi saat ini. *Pertama*, tantangan yang datang dari dalam (internal). *Kedua*, tantangan yang datang dari luar (eksternal). Tantangan internal adalah tantangan dalam mengelola kebinekaan suku, bahasa, budaya, dan agama yang menjadi kodrat bangsa Indonesia. Tantangan eksternal adalah tantangan dalam menyikapi arus globalisasi yang menghadirkan kesaling-terhubungan semua warga dunia melintasi batas-batas negara, yang difasilitasi oleh kemajuan transportasi dan teknologi komunikasi-informasi.

Dua tantangan tersebut hadir secara bersamaan dan harus direspon dengan dua prinsip berikut, yakni prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip persaudaraan bangsa-bangsa atau kemanusiaan universal.

Bhinneka Tunggal Ika secara resmi dijadikan semboyan negara pada 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut dimaksudkan untuk merawat kesadaran akan kodrat Indonesia yang majemuk. Suatu kesadaran yang diharapkan melahirkan sikap toleran dan menghargai perbedaan. Sebagai negara yang memiliki bentuk kesatuan dengan bangsa yang majemuk, Indonesia jelas memerlukan inspirasi dari Bhinneka Tunggal Ika untuk merawat persatuan dan kesatuan Indonesia.

Kemanusiaan universal merupakan nilai penting dari sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, Sukarno menyebut sila itu dengan kata internasionalisme. Internasionalisme itu artinya selain menyadari akan kodrat Indonesia yang majemuk atau bineka, para pendiri bangsa sejak awal juga menyadari bahwa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat global. Untuk itu, memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara tidak harus membuat kita tertutup dengan pergaulan global. Dalam bahasa Sukarno melalui pidato 1 Juni 1945, "*Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.*"

Nah, bagaimana menerapkan dua prinsip tersebut dalam praktik dan sikap hidup kita sehari-hari sebagai pelajar? Sebagaimana telah dijelaskan di atas, persatuan dan kesatuan bukanlah sesuatu yang tetap. Ia dinamis dan selalu dihadapkan pada tantangan-tantangan. Untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan praktik dan sikap yang diturunkan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip persaudaraan bangsa-bangsa atau kemanusiaan universal.

Dalam Bab V ini, kalian dapat mempelajari beberapa hal penting terkait hal tersebut. *Pertama*, praktik pengamalan nilai-nilai Pancasila yang mendukung kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

Kedua, faktor penguat kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. *Ketiga*, faktor pelemah kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. *Keempat*, Refleksi. Dengan mempelajari berbagai hal dalam bab ini, kalian selaku peserta didik diharapkan bisa memahami bagaimana cara mengamalkan Pancasila dalam kedudukannya sebagai pemersatu bangsa Indonesia.



Praktik Pengamalan Pancasila

Agar mampu mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai pelajar, kita harus memahami terlebih dahulu hakikat Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena persatuan bangsa diwakili oleh sila Persatuan Indonesia, maka kita harus memahami makna bahwa sila-sila lainnya terikat dengan sila persatuan tersebut. Artinya, kita perlu memahami dan mengamalkan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh atau tidak terpisah-pisah. Upaya untuk memahami hal tersebut, bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Pertama, memahami sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip keagamaan yang toleran, saling menghormati dan berorientasi pada kasih sayang. Mengapa? Karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan sila-sila lainnya, termasuk sila Persatuan Indonesia. Untuk itu, cara mengamalkan sila ketuhanan harus melalui sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Terkait dengan upaya mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, maka pengamalan terhadap sila ketuhanan harus diletakkan dalam upaya merawat persatuan bangsa di tengah kemajemukan agama. Dalam hal ini, kita harus meyakini pula bahwa upaya merawat persatuan bangsa tidak hanya dikehendaki di dalam Pancasila, tetapi juga ada di dalam ajaran agama kita.

Kedua, memahami sila Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai prinsip memperlakukan semua orang secara manusiawi. Sila kemanusiaan mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi tersebut, dijamin keberadaannya dalam UUD NRI 1945. Beberapa pasal yang menunjukkannya, antara lain sebagai berikut.

No.	Pasal	Bunyi
1.	28A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2.	28B ayat (1)	Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
3.	28B ayat (2)	Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4.	28C ayat (1)	Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

No.	Pasal	Bunyi
5.	28C ayat (2)	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
6.	28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
7.	28D ayat (2)	Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
8.	28D ayat (3)	Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
9.	28H ayat (4)	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
10	29 ayat (2)	Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Adanya HAM di dalam UUD NRI 1945 memberikan penegasan bahwa HAM harus dihormati karena dilindungi oleh konstitusi dan dasar negara. Terkait dengan persatuan bangsa, maka UUD NRI 1945 memuat prinsip-prinsip persatuan itu, terutama tercermin dalam pasal 28D ayat (1)

tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta pasal 29 ayat (2) tentang kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Setiap kita memiliki hak yang setara di hadapan hukum, sehingga tidak ada yang lebih tinggi derajatnya, misalnya karena alasan suku, agama, dan kelompok tertentu. Demikian pula setiap kita berhak beragama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, karena hal itu memang fitrah manusia. Berbagai perlindungan terhadap HAM ini turun dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu, kita harus memahami dan mengamalkan HAM tersebut untuk terus menguatkan kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

Ketiga, memahami makna sila Persatuan Indonesia. Untuk terus menegakkan kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, kita harus benar-benar memahami bahwa sila ini hendak meneguhkan alasan kita untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Sukarno dalam pidato 1 Juni 1945 menjelaskan bahwa kita menjadi bangsa, karena kita memiliki kehendak untuk hidup bersama di dalam satu masyarakat yang berhasil mempersatukan berbagai kemajemukan. Jadi, kita menjadi Indonesia karena telah mampu menyatukan berbagai perbedaan, baik suku, ras, agama dan golongan untuk menjadi masyarakat yang satu, yang kita sebut bangsa Indonesia. Kehendak untuk menjadi bangsa disebabkan oleh kesamaan nasib sebagai masyarakat terjajah serta cita-cita atau tujuan yang sama. Kita harus terus mengingat alasan pendirian bangsa kita itu, agar memahami benar makna Pancasila sebagai sebuah “meja statis” yang mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia.

Keempat, memahami sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sebagai upaya memperkuat kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, maka kita harus pula memahami makna demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mengapa? Karena rakyatlah yang harus diprioritaskan dalam kehidupan bernegara. Menjadikan rakyat sebagai

sumber kedaulatan juga merupakan perintah Tuhan, sebab Tuhan memerintahkan kita untuk menyejahterakan rakyat yang dipimpin. Prinsip demokrasi ini lalu dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan rakyat dalam perumusan keputusan, baik dalam pemerintahan maupun dalam lingkup yang lebih kecil. Oleh karena itu, kita perlu ikut mendorong persatuan bangsa dengan menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, bukan kelompok tertentu.

Kelima, memahami sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk dapat benar-benar meyakini kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, kita harus memahami betul makna sila keadilan sosial itu. Sebab sejak awal, tujuan pendirian negara kita adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam kaitan ini, Pancasila dapat dilihat sebagai sebuah "*leitstar* dinamis" yang dapat memandu negara dan bangsa Indonesia untuk mengatasi berbagai macam tantangan kehidupan yang semakin kompleks dengan syarat utama yakni bersatu. Tanpa bersatu, mana mungkin kita bisa hidup dengan adil dan makmur. Sebab dalam masyarakat yang mengalami perpecahan, kita hanya akan menemukan penderitaan.

Melalui uraian di atas, dapat dipahami bahwa untuk membangun persatuan bangsa, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam kedudukannya sebagai pemersatu bangsa. Jika secara singkat diulang kembali, sikap-sikap pengamalan tersebut meliputi: pengamalan nilai-nilai ketuhanan yang menghargai kemajemukan agama di Indonesia, menghormati HAM yang terdapat di diri dan seluruh umat manusia, menyadari arti penting mengapa bangsa Indonesia mesti bersatu, menerapkan prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dalam kepemimpinan dan organisasi, serta semangat untuk membangun kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan pribadi atau golongannya sendiri. Pengamalan sila-sila tersebut harus dilakukan secara utuh dan menyatu agar membentuk satu kesatuan Pancasila yang berkedudukan sebagai pemersatu bangsa.



Materi Pokok

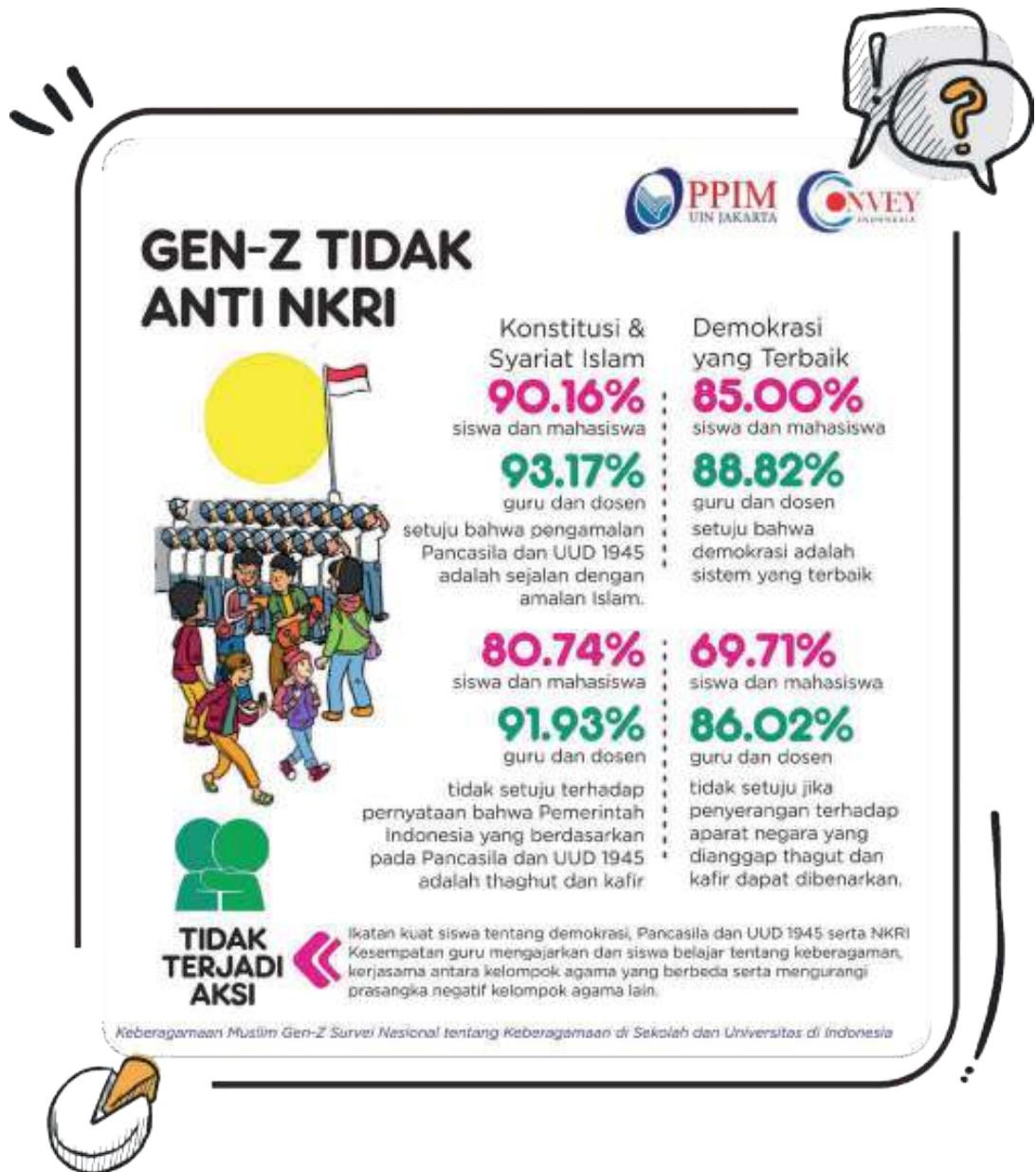
A. Faktor-Faktor Penguat Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kita dapat temukan bahwa kata faktor dimaknai sebagai hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuatu, sedangkan kata penguat memiliki arti, (1) yang menguatkan atau yang dipakai untuk memperkuat; dan (2) alat untuk meningkatkan atau membangkitkan sesuatu. Dengan demikian secara istilah, faktor-faktor yang menguatkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa adalah hal, keadaan atau peristiwa yang menguatkan, meningkatkan atau membangkitkan Pancasila, khusus dalam kedudukannya sebagai pemersatu bangsa.

Pancasila sebagai pemersatu bangsa tidak terjadi secara tiba-tiba. Keberadaannya dibentuk oleh serangkaian sikap dan praktik yang dilakukan secara sadar dan konsisten oleh generasi yang terdahulu. Sudah kita ketahui bersama, sebagai sebuah bangsa, Indonesia baru lahir pada tahun 1928 yang ditandai oleh konsensus yang disebut Sumpah Pemuda. Sementara itu sebagai negara, Indonesia baru berdiri tahun 1945 yang ditandai oleh Proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada 17 Agustus tahun itu. Baik sebagai bangsa maupun sebagai negara (*nation-state*), Indonesia tidak akan pernah ada tanpa persatuan. Dengan demikian, sikap dan praktik yang mendorong kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa merupakan buah perjuangan generasi terdahulu yang mesti terus menerus dihidupkan dalam perilaku keseharian generasi kita saat ini maupun yang akan datang.

Hal yang patut kita syukuri, mayoritas masyarakat kita saat ini sangat peduli dengan kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Meskipun masih terdapat beberapa pihak yang tidak nyaman dengan hal tersebut, namun hal itu tidak sampai mencederai sikap mayoritas bangsa Indonesia yang sudah terbiasa menganggap Pancasila sebagai prinsip untuk membina kehidupan yang rukun di tengah kemajemukan.

Survei Nasional tentang Keberagamaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1 September-7 Oktober 2017 menunjukkan data yang optimistis. Kisaran 80%-90% pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen di Indonesia menerima nilai-nilai kebangsaan, sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan. Artinya, nilai-nilai kebangsaan dan bangunan kenegaraan diterima sebagai bagian dari nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam agama. Hasil survei tersebut bisa dilihat dalam infografis berikut ini.



Gambar 5.1 Infografik survei keberagaman di sekolah dan universitas.

Sumber: PPIM UIN, 2017

Hasil survei ini menggembirakan, sebab mayoritas pelajar, mahasiswa, guru dan dosen di Indonesia memiliki pandangan positif terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, demokrasi, dan Pemerintah RI. Kisaran 80%-90% responden tersebut bahkan memahami bahwa pengamalan Pancasila dan UUD NRI 1945 sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tentu, pandangan seperti ini juga dimiliki oleh pemeluk agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Mayoritas responden juga tidak setuju jika Pemerintah RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 tersebut dituduh sebagai berhala (*thaghut*) dan kafir. Mengapa? Karena Pancasila dan UUD NRI 1945 sejalan dengan nilai-nilai agama. Demikian pula mayoritas pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen sepakat bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang terbaik.

Pandangan positif seperti di atas menjadi bukti bahwa masyarakat kita masih setia dengan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian juga halnya para pelajar, kalian pasti memiliki pandangan yang serupa. Bahwa nilai-nilai kebangsaan tersebut bukanlah nilai-nilai yang bertentangan dengan agama. Justru sebaliknya Pancasila adalah cerminan dari nilai-nilai agama yang mengajarkan cinta kasih terhadap sesama manusia dan alam semesta ciptaanNya. Ketika sila pertama memuat nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, maka secara otomatis Pancasila merupakan pemersatu bangsa yang mengajak kita semua untuk bersatu dalam cinta kasih itu.

Itulah sebabnya, mengapa proklamator kita Mohammad Hatta menyatakan, "*Sila Ketuhanan Yang Maha Esa membimbing sila-sila lainnya secara ikat mengikat.*" Artinya, sila-sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial adalah sila-sila yang bersifat religius karena dinaungi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukankah semua agama mengajarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan

keadilan sosial? Memahami keselarasan antara Pancasila dengan agama, juga dengan nilai-nilai budaya di masyarakat seperti ini, menjadi modal utama agar kita bisa semakin menguatkan persatuan dan kesatuan di tengah kebinekaan yang terjadi secara nasional maupun global.

Dalam kaitan ini, sebagai pelajar kalian bisa melakukan beberapa hal untuk memperkuat kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Beberapa di antaranya sebagai berikut.

1. Menguatkan Organisasi Kebangsaan

Selain dengan memahami, penguatan kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa bisa kita bangun melalui aktivitas di dalam organisasi yang bernuansa kebangsaan. Hal tersebut dapat kita temukan konteks kesejarahannya dalam berbagai praktik berorganisasi di kalangan pelajar yang tumbuh di era pergerakan nasional. Sebut saja misalnya Perhimpunan Indonesia (PI) yang diprakarsai oleh Sutan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Organisasi tersebut awalnya bernama *Indische Vereeniging* lalu berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922. Organisasi yang menghimpun para pelajar Indonesia di negeri Belanda ini tercatat sebagai organisasi pertama yang menggunakan istilah “Indonesia”.



Gambar 5.2 Infografik lahirnya Sumpah Pemuda.

Sumber: kompas.com/Dhawam Pambudi

Contoh lain adalah Budi Utomo, organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Soetomo dan para mahasiswa *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (STOVIA-Sekolah Pendidikan Dokter Hindia) pada tanggal 20 Mei 1908. Meski pada mulanya ditujukan bagi golongan Jawa dan Madura, berdirinya Budi Utomo dinilai sebagai awal gerakan persatuan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena itu, tanggal berdirinya Budi Utomo kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Selain dua organisasi tersebut, masih banyak organisasi lain yang sangat berjasa untuk membentuk persatuan Indonesia. Satu di antaranya adalah Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) atau dalam bahasa Belanda disebut *Indonesische Studentbond*. Didirikan oleh para pelajar *Rechtshoogeschool te Batavia* (RHS-Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta) dan *Technische Hoogeschool te Bandoeng* (THS-Sekolah Tinggi Teknik di Bandung) pada September 1926, organisasi ini punya pengaruh besar di kalangan pemuda dalam menggerakkan persatuan Indonesia.

Praktik berorganisasi yang marak di kalangan pelajar dan pemuda waktu itu kemudian mendorong lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Seperti yang dapat kalian baca dalam infografik di atas, Sumpah Pemuda merupakan tonggak utama dalam sejarah persatuan Indonesia. Pada momen itulah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, para pemuda dari beragam latar belakang etnik, bahasa, dan agama berikrar untuk bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu dan menjunjung bahasa persatuan. Sumpah Pemuda itu kemudian menjadi tanda lahirnya Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Praktik berorganisasi yang tumbuh sejak awal abad ke-19 di kalangan pelajar dan pemuda itu harus kita teruskan. Hal itu menjadi bukti yang mendorong terciptanya persatuan. Saat ini, ada banyak sekali organisasi pelajar yang bisa diikuti oleh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Satu di antaranya adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). OSIS merupakan organisasi pelajar yang ada di semua sekolah di Indonesia. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan pokok menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam salah satu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh negatif dari luar sekolah.

Selain itu, OSIS juga mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa, sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, OSIS merupakan organisasi penyampai pemikiran dan gagasan siswa dalam usaha mematangkan kemampuan berpikir, wawasan dan pengambilan keputusan. Sebagai satu-satunya organisasi intra sekolah, OSIS punya peran strategis dalam membina, mengembangkan, dan memberdayakan siswa. Dibentuk sebagai perwujudan misi wawasan *wiyatamandala* (sekolah sebagai lingkungan pendidikan), OSIS dapat menjadi benteng dari berbagai ancaman ideologi dan atau budaya luar yang dapat mengancam kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa.



Gambar 5.3 Kegiatan Rapat OSIS.

OSIS merupakan perwujudan dari sistem pendidikan nasional, ia juga diarahkan untuk menumbuhkan semangat generasi muda Indonesia untuk maju dan memiliki rasa bangga akan bangsanya. OSIS menjadi salah satu wadah praktik berorganisasi di kalangan pelajar yang dapat menumbuhkan, menjaga, merawat, dan mengembangkan persatuan dan kesatuan di tengah kebinekaan nasional dan global. Dengan aktif di OSIS, para pelajar dapat belajar berorganisasi, mengasah potensi, mengembangkan minat dan bakat, dan sekaligus menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan.

2. Memperkuat Bahasa Persatuan

Rasa kebangsaan yang tumbuh pada awal abad ke-19 di kalangan pemuda dan pelajar tidak bisa dilepaskan dari peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keputusan Kongres Pemuda Kedua pada 28 Oktober 1928—yang kini lebih dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda—untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan merupakan konsensus penting dalam sejarah persatuan dan kesatuan Indonesia. Bahasa Indonesia memungkinkan semua orang dari beragam suku dan budaya untuk menjalin komunikasi dalam bahasa yang sama.

Kesamaan bahasa menumbuhkan kesamaan rasa. Kesamaan rasa memperkuat kesamaan nasib dan cita-cita, yang pada gilirannya memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia bukan saja menjadi bahasa persatuan, tetapi saat bersamaan juga menjadi bahasa pemersatu. Ada dua faktor yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai pemersatu. *Pertama*, fakta bahwa ia sudah menjadi *lingua franca* selama ribuan tahun di daerah-daerah Nusantara. *Kedua*, sifatnya yang egaliter.

Lingua franca adalah sebuah istilah dalam ilmu bahasa yang artinya adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Selama ratusan tahun sebelum Indonesia terbentuk, bahasa Indonesia (bahasa Melayu modern) sudah menjadi bahasa pergaulan. Seperti diketahui, bahasa Indonesia pada mulanya adalah bahasa Melayu modern. Bahasa Melayu yang selama ratusan tahun telah digunakan oleh para tokoh Sumpah Pemuda sebagai bahasa pergaulan dari ujung timur kepulauan Nusantara itu, diubah namanya menjadi bahasa Indonesia dan ditetapkan sebagai bahasa persatuan.

Lingua franca adalah sebuah istilah dalam ilmu bahasa yang artinya adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda.



Gambar 5.4 Menguatkan bahasa persatuan.

Selain karena sudah menjadi *lingua franca*, bahasa Indonesia menjadi pemersatu juga karena sifatnya yang egaliter. Berbeda dengan bahasa daerah, seperti bahasa Jawa atau bahasa Madura, bahasa Indonesia tidak mengenal tingkatan-tingkatan bahasa. Bahasa Jawa, misalnya, memiliki tingkatan bahasa berdasarkan kesopanan yang disesuaikan dengan derajat sosial. Bahasa Indonesia tidak seperti itu. Ia bahasa untuk semua orang, terlepas dari kasta atau derajat sosial. Bahasa Indonesia menjunjung nilai-nilai kesetaraan, sesuatu yang sangat penting dalam menjaga kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan pelajar cukup memprihatinkan. Hal ini terlihat dari dua kecenderungan: Maraknya penggunaan “bahasa gaul” dan maraknya penggunaan bahasa campuran. Bahasa Indonesia dicampur dengan istilah-istilah bahasa asing. Dua kecenderungan itu merupakan bentuk sikap yang tidak menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sudah mempersatukan bangsa Indonesia. Karena itu, perilaku tersebut perlu diubah. Haruslah ada pembiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-sehari. Karena ini bukan saja tentang praktik berbahasa, tetapi juga upaya merawat persatuan dan kesatuan.

3. Menumbuhkan Literasi Media

Literasi media adalah kemampuan untuk memahami, memilah, dan memilih informasi baik dan menerapkan apa yang diserap dari media. Sebagai sumber informasi dan ruang komunikasi, media punya pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan. Dengan literasi media, pemuda dan pelajar dapat menggunakan pengaruh media itu untuk menumbuhkembangkan Pancasila dalam kedudukannya sebagai pemersatu bangsa.

Pada awal abad ke-19, para pemuda menggunakan media massa (koran) untuk menyebarkan seruan persatuan. Waktu itu, mereka aktif mengirim artikel ke media dan menyebarkan pesan-pesan positif. Selain itu, mereka juga memanfaatkan media sebagai wadah komunikasi antarpelajar dan pemuda, yang tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Komunikasi yang dibangun adalah komunikasi untuk menguatkan rasa kebangsaan dan pentingnya menjaga persatuan.

Bisa dikatakan, literasi media merupakan faktor pendorong bagi tumbuhnya persatuan. Kini, berkat kemajuan teknologi dan meluasnya jaringan internet, media berkembang sedemikian rupa. Media yang digunakan oleh para pelajar di masa Sumpah Pemuda hanyalah media cetak. Sekarang ini, tumbuh subur media internet dan media sosial, yang pengaruhnya melampaui media cetak. Karena itu, tantangan yang dihadapi pelajar dan pemuda saat ini sebenarnya lebih besar ketimbang tantangan yang dihadapi pemuda dan pelajar era sebelumnya. Maka, kebutuhan untuk literasi media pun sangat mendesak.

Jumlah media saat ini sangat banyak. Dewan Pers mencatat, hingga tahun 2019, jumlah media mencapai 47 ribu yang terdiri dari media cetak, elektronik-televisi, radio, dan media siber. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya adalah media siber. Belum lagi media sosial yang penggunaannya semakin fantastis. Data yang dirilis *Hootsuite* tahun 2020 menunjukkan, pengguna media sosial aktif Indonesia sudah mencapai 160 juta. Jumlah media dan pengguna media sosial ini menunjukkan betapa peran media—baik media massa maupun media sosial—sangat besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu, ia harus digunakan sebagai perekat persatuan, bukan pemecah belah.



Gambar 5.5 Infografik jumlah pengguna media sosial di Indonesia.

Sumber: Hootsuite

Untuk menjunjung Pancasila dalam kedudukannya sebagai pemersatu bangsa, para pelajar dan pemuda harus melek literasi media. Terdapat empat ukuran melek literasi media bagi pelajar. *Pertama*, mengenali dan membedakan informasi yang baik dan buruk. *Kedua*, memilih dan memilih informasi yang benar. *Ketiga*, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang sifatnya propaganda dan menghasut. *Keempat*, ikut menyebarkan informasi dan konten positif.

B. Faktor-Faktor Pelemah Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa

Layaknya suatu ikatan, ada tindakan yang dapat memperkuat, tapi ada juga yang dapat melemahkannya. Di atas sudah disebutkan sikap dan praktik yang dapat memperkuat kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dari gambaran tersebut, dapat juga diposisikan secara terbalik. Misalnya, sikap menghargai perbedaan merupakan praktik yang menguatkan, maka yang sebaliknya, yaitu sikap tidak menghargai perbedaan adalah praktik yang melemahkan kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Begitu juga sikap menjunjung bahasa Indonesia, adalah sikap yang menguatkan kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, sikap sebaliknya adalah melemahkannya. Di luar hal tersebut, sejumlah faktor yang dapat memperlemah kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa adalah hal-hal sebagai berikut.

1. Melanggar Pancasila

Sebagai pemersatu bangsa, Pancasila merupakan nilai dasar yang menopang bangunan kebangsaan kita. Jika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai Pancasila, itu sama saja dengan melemahkan kehidupan bangsa Indonesia. Berikut beberapa contoh perbuatan buruk yang harus selalu kita jauhi tersebut: *Pertama*, memahami agama dan nilai-nilai ketuhanan secara eksklusif dengan menjelek-jelekkan agama lain. Tentu sebagai pemeluk agama, kita harus meyakini bahwa agama kita yang paling benar. Namun keyakinan tersebut haruslah kita hayati hanya secara pribadi dan internal umat seagama. Ketika berhadapan dan hidup dengan umat beragama lain, kita harus tetap menghormati agama lain tersebut. Hal ini selaras dengan penjelasan di awal bab ini, bahwa pengamalan agama dan nilai ketuhanan harus dipraktikkan secara bijak di masyarakat bangsa yang majemuk. Untuk

itu, kita tidak diperbolehkan mengafirkan pemeluk agama lain, karena hal tersebut bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, penghormatan terhadap agama lain juga menjadi bagian dari ajaran semua agama.

Kedua, tidak mengakui keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam diri teman-teman kita, terutama persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak memeluk agama sesuai iman masing-masing, serta hak untuk mengeluarkan pendapat dan berorganisasi. Ketika kita membenci teman beragama atau bersuku lain, maka kita tidak menghormati haknya sebagai manusia yang memiliki HAM yang dilindungi oleh UUD NRI 1945. Setiap orang, apa pun ras, suku, agama, dan golongannya memiliki hak yang sama di Negara Indonesia, karena Indonesia adalah negara-bangsa yang menempatkan semua orang setara di hadapan hukum.

Ketiga, menjadikan suku, agama, dan golongan sendiri sebagai hal yang paling utama dengan meniadakan suku, agama, dan golongan yang lain. Jika sikap tersebut dimunculkan, berarti kita telah melanggar Pancasila dalam kedudukannya sebagai pemersatu bangsa. Ketika kita tidak memiliki kesadaran akan hal tersebut, pada saat itulah sebenarnya potensi diri untuk meruntuhkan Pancasila ini muncul.

Keempat, tidak menerapkan demokrasi dalam praktik organisasi dan kepemimpinan. Ketika kita memilih pemimpin berdasarkan kesamaan suku, ras, agama dan golongan, maka kita tidak menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan atau demokrasi. Padahal, Pancasila dan UUD NRI 1945 menjamin agar semua berhak memilih dan dipilih menjadi pemimpin. Pemilihan pemimpin, baik di kelas maupun di organisasi, harus kita lakukan berdasarkan integritas dan kemampuan calon pemimpin. Bukan karena kesamaan suku, ras, agama, dan golongan. Ketika kita tidak menerapkan demokrasi, maka pada saat itu kita tengah meruntuhkan sendi-sendi Pancasila dalam kedudukannya sebagai pemersatu bangsa.

Kelima, tidak peduli dengan ketimpangan sosial dan berat hati untuk membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Karena keadilan sosial merupakan bagian penting dari tujuan kehidupan berbangsa, maka memupus kepekaan sosial merupakan langkah yang bertentangan dengan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Misalnya, ketika kita hanya mementingkan kelompok sendiri, maka pada saat itulah kita menghancurkan persatuan. Padahal, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menghendaki negara dan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk peduli terhadap kesejahteraan kaum yang paling lemah, apa pun ras, suku, agama dan kelompoknya.

2. Tertutup dalam Pergaulan

Persatuan Indonesia tidak akan pernah terjadi jika masing-masing orang atau kelompok di dalamnya tertutup dalam pergaulan. Menutup diri dari pergaulan bisa dilatari banyak hal, di antaranya adalah merasa tidak butuh bantuan orang lain; merasa paling benar dan yang lain sesat; terlalu bangga akan diri dan status sosialnya sehingga merendahkan yang lain dan merasa berbeda dengan orang atau kelompok lain sehingga tidak mau berbaur.

Rasa kebangsaan dan persatuan tumbuh ketika kalian memiliki pergaulan yang bersifat terbuka. Terbuka di sini bermakna bahwa kalian bisa berteman dengan kelompok orang dengan berbagai latar belakang agama dan budaya. Selain itu, membuka pergaulan dalam hal ini berarti pula membuka perasaan. Bahwa yang tadinya hanya merasa nyaman ketika berteman dengan satu kelompok, kini meluas dengan berbagai kelompok yang ada di Indonesia. Karena itu, untuk membuka pergaulan, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka pikiran dan wawasan.



Gambar 5.6 Ajakan penggunaan internet dengan bijak.

Sebaliknya, tertutup dalam pergaulan jelas menjadi faktor yang dapat memperlemah Pancasila dalam kedudukannya sebagai pemersatu bangsa. Parahnya, sikap tertutup seperti ini masih saja terlihat dalam kehidupan bermasyarakat di sekitar kita. Jika tidak diatasi, sikap tertutup dalam pergaulan ini pada gilirannya bukan tidak mungkin akan melahirkan kepicikan pandangan terhadap Pancasila mengingat dalam era globalisasi seperti sekarang, nilai-nilai asing yang bertentangan dengan Pancasila begitu banyak hadir mewarnai media internet. Jika

setiap individu yang mengaksesnya memiliki pergaulan yang terbatas, bukan tidak mungkin nilai-nilai tersebutlah yang dianggap benar olehnya karena minimnya kontrol masyarakat. Bayangkan jika ternyata banyak generasi penerus bangsa seperti kalian memiliki sikap ini, kesadaran untuk mengamalkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa pasti semakin lama semakin memudar dalam kehidupan Indonesia.

3. Egois dan Tidak Mau Bekerja Sama

Kerja sama merupakan kata kunci dari eratnya persatuan. Di kalangan pemuda dan pelajar era 1900-an awal, kerja sama itu terjalin erat, tidak ada yang egois. Semua bahu membahu, baik dalam pekerjaan keseharian maupun dalam perjuangan kemerdekaan. Jika waktu itu mereka punya sikap egois dan tidak mau bekerja sama, tentu saja tidak akan pernah ada persatuan. Tidak akan pernah ada Sumpah Pemuda, bahkan tidak akan pernah ada Pancasila dan Indonesia.

Namun seiring berjalannya waktu, semangat kerja sama mulai pudar. Belakangan ini, di tengah derasny arus globalisasi yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi dan alat transportasi, sifat egois dan mau menang sendiri menggejala. Muncul anggapan bahwa tidak penting dengan orang lain, yang penting adalah diri sendiri. Inilah yang membuat rasa persatuan di kalangan pelajar terkikis. Mereka merasa akan baik-baik saja tanpa kerja sama.

Kemajuan teknologi memang mendorong kita pada sikap individualistik. Karena semua hal yang dibutuhkan sudah bisa dilayani oleh teknologi, setiap orang seperti merasa tidak membutuhkan orang lain. Sikap ini jelas menjadi faktor yang melemahkan Pancasila dalam kedudukannya sebagai pemersatu bangsa. Perlu penyadaran bahwa tidak akan pernah ada Pancasila tanpa kerja sama. Orang yang hanya

memikirkan dirinya sendiri, tidak akan pernah bisa mengukuhkan keberadaan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Para pengamal Pancasila, adalah mereka yang mengutamakan kepentingan umum dan mau bekerja sama.



Sebagai negara yang terdiri dari beragam suku, bahasa, agama, dan budaya, Pancasila sebagai pemersatu bangsa menjadi kunci bagi keberadaan dan keberlangsungan Indonesia. Negara Indonesia bukan negara yang diikat oleh perasaan satu suku dan agama. Negara Indonesia merupakan negara yang didasari oleh ikatan kebangsaan. Satu ikatan yang dilandasi oleh kesadaran tentang persamaan nasib, budaya, pandangan hidup, serta cita-cita yang sama. Namun demikian, ikatan kebangsaan tersebut harus dipahami sebagai sesuatu yang dinamis. Ia dapat menyatu atau merenggang kapan saja, tergantung dari kuat-lemahnya komitmen bersama yang menjadi simpulnya. Pada titik inilah Pancasila dalam kedudukannya sebagai pemersatu bangsa harus dipahami. Selain menjadi “meja statis” yang menyatukan seluruh elemen bangsa, Pancasila sebagai komitmen bersama tersebut juga menjadi “*leitstar* dinamis” bagi negara dan bangsa Indonesia dalam perjuangan mencapai cita-citanya.

Dengan hadirnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa, kesadaran bersama bahwa Indonesia adalah bineka, merupakan satu modal yang utama. Untuk itu, kebinekaan bukanlah penghalang untuk bersatu. Asal ditemukan satu pijakan bersama, kebinekaan bukan saja dapat disatukan, tetapi juga menjadi kekuatan yang dapat digunakan untuk memajukan Indonesia. Kesadaran akan kebinekaan itulah yang memungkinkan negara bangsa Indonesia dapat lahir, hidup sampai saat ini, dan selamanya.

Kesadaran ini tentu tidak boleh dilupakan tetapi diamalkan dalam praktik keseharian semua anak bangsa, mulai dari pelajar, pejabat publik, hingga pengusaha. Hal ini penting karena tantangan zaman yang dihadapi semakin berat. Globalisasi yang datang dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi dan transportasi, membawa perubahan sangat cepat, yang harus dihadapi dengan sangat hati-hati dan bijaksana. Jika tidak, bukan tidak mungkin Pancasila sebagai pemersatu bangsa akan hilang dari kehidupan masyarakat, sehingga persatuan dan kesatuan tinggal kata-kata tanpa makna.

Sikap dan praktik yang memperkuat dan melemahkan Pancasila dalam kedudukannya sebagai pemersatu bangsa harus menjadi perhatian semua pihak. Sekali lagi, negara Indonesia berdiri karena adanya komitmen bersama bernama Pancasila. Komitmen itu harus selalu hidup di hati semua anak bangsa, terutama di kalangan pelajar. Jika komitmen itu kuat, maka ia tidak saja akan mengamalkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, tetapi juga akan terlibat dalam membudayakan praktik tersebut di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Lantas apakah kalian sudah memahami kenapa Pancasila menjadi pemersatu bangsa? Apakah kalian sudah melakukan upaya-upaya untuk mengamalkan Pancasila dalam wujud menjaga persatuan bangsa?

GLOSARIUM

Abstrak	: Tidak berwujud; tidak berbentuk
Aspirasi	: Harapan; tujuan
Afirmatif	: Bersifat menguatkan atau mengesahkan; praktik atau kebijakan memihak pada individu atau kelompok yang dinilai lemah atau terdiskriminasi
Bineka	: Beragam; beraneka ragam
Chauvinisme	: Cinta terhadap tanah air berlebihan; paham yang menganggap bahwa kelompok seseorang lebih tinggi, kuat dibanding dengan kelompok lain; sikap nasionalisme kebangsaan sempit; menganggap derajat bangsa sendiri lebih tinggi dibanding bangsa lain.
Diagram	: Gambaran untuk menerangkan sesuatu
Dinamika	: Gerak/tenaga yang menggerakkan/sesuatu yang membuat gerak
Diskriminasi	: Perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, agama, golongan, suku, ekonomi, dan sebagainya)
Dominasi	: Penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah (dalam bidang politik, militer, ekonomi, perdagangan, olahraga, dan sebagainya)
Empati	: Keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain
Etika	: Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral
Eksternal	: Menyangkut bagian luar (tubuh, diri, mobil, dan sebagainya); luar (negeri)

Falsafah	: Anggapan, gagasan, dan sikap batin paling dasar yang dimiliki seseorang; pandangan hidup
Fenomena	: Hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah
Formal	: Sesuai dengan peraturan yang sah; menurut adat kebiasaan yang berlaku
Fundamental	: Bersifat dasar (pokok); mendasar
Fundamentalisme	: suatu paham yang cenderung memperjuangkan sesuatu secara radikal
Fundamentalisme pasar	: Gagasan/paham yang menganggap mekanisme pasar (transaksi jual/beli) bukan hanya sebagai prinsip pengatur alokasi pemenuhan barang/jasa kebutuhan, tetapi sebagai satu-satunya prinsip/dasar pengatur seluruh bidang kehidupan dalam tatanan bermasyarakat
Global	: Secara umum dan keseluruhan; secara bulat; secara garis besar; bersangkutan paut, mengenai, meliputi seluruh dunia
Globalisasi	: Proses integrasi (penyatuan) internasional yang terjadi karena pertukaran pengetahuan, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) antar individu atau kelompok di berbagai belahan dunia
Hakikat	: Inti sari/dasar
Identitas	: Ciri/Keadaan khusus seseorang
Ilustrasi	: Gambar (foto/lukisan) untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya
Implementasi	: Pelaksanaan; penerapan
Independen	: Tidak terikat pihak lain

Individualisme	: Paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan; menghendaki kebebasan berbuat dan menganut kepercayaan bagi setiap orang; mementingkan hak perseorangan dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat atau negara; menganggap diri sendiri (kepribadian) lebih penting daripada orang lain.
Interaksi	: Hal saling melakukan aksi; berhubungan
Internal	: Menyangkut bagian dalam (tubuh, diri, mobil, dsb); dalam (negeri); sebelah dalam; di kalangan sendiri; dalam lingkungan sendiri
Internasionalisme	: Prinsip yang mendorong saling kerjasama antar negara dan bangsa-bangsa.
Jemawa	: Angkuh; congkak; suka mencampuri perkara orang lain
Keutuhan	: Hal (keadaan) utuh
Kesatuan	: Perihal satu; keesaan; sifat tunggal; satuan
Kodrat	: Kekuasaan (Tuhan); hukum (alam); sifat asli; sifat bawaan
Komprehensif	: Mampu menangkap (menerima dengan baik); mempunyai wawasan yang luas
Komunal	: Bersangkutan dengan komune; milik rakyat umum
Komunitas	: Kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu; masyarakat; paguyuban
Konsekuensi	: Akibat dari suatu perbuatan
Konstitusi	: Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan
Kontradiktif	: Bertentangan, berlawanan
Kurikuler	: Bersangkutan dengan kurikulum

Kosmopolitanisme	: satu paham yang menganggap seluruh manusia adalah anggota dari satu komunitas/masyarakat dunia
Liberalisme	: Aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai yang utama
Leitstar dinamis	: Istilah/julukan pada Pancasila; bintang penuntun yang memandu negara bangsa Indonesia agar dapat mewujudkan cita-citanya yakni, mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila Lingua franca : Bahasa penghubung; bahasa atau dialek yang membuat komunikasi diantara orang atau kelompok orang yang memiliki bahasa asal berbeda-beda dapat terjadi
Majemuk	: Terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan
Mayoritas	: Jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibanding dengan jumlah lain yang tidak memperlihatkan ciri itu
Meja Statis	: Istilah/julukan Pancasila; suatu pijakan yang menyatukan seluruh elemen bangsa
Minoritas	: Golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat
Moral	: Ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila
Multikulturalisme	: Gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan; pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik secara sederajat

Nasionalisme	: Paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan; kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan
Norma	: Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu
Paradigma	: Kerangka berpikir; model dalam teori ilmu pengetahuan
Pedoman	: Hal (pokok) yg menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu
Persatuan	: Gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) beberapa bagian yang sudah bersatu; perserikatan; serikat; perihal bersatu
Pluralisme	: Keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya); pedoman interaksi antar kelompok yang menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain
Pragmatisme	: Pandangan yang memberi penjelasan yang berguna tentang suatu permasalahan dengan melihat sebab akibat berdasarkan kenyataan untuk tujuan praktis
Pranata	: Sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku
Prinsip	: Asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya)
Proporsional	: Sesuai dengan proporsi; seimbang

Radikalisme	: Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; paham atau aliran yang melakukan penafsiran secara deduktif, ketat dan eksklusif terhadap ajaran-ajaran agama yang menyangkal keberadaan kelompok penganut agama dan kepercayaan lain dengan cara yang melanggar etika sosial, bahkan hak asasi manusia
Religius	: Bersifat keagamaan
Signifikan	: Penting; berarti
Sistem	: Perangkat/unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu totalitas
Solidaritas	: Sifat satu rasa (senasib dan sebagainya); perasaan setia kawan
Strategi	: Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus
Stereotip	: Konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat
Subjektif	: Mengenai atau menurut pandangan (perasaan) sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau halnya
Toleransi	: Bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri
Tren	: Gaya mutakhir; kecenderungan

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdullah, I. 2010. *Berpihak Pada Manusia Paradigma Nasional Pembangunan Indonesia Baru* (N. A. Rido & H. Jubba (eds.)). Yogyakarta: TICI Publications.
- Albrow, Martin dan King, Elizabeth. 1990. *Globalization, Knowledge and Society*. London: Sage.
- Alfaqi, M. Z. 2015. "Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik, Identitas, Serta Solidaritas". *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 28 (2), 111-116.
- Armada, R. 2015. *Kearifan Lokal – Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan* (Armada R., Ohoitumur, J., Mulyatno, C.B.; Madung, O.G (penyunting)). Yogyakarta: PT Kanisius.
- Asmarolini, A. P. 2016. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa di Era Globalisasi". *Citizenship: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v4i2>.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. 2019. *Pancasila: Dialektika dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: BPIP.
- . 2020. *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: BPIP. Tidak diterbitkan.
- . 2020. *Standard Materi dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila Pendidikan Formal*. Jakarta: BPIP. Tidak diterbitkan.
- . 2020. *Ketuhanan dalam Bingkai Pancasila: Perspektif Lintas Iman*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- . 2020. *SIGMA PANCASILA: Menganyam Kepelbagaian Meneguhkan Keindonesiaan (Prosiding)*. Jakarta: BPIP.

- Bahar, Saafroedin dan Hudawati, Nannie (eds). 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Budimanta, Arif. 2019. *Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- , 2020. *Praktik Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Cohen, Andrew Jason. 2004. "What Toleration Is". *Ethics* 115 (October 2004): 68-95
- Darmoko, Puji Dwi. 2018. "Melacak Jejak Kebudayaan Nusantara, Membangun Semangat Ke-Bhineka-Tunggal-Ika-An". *Jurnal Madaniyah*, Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus 2018
- Friere, Paulo. 1977. *Cultural Action for Freedom*. Massachussets: Penguin Books.
- Ghani, Roeslan Abdul. 1963. *Resapkan dan Amalkan Pancasila*. Jakarta: Jajasan Prapanca.
- Hanafi, Muhammad. 2013. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No. 2 Desember 2013.
- Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Nasikun.
- Heywood, Andrew. 2014. *Global politics (2nd ed.)*. Basingstoke: Palgrave Macmillan
- Kbbi.kemendibud.go.id. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring*. Kemendikbud.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2019. *Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

- Kertiasih, N. N. 2018. "Bahasa Indonesia dan Nasionalisme di Indonesia".
Jurnal Bahasa Dan Budaya Kulturistik, Vol. 187-192.
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang. 1981. *Pancasila dalam Kedudukan dan Fungsinya Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, Y., & Sodeli, M. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Maarif, Ahmad Syafii. 2011. "Bhinneka Tunggal Ika Pesan Mpu Tantular untuk Keindonesiaan Kita". *Makalah Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: MPR-RI 17-19 Juni 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- M.D., Moh. Mahfud. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Mubarak, Zulfi. 2012. "Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan." *Salam, Jurnal Studi Masyarakat Islam*. Volume 15. Nomor 2. Desember 2012.
- Mustofa, Muhammad. 2002. "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi." *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. III Desember 2002: 30 - 38.
- Panitia Lima. 1977. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Mutiara.
- Kleingeld, Pauline; Brown, Eric. 2019. "Cosmopolitanism". *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Online: Center for the Study of Language and Information.

- Persada, Nasikun. 1985. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. 2013. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- PPIM UIN Syarif Hidayatullah. *Api Dalam Sekam: Keberagaman Muslim Gen Z. Survei Nasional Tentang Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia*. Kota Tangerang Selatan: PPIM UIN Syarif Hidayatullah.
- Pratama, N. I., & Hasan, S. 2015. *Hak dan Kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD 1945*. 1-10.
- Priyono, Herry B. 2011. "Dua Nafsu Bertemu: Perihal Kaitan Fundamentalisme Agama dan Pasar". *Prisma: Demokrasi Yang Dibajak-Perselingkuhan Negara, Fundamentalisme Pasar dan Agama*. Jakarta: LP3ES. Vol 6 (1): 37
- Rozi, Mohammad Fahrur. 2017. "Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Membangun Masyarakat Madani; Kajian Paradigmatik" *Al-Ibrah, Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* Volume 2 No.2.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku I: Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2012. *Panduan Pemasyarakatan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Setjen MPR RI.
- , 2012. *Presiden Bicara Pancasila*. Jakarta: Setjen MPR RI.
- , 2015. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Setjen MPR RI.

Sukarno. 1945. *Pidato Sukarno: Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*. Dalam <https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id>. Diakses pada 19 April 2021 Pukul 18.34 WIB.

Sudarmiyatun, S. 2012. *Makna Sumpah Pemuda*. Jakarta: PT. Balai Pustaka

Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tilaar, HAR. 2002. *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.

Tim Dosen Pancasila Pusat MPK Universitas Brawijaya. 2017. *Pancasila dalam Diskursus Sejarah Jalan Tengah dan Filosofi Bangsa*. Yogyakarta: Ifada.

Artikel dan Gambar

Andilink. 2020. *Data Tren Internet dan Media sosial Tahun 2020 di Dunia menurut Hootsuite*. Dalam <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020>. Diakses pada 22 Juni 2021 pukul 12.33 WIB.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. *Milik Kita di Laut Natuna*. Dalam <https://kkp.go.id/djprl/infografis-detail/4786-milik-kita-di-laut-natuna>. Diakses pada 22 Juni 2021 pukul 12.19 WIB.

Dutanusantaramerdeka.com. *Deklarasi Internet dan Sosial Media Sehat*. Dalam <https://www.dutanusantaramerdeka.com>. Diakses pada 22 Juni 2021 pukul 12.33 WIB.

Forum anak baru. 2021. *Penguatan Kapasitas Forum Anak Colliq Pujie*. Dalam <https://forumanak.id/kegiatanView/e1z55xozgj>. Diakses pada 23 Juni 2021 pukul 08.35 WIB.

Jateng.polri.go.id. *Pelajar dan Kepolisian Mendeklarasikan Anti Hoax*. Dalam <https://tribratanews.jateng.polri.go.id>. Diakses pada 23 Juni 2021 pukul 08.35 WIB.

Jatengprov.go.id. *Silaturahmi Antar Umat Beragama*. Dalam <https://jatengprov.go.id>. Diakses pada 22 Juni 2021 pukul 12.17 WIB.

Kabardamai.id. *Barisan Paskibraka Nasional*. Dalam <https://kabardamai.id/kolaborasi-wujudkan-cita-cita-bangsa-melalui-paskibraka/> (Kabardamai.id/Antara). Diakses 21 November 2022 pukul 04.36 WIB.

Kompas.com. 2019. *Infografik: Sejarah Lahirnya Sumpah Pemuda*. Dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/28/153613065/infografik-sejarah-lahirnya-sumpah-pemuda> (kompas.com/Dhawam Pambudi). Diakses pada 23 Juni 2021 pukul 08.35 WIB.

-----, 2020. *Kericuhan terjadi saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara*. Dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/09/15343431/23-polisi-luka-saat-rusuh-demo-di-jakarta-4-orang-masih-dirawat-di-rs> (kompas.com/Kristianto Purnomo). Diakses pada 23 Juni 2021 pukul 08.35 WIB.

Lapor.go.id. *Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat*. Dalam lapor.go.id. Diakses pada 23 Juni 2021 pukul 08.25 WIB.

Mediaindonesia.com. 2019. *Survey Wahid Institute: Radikalisme Cenderung Naik*. Dalam [https://mediaindonesia.com/read/detail/284269-survei-wahid-institute-intoleransi-radikalisme c--cemkderung naik](https://mediaindonesia.com/read/detail/284269-survei-wahid-institute-intoleransi-radikalisme-c-cemkderung-naik). Diakses pada 23 Juni 2021 pukul 11.30 WIB.

National Geographic Indonesia. 2012. *Ilustrasi Suasana Multikulturalisme di Ibu Kota Majapahit*. Dalam <https://nationalgeographic.grid.id/read/13283288/terus-mengungkap-masa-keemasan-dinasti-majapahit>. Diakses pada 23 Juni 2021 pukul 08.40 WIB

Okezone.com. 15. *Deklarasi Cinta Produk Indonesia*. Dalam <https://economy.okezone.com>. Diakses pada 23 Juni 2021 pukul 08.40 WIB

Patimbannews.com. *Sosialisasi Bahaya Radikalisme di lingkungan Sekolah oleh Kepolisian*. Dalam <https://www.patimbannews.com>. Diakses 22 Juni 2021 pukul 10.55 WIB

Presidenri.go.id. 2021. Paskibraka: Keberagaman dalam Merah Putih. Dalam <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/paskibraka-keberagaman-dalam-merah-putih>. Diakses pada 22 Juni 2021 pukul 11.47 WIB.

Siedoo.com. *Penyerahan Bantuan Bencana Oleh Siswa SKM Muhammadiyah Magelang*. Dalam <https://siedoo.com/> diakses pada 22 Juni 2021 pukul 11.47 WIB.

Sman1labuhanhaji.sch.id. *Rapat Osis Sebagai Contoh Berorganisasi*. Dalam <http://www.sman1labuhanhaji.sch.id>. Diakses pada 22 Juni 2021 pukul 12.21 WIB.

Tirto.id. 2016. *Menolak Terorisme*. Dalam <https://www.patimbannews.com>. Diakses 22 Juni 2021 pukul 10.55 WIB

Tripzilla.id. 16. *Pulau Bawah, Salah Satu Pulau Indah yang Terpencil di Indonesia*. Dalam <https://www.tripzilla.id>. Diakses 23 Juni 2021 pukul 08.51 WIB

voaindonesia.com. 2017. *Kerukunan Umat Beragama di Kampung Sawah*. Dalam <https://www.voaindonesia.com/a/kerukunan-umat-beragama-di-kampung-sawah-/4180694.html> Diakses 23 Juni 2021 pukul 08.51 WIB.

Yankotinu Jonnata. *Tantangan Dunia IT: Masyarakat dan IT*. Dalam <https://tirto.id>. Diakses 22 Juni 2021 pukul 10.45

Wikipedia.org. *Berkas: Sam Ratulangi IPPHOS.jpg*. Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Sam_Ratulangi_IPPHOS.jpg Diakses 25 Juni 2021 pukul 10.44

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Profil Penulis

Nama Lengkap : Yon Machmudi, Ph.D
Email : machmudi@ui.ac.id
Instansi : Universitas Indonesia
Alamat Instansi : Kampus UI Depok Jawa Barat 16424
Bidang Keahlian : Ilmu Sejarah



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Dosen Tetap Prodi Arab FIB UI (2006-sekarang)
2. Sekretaris Departemen Sejarah FIB UI (2014-2017)
3. Direktur Eksekutif Moderasi Indonesia Institute (2020-sekarang)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1 Sastra Arab UI (1992-1997)
2. S2 Graduate School of Islamic and Social Sciences, Virginia, USA (1997-1999)
3. S3 Asian Studies, Australian National University (2002-2007)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Tarbiyah Cinta (2016)
2. Sejarah Timur Tengah Kontemporer (2016)
3. Timur Tengah dalam Sorotan (2021)
4. Diaspora Bawean di Asia Tenggara (2021)
5. Era Baru Afghanistan: Dari Intervensi Asing hingga Kebangkitan Taliban (2022)

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Perubahan Sosial Politik Di Arab Saudi 1932-1975 (2017)
2. Konflik Masyarakat dan Budaya dalam Koran Terbitan Hadrami 1929 – 1935 (2018)
3. Dinamika Hubungan antar Kelompok Kurdi dalam Pendekatan Konstruktivisme (2019).
4. *Differences in Political Views between Al Azhar and Ikhwan Al Muslimin in Responding to the Military Coup in 2013* (2019).
5. *SAUDI ARABIA'S INTERNAL CHANGES AND ITS FOREIGN POLICIES IN RESPONDING THE ARAB SPRING* (2020).

6. *The Role of Women in Islamic Propagation. A Case Study of Tablighi Jamaah's Nyai of Pesantren Alfatah, East Java* (2020)
7. *The Reemergence of Indonesia Islamic State: Their Revival and Modul Operandi* (2021)
8. *Modernization and Changes in Kiai-Santri Relations in Three Pesantrens in Java* (2021).
9. *TURKISH LAICISM IN INDONESIA'S NEWSPAPERS (1920-1940) AND ITS INFLUENCE ON INDONESIAN SECULARISTS AND MUSLIMS THOUGHTS*

Profil Penulis

Nama : Asep Dahliana, S.Pd.,M.Pd.
 Email : -
 Instansi : Universitas Pendidikan Indonesia
 Alamat : Kp. Babakan Timur RT 03 RW 07
 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg
 Kabupaten Bandung 40397
 Bidang Keahlian : Pendidikan



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Tim Ahli Konsultan PT. Sangkuriang Perfekta untuk Survei Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau tahun 2015
2. Dosen Departemen Pendidikan Umum FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015-sekarang
3. Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Sosiologi FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015-sekarang.
4. Tim Penulis soal Tes Wawasan Kebangsaan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS tahun 2018-2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), 2008.
2. Program Studi Magister Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2011.
3. Program Studi Doktor Pendidikan Umum dan Karakter Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, masuk 2019.

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Penguatan Karakter Bela Negara di Perguruan Tinggi melalui “Project Citizen Digital”, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022
2. Pengembangan Model Peer Mediation di Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia, 2022
3. Pemetaan Karakteristik Pembinaan Karakter Profil Pelajar Pancasila, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia, 2022
4. Model Pendidikan Karakter Pancasila untuk Memperkuat Identitas Kebangsaan bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia, 2022

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Muhammad Sabri
Email : mohdsabriar@yahoo.co.id
Instansi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Alamat Instansi : Jl. Veteran III No.2, Gambir,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Bidang Keahlian : Agama dan Filsafat



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Direktur Pengkajian Kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Direktur Pengkajian Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
3. Ketua Program Studi Dirasah Islamiyah (Islamic Studies), Pascasarjana UIN Alauddin

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1 IAIN Alauddin Ujungpandang, Lulus 1991
2. S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Lulus 1997
3. S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Lulus 2008

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Mengurai Kesenyapan Bahasa Mistik: Dari Filsafat Analitik Ke Epistemologi Hudhuri. 2017
2. Islam, Keindonesiaan, dan Postmodernitas: Gagasan Pembaruan Pemikiran Himpunan Mahasiswa Islam Gelombang Kedua. 2017

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. *"Freedom of Religion and Religious Relations (Construction of Sukarno's Thought)"*. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan. 2022
2. *"Internalisasi dan institusionalisasi kebijakan ekonomi Pancasila"*. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan. 2021
3. *"Menemukan Kembali Spirit Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: Timbangan Nalar Philosophia Perennis"*. Jurnal Pembumian Pancasila. 2021

■ Informasi lain:

1. Google scholar:
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=list_works&hl=id&hl=id&user=STJ4km8AAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate



Profil Penelaah

Nama Lengkap : F.X. Adji Samekto
Email : samektoadjifx@gmail.com
Instansi : Universitas Diponegoro
Alamat Instansi : Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah
Bidang Keahlian : Filsafat Hukum, Teori Hukum



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
2. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. Sarjana Hukum, Universitas Diponegoro, Lulus Tahun 1986
2. Magister Humaniora, Universitas Padjajaran, Lulus Tahun 1995
3. Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Lulus Tahun 2004

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Tantangan Indonesia dalam Taman Sari Dunia: Mewujudkan Kedaulatan Pangan. Tahun 2021
2. Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme. Tahun 2020
3. Negara dalam dimensi hukum internasional. Tahun 2018

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. "Legal Certainty of Plea Bargaining In Addressing Tax Crimes In Indonesia". *International Journal of Global Community*. 2022.
2. "Policy Complexity of Agrarian Reform in Coastal Regions: An Effort to Realise Social Welfare". *Journal of Positive School Psychology*. 2022
3. "A Psychological view of Corporate Crimes of Legislation". *Journal of Positive School Psychology*. 2022
4. "Criminal Liability of Holding Company in Environmental Crime in Indonesia". *International Journal of Environmental Science* 6. 2021
5. "Barriers to the Enforcement of Environmental Law: An Effect of Free Market Domination and Regional Autonomy in Indonesia". *Hasanuddin Law Review*. 2021

■ Informasi lain:

1. Google scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=f479_wQAAAAJ&hl=en



Profil Penelaah

Nama Lengkap : Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.

Email : d_sundawa@yahoo.com

Instansi : UPI

Alamat Instansi : Bandung

Bidang Keahlian : Pembelajaran PKn

■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Koordinator PLPG Rayon 10 (2007-2017)
2. Tim Pengembang Kurikulum UPI (2016-2019)
3. Ketua Prodi PIPS (2016-2021)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1 IKIP Bandung - PMPKN (1981-1986)
2. S2 IKIP Bandung - IPS (1995-1997)
3. S3 UPI - PKn (2008-2011)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Materi dan Pembelajaran PKn (2017)
2. Pembelajaran IPS (2017)
3. Evaluasi Pembelajaran PPKn (2021)
4. Membangun Kelas PPKn sebagai Laboratorium Pendidikan Demokrasi (2022)
5. Buku Pendidikan Lalu Lintas untuk Siswa SMA (2018)
6. Pendidikan Multi Budaya (2018)
7. Bumiku Indonesia (Bunga Rampai Kearifan Lokal (2021)
8. Rumah Kita Dosen Indonesia (2020)

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pelestarian Nilai-nilai Civic Culture Dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang (2016)
2. Penerapan Model VCT (*Value Clarification Technique*) dengan menggunakan media cerita daerah dalam Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan Karakter peserta didik (2016)
3. *The Implementation of Character Education on Civics Education Subject at Junior High School of UPI* (2018)
4. Membangun Kesadaran Warganegara Milenial Dalam Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila (2019)
5. *Project Citizen Digital: Education in The Era Of Industrial Revolution 4.0* (2020)
6. Pendidikan Nilai dan Moral Dalam Sistem Kurikulum Pendidikan Di Aceh (2021)
7. Strengthening civic education through project citizen as an incubator for democracy education (2022)

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Prof.Dr.Dwi Purwoko,MSi
Email : d_purwoko2003@yahoo.com
Instansi : Puslit Masyarakat dan Budaya BRIN
Alamat Instansi : Jln.Gatos Subroto 10 Jakarta Selatan
Bidang Keahlian : Agama dan Tradisi Keagamaan
(Agama dan Kemasyarakatan)



Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Dosen Fakultas Komunikasi Universitas Pancasila
2. Dosen Pasca Sarjana Univeristas Pramita Indonesia

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. Doktoral dari Studi Penyuluhan Pembangunan IPB

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Model Internalisasi Nilai Nilai Moderasi Beragama Pada Peserta Didik di Semarang
2. Model Kurikulum Kontektual dan Kemampuan Literasi di Papua

Profil Editor

Nama Lengkap : Hendrikus Genggor, S.IP, M.Pd
Email : -
Instansi : Pemda KAB. Manggarai Barat
Alamat Instansi : Manggarai Barat
Bidang Keahlian : Editing



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Penerbit Erlangga, Editor, 2000-2010
2. Pemda KAB. Manggarai Barat, 2010-sekarang

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fisipol/Manajemen Publik, 1999
2. S2, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Magister Pendidikan, 2008

■ Judul Buku dan Tahun Terbit:

1. Editor, Sosiologi SMA - Kunmaryati dan Juju Suryawati, Esis-Erlangga
2. Editor, IPS SD - Tyas utami, Esis-Erlangga
3. Editor, PKN SD - Dyah sriwilujeng, Esis-Erlangga
4. Editor, Ekonomi SMA - Alam S, Esis-Erlangga
5. Editor, Seni Musik SMP dan SMA - Matusali, Esis-Erlangga
6. Editor, Pakem: Panduan Praktis Mengajarkan IPS dengan Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan - Nani Rosdijati, Esis-Erlangga
7. Penulis, Pendidikan Lingkungan dan Budaya Manggarai - Hendrikus Genggor dan Fransiskus Ramli, Anugrah Ruteng
8. Penulis, Pendidikan Konservasi Lingkungan - Hendrikus Genggor, Burung Indonesia/Bird Life Indonesia

■ Karya Tulis Lain:

1. Potret Pendidikan di NTT, Flores Pos
2. Transformasi Birokrasi Bagi Otonomi Daerah, SuryaTimor
3. UN: Mengukur Mutu Pendidikan di NTT, Flores Pos
4. Guru Kurang “Seksi” Bagi Pemda, Flores Pos
5. MARAH ORANG LAIN ATAU (SEBAIKNYA) MARAH DIRI SENDIRI?, Florespost.co

Profil Ilustrator

Nama Lengkap : Felia Febriany Gunawan
Email : feliafebrianyy@gmail.com
Bidang Keahlian : Ilustrasi
Instagram/Website : @ailef_arts /
feliafebrianygunawan.carrd.co



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Freelance Illustrator (2021-sekarang)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. SMA BPK Penabur Tasikmalaya (2017-2020)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. "Rusa yang Tidak Bersyukur", Buku Carita Barudak UNPAR, 2021.

■ Karya/Pameran/Eksibisi dan Tahun Pelaksanaan (10 tahun terakhir):

1. Pameran Ilustrasi Buku Anak PiBo, Jakarta Content Week 2022, Taman Ismail Marzuki, 2022.

Profil Desainer

Nama Lengkap : Ingrid Pangestu
Email : ingridpangestu@gmail.com
Media Sosial : Instagram @ingridpangestu
Bidang Keahlian : Desain Grafis

■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. 2013-sekarang : Freelancer
2. Co-owner usaha kuliner "Bakmi Asmara"
3. Desainer Grafis di 110% Studio

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. Politeknik Negeri Media Kreatif - D3 Desainer Grafis (2010-2013)